



PEMERINTAH  
KOTA  
BANJARBARU



# LAPORAN KINERJA 2022



# KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru yang disampaikan melalui Laporan Kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai salah satu instrument untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Selain itu, laporan ini juga sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022 merupakan laporan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021–2026 yang berisi capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Banjarbaru beserta upaya yang sudah dilakukan untuk mencapai target serta menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis. Laporan ini juga memuat efisiensi yang dihasilkan dari implementasi SAKIP serta penghargaan yang telah diraih oleh Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2022. Pelaporan

Kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi e-SAKIP Reviu (ESR).

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum sempurna, untuk itu kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang sangat dibutuhkan, sehingga nantinya dapat menjadi masukan dalam memperbaiki kinerja ke depan, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya. Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi atas kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru.

Banjarbaru,     Maret 2023

**WALI KOTA BANJARBARU**



**H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, SH., M.H.**

# IKHTISAR KINERJA



Prioritas pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2022 mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yang kemudian diselaraskan dengan program SKPD serta berdasarkan isu strategis dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2022 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 dengan ditetapkannya tema Pembangunan yaitu “Memperkuat Perekonomian Daerah, Kondisi Sosial Masyarakat dan Lingkungan Hidup”.

Tahun 2022 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian visi misi, tujuan dan sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yang dilaporkan dalam sebuah Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022 secara umum berisi mengenai realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Banjarbaru yang merupakan ukuran keberhasilan instansi pemerintah beserta upaya yang telah dilakukan, hambatan, dan rencana tindak lanjut untuk mencapai target serta menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dalam upaya pencapaian misi, tujuan, dan sasaran strategis tersebut.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 terdapat 3 (tiga) Misi, 3 (tiga) Tujuan dan 14 (empat belas) sasaran, dengan 23 (dua puluh tiga) indikator sasaran, dengan capaian pada tahun 2022 sebagai berikut:



1. Misi I terdiri dari 1 tujuan, 5 sasaran strategis dan 7 indikator sasaran dengan capaian sebanyak 3 indikator sasaran kategori Baik Sekali, 3 indikator sasaran kategori Baik, dan 1 indikator sasaran kategori Kurang;
2. Misi II terdiri dari 1 tujuan, 6 sasaran strategis dan 9 indikator sasaran dengan capaian sebanyak 6 indikator sasaran kategori Baik Sekali dan 3 indikator sasaran kategori Baik;
3. Misi III terdiri dari 1 tujuan, 3 sasaran strategis dan 7 indikator sasaran dengan capaian sebanyak 2 indikator sasaran kategori Baik Sekali, 4 indikator sasaran kategori Baik, dan 1 indikator sasaran kategori Cukup.

Berdasarkan hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 14 sasaran strategis yang mencakup 23 indikator kinerja tersebut, untuk pencapaian kinerja diketahui bahwa 11 indikator kinerja atau 47,82% kategori capaian kinerja Baik Sekali, 10 indikator kinerja atau 43,48% kategori capaian kinerja Baik, 1 indikator kinerja atau 4,35% kategori capaian kinerja Cukup dan 1 indikator kinerja atau 4,35% kategori capaian kinerja Kurang.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR KINERJA .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
<b>BAB I     PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Aspek Strategik Kota Banjarbaru .....	3
1.3. Isu Strategis .....	9
1.4. Prioritas Pembangunan Tahun 2022.....	10
1.5. Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	12
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>16</b>
2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) .....	16
2.2. Prioritas Pembangunan .....	18
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	20
2.4. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022.....	22
<b>BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>25</b>
3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022.....	25
3.2. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022.....	27
1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat .....	29
2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat .....	36
3. Meningkatnya Kesenjangan Gender .....	68
4. Terjaganya Daya Beli Masyarakat .....	76
5. Meningkatnya Toleransi Beragama, Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat .....	81
6. Meningkatnya Kegiatan Perekonomian Kota .....	97
7. Meningkatnya PAD dan Nilai Investasi Daerah .....	113
8. Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran .....	130
9. Meningkatnya Stabilitas Ketersediaan Pangan .....	149
10. Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas .....	161
11. Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup .....	185
12. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah .....	195
13. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik .....	229

14. Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah .....	233
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>242</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
Perjanjian Kinerja Wali Kota Banjarbaru Tahun 2022	
Daftar Penghargaan Yang Diterima Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022	

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Luas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Banjarbaru, 2022 .....	4
Tabel 1.2.	Jumlah Penduduk Kota Banjarbaru, 2022.....	7
Tabel 1.3.	Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru, 2018-2022.....	8
Tabel 1.4.	Prioritas Pembangunan Kota Banjarbaru, 2022 .....	10
Tabel 1.5.	Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, 2022.....	12
Tabel 2.1.	Keterkaitan Visi RPJMD Kota Banjarbaru dengan RPJPD, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMN .....	17
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Wali Kota Banjarbaru, 2022 .....	20
Tabel 2.3.	Rencana Kerja dan Anggaran, 2022 .....	22
Tabel 3.1.	Kategori Capaian Kinerja.....	25
Tabel 3.2.	Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru, 2022	26
Tabel 3.3.	Realisasi Capaian IKU Pemerintah Kota Banjarbaru, 2022....	27
Tabel 3.4.	Realisasi Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah, 2022 .....	30
Tabel 3.5.	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Pendidikan, 2021-2022	33
Tabel 3.6.	Indikator Keberhasilan Peningkatan Kemampuan Professional Guru dan Tenaga Pendidikan .....	33
Tabel 3.7.	Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah 2 Tahun Terakhir .....	34
Tabel 3.8.	Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah dengan Kabupaten/Kota/Provinsi .....	32
Tabel 3.9.	Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah dengan Target RPJMD dan Target Nasional .....	32
Tabel 3.10.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Angka Rata-Rata Lama Sekolah, 2022.....	35
Tabel 3.11.	Realisasi Anggaran Angka Rata-Rata Lama Sekolah, 2022....	35
Tabel 3.12.	Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup, 2022.....	37
Tabel 3.13.	Realisasi Capaian Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Kota Banjarbaru, 2021-2022.....	39
Tabel 3.14.	Distribusi Penyebab Kematian Bayi Menurut Kecamatan di Kota Banjarbaru, 2022.....	43
Tabel 3.15.	Distribusi Kematian Bayi Menurut Kecamatan di Kota Banjarbaru, 2022.....	45

Tabel 3.16.	Realisasi Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kota Banjarbaru, 2021-2022.....	45
Tabel 3.17.	Realisasi Capaian Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman di Kota Banjarbaru, 2021-2022.....	46
Tabel 3.18.	Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang Memenuhi Standar di Kota Banjarbaru, 2022.....	48
Tabel 3.19.	Realisasi Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kota Banjarbaru, 2021-2022.....	48
Tabel 3.20.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup 2 Tahun Terakhir .....	48
Tabel 3.21.	Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup dengan Kab/Kota/Provinsi.....	49
Tabel 3.22.	Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup dengan Target RPJMD dan Target Nasional.....	49
Tabel 3.23.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Angka Harapan Hidup, 2022 .....	54
Tabel 3.24.	Realisasi Anggaran Program Pendukung Angka Harapan Hidup, 2022.....	55
Tabel 3.25.	Realisasi Kinerja Angka Prevalensi Stunting, 2022 .....	57
Tabel 3.26.	Realisasi Capaian Program Penunjang Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Kota Banjarbaru, 2021-2022.....	58
Tabel 3.27.	Target dan Realisasi, 2022 .....	59
Tabel 3.28.	Realisasi dan Capaian Kinerja, 2021-2022.....	60
Tabel 3.29.	Target dan Realisasi Kinerja, 2022.....	61
Tabel 3.30.	Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir.....	61
Tabel 3.31.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Angka Prevalensi Stunting 2 Tahun Terakhir .....	61
Tabel 3.32.	Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Prevalensi Stunting dengan Kab/Kota/Provinsi.....	62
Tabel 3.33.	Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup dengan Target RPJMD dan Target Nasional.....	62
Tabel 3.34.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	67
Tabel 3.35.	Realisasi Anggaran Program Pendukung Prevalensi Stunting, 2022 .....	68
Tabel 3.36.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IPG, 2022.....	75
Tabel 3.37.	Realisasi Anggaran Program Pendukung Indeks Pembangunan Gender (IPG), 2022 .....	76
Tabel 3.38.	Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Inflasi dengan Kab/Kota/Provinsi .....	78

Tabel 3.39	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Angka Inflasi, 2022.....	80
Tabel 3.40.	Realisasi Anggaran Program Pendukung Angka Inflasi, 2022 .....	81
Tabel 3.41.	Realisasi Kinerja Meningkatnya Toleransi Beragama, Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat, 2022 .....	83
Tabel 3.42.	Pengukuran Realisasi Berdasarkan Pembinaan Keagamaan.	83
Tabel 3.43.	Data Potensi Konflik SARA yang terjadi di Kota Banjarbaru, 2022 .....	83
Tabel 3.44.	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pembinaan Keagamaan, Penyelesaian Potensi Konflik SARA dan Pelanggaran Perda 2 Tahun Terakhir .....	85
Tabel 3.45.	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pembinaan Keagamaan, Penyelesaian Potensi Konflik SARA dan Pelanggaran Perda dengan Target RPJMD dan Target Nasional.....	86
Tabel 3.46.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Persentase Pembinaan Keagamaan, Penyelesaian Potensi Konflik SARA dan Pelanggaran Perda, 2022 .....	89
Tabel 3.47.	Realisasi Anggaran Program Pendukung Persentase Pembinaan Keagamaan, Penyelesaian Potensi Konflik SARA dan Pelanggaran Perda, 2022.....	90
Tabel 3.48.	Realisasi Kinerja Persentase Penyelesaian Kebencanaan, 2022	91
Tabel 3.49.	Bencana Alam yang Ditangani, 2022 .....	92
Tabel 3.50.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Kebencanaan 2 Tahun Terakhir.....	94
Tabel 3.51.	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penyelesaian Kebencanaan dengan Target RPJMD dan Target Nasional ..	94
Tabel 3.52.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Penyelesaian Kebencanaan, 2022 .....	96
Tabel 3.53.	Realisasi Anggaran Program Pendukung Penanganan Kebencanaan, 2022.....	96
Tabel 3.54	Realisasi Kinerja Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata, 2022	98
Tabel 3.55.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata, 2022 .....	100
Tabel 3.56.	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata, 2022.....	101
Tabel 3.57.	Realisasi Kinerja Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro, Industri Kecil dan Ekonomi Kreatif, 2022 .....	102
Tabel 3.58.	Rekapitulasi Data UMKM Perbidang Usaha, 2022.....	103



Tabel 3.59.	Rekapitulasi Data UMKM Perbidang Usaha, 2021 .....	103
Tabel 3.60.	Perbandingan Realisasi Kinerja Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro, Industri Kecil dan Ekonomi Kreatif, 2020-2022 .....	104
Tabel 3.61.	Perbandingan Realisasi Kinerja Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro, Industri Kecil dan Ekonomi Kreatif dengan Target RPJMD .....	105
Tabel 3.62.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro, Industri Kecil dan Ekonomi Kreatif, 2022	111
Tabel 3.63.	Realisasi Anggaran Program Pendukung Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro, Industri Kecil dan Ekonomi Kreatif, 2022 .....	112
Tabel 3.64.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Persentase Peningkatan PAD, 2022 .....	117
Tabel 3.65.	Realisasi Anggaran Program Pendukung Persentase Peningkatan PAD, 2022 .....	118
Tabel 3.66.	Data Realisasi Peningkatan Investasi Daerah, 2021-2022 .....	120
Tabel 3.67.	Realisasi Kinerja Peningkatan Investasi Daerah, 2022 .....	120
Tabel 3.68.	Data Nilai Realisasi Investasi, 2020-2022 .....	122
Tabel 3.69.	Data Realisasi Investor, 2020-2022 .....	123
Tabel 3.70.	Data Pencapaian Penanam Modal yang Melaksanakan Kegiatan Investasi Sesuai Ketentuan, 2022.....	124
Tabel 3.71.	Persentase Pengolahan Data dan Sistem Informasi.....	126
Tabel 3.72.	Perbandingan Realisasi Kinerja Peningkatan Investasi Daerah 2 Tahun Terakhir .....	126
Tabel 3.73.	Perbandingan Realisasi Kinerja Peningkatan Investasi Daerah dengan Target RPJMD dan Target Nasional.....	127
Tabel 3.74.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Peningkatan Investasi Daerah, 2022 .....	129
Tabel 3.75.	Realisasi Anggaran Program Pendukung Peningkatan Investasi Daerah, 2022.....	129
Tabel 3.76.	Realisasi Capaian Kinerja Angka Kemiskinan, 2022 .....	135
Tabel 3.77.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Angka Kemiskinan 2 Tahun Terakhir .....	136
Tabel 3.78.	Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Kemiskinan dengan Target RPJMD dan Target Nasional.....	136
Tabel 3.79.	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, 2022.....	137
Tabel 3.80.	Indeks Bantuan Sosial PKH .....	139
Tabel 3.81.	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH Kota Banjarbaru, 2022 (Tahap 4) .....	140
Tabel 3.82.	Jumlah KPM Program Sembako di Kota Banjarbaru, 2022....	141

Tabel 3.83.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Angka Kemiskinan, 2022	142
Tabel 3.84.	Realisasi Anggaran Program Pendukung Angka Kemiskinan, 2022 .....	143
Tabel 3.85.	Realisasi Kinerja Angka Pengangguran, 2022.....	144
Tabel 3.86.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Angka Pengangguran 2 Tahun Terakhir .....	146
Tabel 3.87.	Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Pengangguran dengan Kab/Kota/Provinsi .....	146
Tabel 3.88.	Perbandingan Kinerja Angka Pengangguran dengan Target RPJMD dan Target Nasional.....	147
Tabel 3.89.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Angka Pengangguran, 2022 .....	148
Tabel 3.90.	Realisasi Anggaran Program Pendukung Angka Pengangguran, 2022 .....	149
Tabel 3.91.	Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Ketersediaan, 2022 .....	150
Tabel 3.92.	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja PPH Konsumsi, 2022.	151
Tabel 3.93.	Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Uji Sampel, 2022.....	152
Tabel 3.94.	Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Produksi, 2022.....	152
Tabel 3.95.	Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Produksi, 2022.....	153
Tabel 3.96.	Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Produksi Tanaman Pangan, 2022.....	154
Tabel 3.97.	Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Populasi, 2022.....	155
Tabel 3.98.	Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Populasi Ternak 3 Tahun Terakhir .....	155
Tabel 3.99.	Jumlah Kelompok Tani dan Jumlah Kelompok Tani yang naik kelas/score .....	156
Tabel 3.100.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Skor Pola Pangan Harapan untuk Ketersediaan Pangan, 2022 .....	159
Tabel 3.101.	Realisasi Anggaran Program Pendukung Skor Pola Pangan Harapan untuk Ketersediaan Pangan, 2022 .....	160
Tabel 3.102.	Realisasi Program Pengelolaan Sumber Daya Air, 2022.....	163
Tabel 3.103.	Target dan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Perlindungan Banjir, 2022.....	164
Tabel 3.104.	Realisasi dan Capaian Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi, 2022	165
Tabel 3.105.	Realisasi dan Capaian Kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kota, 2022 .....	165
Tabel 3.106.	Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Saluran Drainase yang Berfungsi Baik, 2022.....	165

Tabel 3.107.	Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Infrastruktur Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kota dalam Kondisi Baik, 2022.....	166
Tabel 3.108.	Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Gedung Negara Milik Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik, 2022.....	166
Tabel 3.109.	Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan, 2022.....	167
Tabel 3.110.	Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Perlindungan Banjir, 2021-2022 .....	167
Tabel 3.111.	Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi, 2021-2022 .....	168
Tabel 3.112.	Realisasi dan Capaian Kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kota, 2021-2022 .....	168
Tabel 3.113.	Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Saluran Drainase yang berfungsi Baik, 2021-2022 .....	168
Tabel 3.114.	Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Infrastruktur Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman, 2021-2022.....	169
Tabel 3.115.	Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Gedung Negara Milik Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik, 2021-2022.....	169
Tabel 3.116.	Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan, 2021-2022.....	170
Tabel 3.117.	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Perlindungan Banjir dengan Target RPJMD .....	170
Tabel 3.118.	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota dengan Target RPJMD .....	170
Tabel 3.119.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kota dengan Target RPJMD .....	171
Tabel 3.120.	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Saluran Drainase dengan Target RPJMD .....	171
Tabel 3.121.	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Infrastruktur Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman dengan Target RPJMD .	171
Tabel 3.122.	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Gedung Negara Milik Pemerintah Daerah dengan Target RPJMD .....	172
Tabel 3.123.	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan Target RPJMD.....	172
Tabel 3.124.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indeks Infrastruktur Wilayah, 2022 .....	183
Tabel 3.125.	Realisasi Anggaran Program Pendukung Indeks Infrastruktur Wilayah, 2022.....	184

Tabel 3.126.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, 2022 .....	189
Tabel 3.127.	Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup, 2022 .....	190
Tabel 3.128.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2 Tahun Terakhir .....	190
Tabel 3.129.	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan Kab/Kota/Provinsi, 2022 .....	191
Tabel 3.130.	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan Target RPMJD dan Target Nasional .....	191
Tabel 3.131.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, 2022 .....	193
Tabel 3.132.	Realisasi Anggaran Program Pendukung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, 2022 .....	195
Tabel 3.133.	Pengukuran Realisasi Indikator Nilai SAKIP Berdasarkan Hasil Evaluasi Kementerian PANRB, 2022 .....	196
Tabel 3.134.	Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Kab/Kota/Provinsi, 2022 .....	197
Tabel 3.135.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Nilai SAKIP, 2022 .....	199
Tabel 3.136.	Realisasi Anggaran Program Pendukung Nilai SAKIP, 2022 .....	200
Tabel 3.137.	Realisasi Program Pendukung Nilai LPPD, 2022 .....	203
Tabel 3.138.	Realisasi Kinerja Opini BPK, 2022 .....	204
Tabel 3.139.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Opini BPK 2 Tahun Terakhir .....	205
Tabel 3.140.	Perbandingan Realisasi Kinerja Opini BPK dengan Kab/Kota/Provinsi, 2022 .....	206
Tabel 3.141.	Perbandingan Realisasi Kinerja Opini BPK dengan Target RPJMD dan Target Nasional.....	206
Tabel 3.142.	Realisasi Anggaran Program Pendukung Opini BPK, 2022...	208
Tabel 3.143.	Realisasi Kinerja Indeks Penerapan Manajemen Resiko, 2022 .....	209
Tabel 3.144.	Hasil Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, 2022 .....	210
Tabel 3.145.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Penerapan Manajemen Resiko 2 Tahun Terakhir .....	210
Tabel 3.146.	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Penerapan Manajemen Resiko dengan Target RPJMD dan Target Nasional .....	211
Tabel 3.147.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indeks Penerapan Manajemen Resiko, 2022.....	214
Tabel 3.148.	Realisasi Anggaran Program Pendukung Indeks Penerapan Manajemen Resiko, 2022 .....	214
Tabel 3.149.	Realisasi Kinerja IP ASN, 2022 .....	222
Tabel 3.150.	Realisasi IP ASN per Dimensi .....	223

Tabel 3.151.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IP ASN 2 Tahun Terakhir .....	223
Tabel 3.152.	Perbandingan Realisasi Kinerja IP ASN dengan Kab/Kota/Provinsi, 2022 .....	224
Tabel 3.153.	Perbandingan Realisasi Kinerja IP ASN dengan Target RPJMD .....	224
Tabel 3.154.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IP ASN, 2022.....	227
Tabel 3.155.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IP ASN, 2022.....	227
Tabel 3.156.	Nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan .....	231
Tabel 3.157.	Realisasi Anggaran Program Pendukung IKM, 2022 .....	233
Tabel 3.158.	Realisasi Kinerja Indeks SPBE, 2022 .....	235
Tabel 3.159.	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan SPBE, 2022.....	236
Tabel 3.160.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks SPBE 2 Tahun Terakhir .....	236
Tabel 3.161.	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks SPBE dengan Kab/Kota/Provinsi, 2022 .....	236
Tabel 3.162.	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks SPBE dengan Target RPJMD dan Target Nasional.....	237
Tabel 3.163.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indeks SPBE, 2022 .....	239
Tabel 3.164.	Realisasi Anggaran Program Pendukung Indeks SPBE, 2022 .....	240

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta Kota Banjarbaru, 2022.....	6
Gambar 3.1.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun), 2020-2022.....	31
Gambar 3.2.	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun), 2020-2022 .....	38
Gambar 3.3.	Penyebab Kematian Bayi di Kota Banjarbaru, 2022 .....	43
Gambar 3.4.	Indeks Pembangunan Gender (IPG), 2019-2021 .....	70
Gambar 3.5.	Inflasi (Persen), 2022 .....	77
Gambar 3.6.	Peringkat Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor, 2022 ....	121
Gambar 3.7.	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Indonesia, 2018-2022 .....	131
Gambar 3.8.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022.....	131
Gambar 3.9.	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Banjarbaru, 2018 - 2022 .....	132
Gambar 3.10.	Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota di Kalimantan Selatan, 2022 .....	132
Gambar 3.11.	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa), 2020-2022 .....	135
Gambar 3.12.	Tingkat Pengangguran Terbuka, 2020-2022 .....	145
Gambar 3.13.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kab/Kota/Provinsi .....	157



**LAPORAN KINERJA**  
**2022**

---

**PENDAHULUAN**

**BAB I**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Tujuan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan diturunkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dengan indikator kinerja pada masing-masing sasaran merupakan sarana untuk mengukur capaian kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru.

Wali Kota menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Salah satu prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban pejabat

publik terhadap masyarakat yang memberinya wewenang. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial di setiap lingkungan organisasi yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pada tiap-tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bidangnya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controlable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrolable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Dengan demikian, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui laporan pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sehingga setiap penyelenggaraan pemerintahan sudah seharusnya melaporkan hasilnya baik kepada pemerintah di atasnya maupun kepada masyarakat luas sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas implementasi rencana dan penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja juga bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya

dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkelanjutan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Mengacu pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022 serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maka Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan lainnya. Pencapaian sasaran tersebut disajikan dalam bentuk informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD tahun ke-2 (Tahun 2022), realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja. Laporan Kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Wali Kota.

## **1.2 Aspek Strategik Kota Banjarbaru**

Kota Banjarbaru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3822) pada tanggal 20 April 1999.

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas otonomi daerah, Pemerintah Kota Banjarbaru mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Secara geografis, Kota Banjarbaru terletak antara 3°25'40" sampai dengan 3°28'37" Lintang Selatan dan 114°41'22" sampai dengan 114°54'25" Bujur Timur dengan batas wilayah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kecamatan Gambut dan Beruntung Baru Kabupaten Banjar
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

Luas wilayah Kota Banjarbaru mencapai 371,38 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 5 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Liang Anggang, Landasan Ulin, Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan dan Cempaka. Selanjutnya dari 5 Kecamatan tersebut terdiri dari 20 Kelurahan. Adapun pembagian luas wilayah kecamatan dan kelurahan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1.**  
**Luas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Banjarbaru, 2022**

No	Kecamatan/Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	%
<b>1.</b>	<b>Kecamatan Landasan Ulin</b>	<b>92,42</b>	<b>24,89</b>
	Kelurahan Landasan Ulin Timur	18,76	
	Kelurahan Guntung Payung	15,25	
	Kelurahan Syamsudin Noor	18,67	
	Kelurahan Guntung Manggis	39,74	
<b>2.</b>	<b>Kecamatan Liang Anggang</b>	<b>85,86</b>	<b>23,12</b>
	Kelurahan Landasan Ulin Tengah	23,86	
	Kelurahan Landasan Ulin Utara	19,50	
	Kelurahan Landasan Ulin Barat	16,15	
	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	26,35	
<b>3.</b>	<b>Kecamatan Cempaka</b>	<b>146,70</b>	<b>39,50</b>
	Kelurahan Palam	14,75	

No	Kecamatan/Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	%
	Kelurahan Bangkal	29,80	
	Kelurahan Sungai Tiung	21,50	
	Kelurahan Cempaka	80,65	
<b>4.</b>	<b>Kecamatan Banjarbaru Utara</b>	<b>24,44</b>	<b>6,58</b>
	Kelurahan Loktabat Utara	14,24	
	Kelurahan Mentaos	1,62	
	Kelurahan Komet	2,44	
	Kelurahan Sungai Ulin	6,14	
<b>5.</b>	<b>Kecamatan Banjarbaru Selatan</b>	<b>21,96</b>	<b>5,91</b>
	Kelurahan Loktabat Selatan	8,58	
	Kelurahan Kemuning	3,61	
	Kelurahan Guntung Paikat	2,47	
	Kelurahan Sungai Besar	7,30	
	<b>Luas Keseluruhan</b>	<b>371,38</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Kota Banjarbaru, 2023

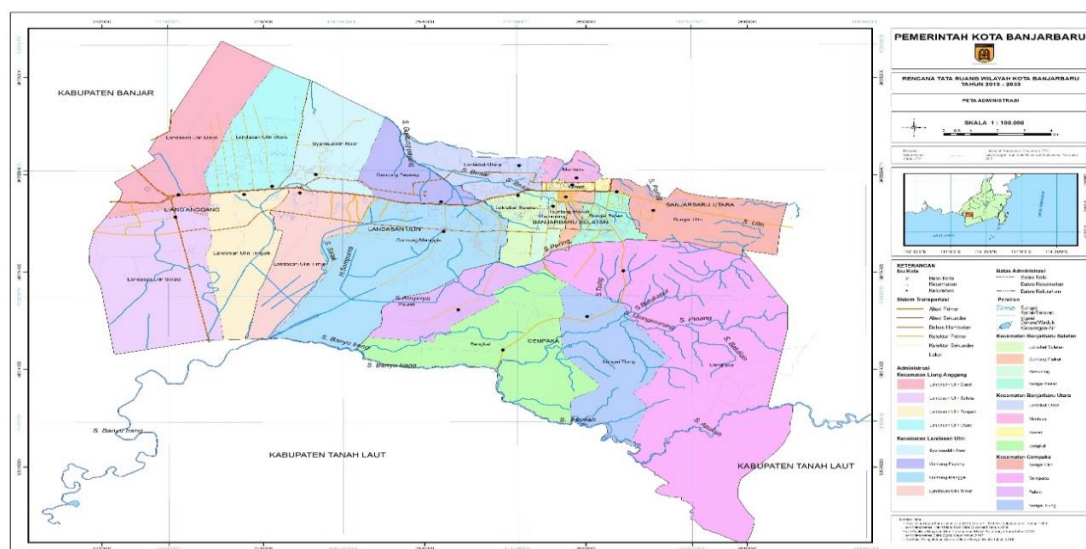
Dilihat dari posisi geografisnya, Kota Banjarbaru berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian regional, karena terletak pada pertemuan poros jalan utama di Kalimantan Selatan, yaitu:

1. Barat-Timur, pada posisi ini Kota Banjarbaru menjadi poros tengah yang menghubungkan antara Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan 6 kabupaten lainnya.
2. Utara-Selatan, menjadi penghubung Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.
3. Menjadi perlintasan jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Letak strategis ini menjadi keunggulan komparatif dengan adanya akses terhadap 2 (dua) moda transportasi lain selain darat yaitu akses ke Pelabuhan Laut Trisakti dan Bandar Udara Internasional Syamsuddin Noor.



**Gambar 1.1.**  
**Peta Kota Banjarbaru, 2022**



Sumber: BPS Kota Banjarbaru, 2023

Selain itu Kota Banjarbaru juga didukung dengan infrastruktur yang memadai sehingga menjadi daya tarik dan menjadi tujuan para migran untuk bermukim, berwirausaha maupun menanamkan modal di Kota Banjarbaru. Hal ini secara ekonomis sangat menguntungkan karena akan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dari segi jasa, perdagangan dan sektor lainnya. Selain itu Kota Banjarbaru juga identik sebagai Kota Pendidikan dimana terdapat berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta sehingga berakibat banyak pendatang berdomisili untuk menuntut ilmu.

Sejak tahun 2021 Kota Banjarbaru juga menjadi Ibu Kota dan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menempati kawasan seluas 500 Hektar dan telah terdapat aktivitas Sekretariat Daerah dan hampir seluruh SKPD provinsi juga mulai terpusat di Kota Banjarbaru. Hal ini dapat memicu pertumbuhan penduduk dan perekonomian Kota Banjarbaru.

Berdasarkan data Statistik Kota Banjarbaru Tahun 2022, jumlah penduduk Kota Banjarbaru berjumlah 258.753 jiwa yang terdiri dari 130.176

jiwa penduduk laki-laki dan 128.577 jiwa penduduk perempuan, yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Landasan Ulin dengan jumlah penduduk sebesar 77.982 jiwa dan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Cempaka dengan jumlah penduduk sebesar 36.271 jiwa.

Pertumbuhan jumlah penduduk Kota Banjarbaru, terutama dipengaruhi oleh arus migrasi masuk penduduk dari daerah sekitarnya maupun dari luar Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah penduduk Kota Banjarbaru di setiap kecamatan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut ini:

**Tabel 1.2.**  
**Jumlah Penduduk Kota Banjarbaru, 2022**

Kecamatan	Jumlah Penduduk
Landasan Ulin	77.982
Cempaka	45.309
Liang Anggang	36.271
Banjarbaru Utara	53.770
Banjarbaru Selatan	45.421
<b>Jumlah</b>	<b>258.753</b>

Sumber: BPS Kota Banjarbaru, 2023

Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Banjarbaru menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam membuat sebuah kebijakan agar pertumbuhan penduduk menjadi sebuah potensi bagi daerah. Pertumbuhan penduduk tersebut menjadi modal dasar dalam pembangunan, tetapi di sisi lain pertumbuhan penduduk yang tinggi juga harus diimbangi dengan penyediaan pelayanan dasar yang memadai.

Potensi pertumbuhan penduduk tersebut diharapkan dapat menjadi pendukung pelaksanaan program dalam pembangunan untuk mencapai visi dan misi Kota Banjarbaru. Besarnya jumlah penduduk Kota Banjarbaru merupakan potensi sumber daya manusia dalam penyediaan tenaga kerja.

Pemerintah berkewajiban meningkatkan kualitas tenaga kerja untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai sehingga dapat bersaing tinggi.

Selain berpotensi dalam tenaga kerja, jumlah penduduk juga berpengaruh pada meningkatnya hunian baru. Pemerintah Kota Banjarbaru konsisten dalam penerapan tata ruang dan didukung dengan kesadaran para pengembang perumahan dalam perizinan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dari kebijakan pembangunan yang telah diambil khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini memiliki arti penting bagi pemangku kebijakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diartikan sebagai peningkatan secara fisik terhadap produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Peningkatan ini dapat dilihat dari bertambahnya produksi barang industri dan barang modal, berkembangnya infrastruktur dan sektor jasa. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2021 kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru sebesar 3,32%, mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 yang mencapai 7,93%. Secara statistik pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3.**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru, 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>
2018	6,90
2019	6,80
2020	-1,83
2021	3,32
2022	7,93

Sumber: BPS Kota Banjarbaru, 2022

### 1.3 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah:

1. Kurangnya kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing
2. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan masyarakat yang belum merata
3. Belum terpenuhinya infrastruktur daerah yang berkualitas dan masih rendahnya kualitas lingkungan hidup.
4. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai permasalahan yang diidentifikasi dan dikaitkan dengan berbagai isu skala regional, nasional dan internasional, serta berbagai Permasalahan yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, ekonomi, sosial budaya, sarana prasarana, dan pemerintahan umum saat ini, serta kemungkinan kondisinya di masa datang, maka ditetapkan beberapa isu strategis terkait dengan pembangunan di Kota Banjarbaru sebagai berikut:

1. Belum tercapainya kualitas pendidikan masyarakat sesuai standar.
2. Belum tercapainya kualitas kesehatan masyarakat sesuai standar
3. Masih tingginya kasus stunting
4. Masih adanya kesenjangan gender
5. Menurunnya daya beli masyarakat dampak pandemi COVID-19.
6. Masih kurangnya kapasitas pemerintah daerah dalam penyelesaian dan pencegahan potensi konflik SARA guna menjaga kondusivitas wilayah.
7. Menurunnya pertumbuhan sektor pariwisata, UMKM dan IKM dampak pandemi COVID-19.

8. Menurunnya pendapatan asli daerah dan Investasi dampak pandemi COVID-19 penanaman modal.
9. Masih tingginya kemiskinan dan pengangguran.
10. Belum optimalnya ketersediaan pangan masyarakat.

#### 1.4 Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Prioritas pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2019 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta berpedoman pula kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prioritas pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021 mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yang kemudian diselaraskan dengan program dari SKPD serta berdasarkan isu strategis dan tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2021, maka prioritas pembangunan Kota Banjarbaru tahun 2021 diarahkan pada:

**Tabel 1.4.**  
**Prioritas Pembangunan Kota Banjarbaru, 2022**

Prioritas Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2022	Prioritas Pembangunan Tahunan (RKPD) Tahun 2022
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	1. Meningkatkan sarana prasarana Pendidikan sesuai standar 2. Menurunkan prevalensi stunting 3. Meningkatkan sarana prasarana kesehatan sesuai standar.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan	1. Mendorong perkembangan Usaha Ekonomi Mikro

Prioritas Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2022	Prioritas Pembangunan Tahunan (RKPD) Tahun 2022
Kesejahteraan Masyarakat	2. Mendorong perkembangan Ekonomi Kreatif dan Jasa Kepariwisata 3. Mendorong perkembangan Industri Pengolahan 4. Meningkatkan nilai investasi 5. Meningkatkan PAD 6. Menurunkan angka kemiskinan 7. Menurunkan angka pengangguran
3. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	1. Meningkatkan kualitas jalan dan drainase 2. Menurunkan kawasan rawan banjir 3. Meningkatkan Kualitas Permukiman dan Penataan Kawasan Kumuh 4. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang 5. Mendorong peningkatan pengolahan dan pengelolaan sampah bagi masyarakat 6. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan 7. Meningkatkan luasan minimal Ruang Terbuka Hijau Publik 8. Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Pasca Bencana
4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan capaian kinerja pemerintah daerah 2. Meningkatkan cakupan pelayanan publik berbasis Informasi Teknologi 3. Meningkatkan kompetensi ASN

Sumber: RPJMD Kota Banjarbaru, 2021-2026

Prioritas pembangunan Kota Banjarbaru tahun 2022 tersebut adalah merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru tahun 2021-2026.



## 1.5 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kota Banjarbaru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru, pada tanggal 20 April 1999. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas otonomi daerah, Pemerintah Kota Banjarbaru mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pemerintah Kota Banjarbaru sampai saat ini telah melakukan reorganisasi perangkat daerah dengan membentuk lembaga-lembaga pemerintahan dalam bentuk Sekretariat, Dinas, Badan, RSUD, Kecamatan dan Kelurahan serta unit kerja lainnya sesuai kebutuhan.

Kelembagaan Pemerintah Kota Banjarbaru terakhir dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru yang terdiri dari 2 (dua) Sekretariat, 1 (satu) Inspektorat, 7 (tujuh) Badan, 17 (tujuh belas) Dinas, 5 (lima) Kecamatan dan 20 (dua puluh) Kelurahan. Selengkapnya Perangkat Daerah Kota Banjarbaru sebagai berikut:

**Tabel 1.5.**  
**Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, 2022**

NO	SEKRETARIAT/ BADAN/ DINAS/ KECAMATAN/ KELURAHAN
1.	<b>SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARBARU</b>
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
1.1	Bagian Pemerintahan
1.2	Bagian Kesejahteraan Rakyat
1.3	Bagian Hukum
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
2.1	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

NO	SEKRETARIAT/ BADAN/ DINAS/ KECAMATAN/ KELURAHAN
	2.2 Bagian Administrasi Pembangunan
	2.3 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	3. Asisten Administrasi Umum
	3.1 Bagian Umum
	3.2 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	3.3 Bagian Organisasi
	4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
	5. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
	6. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
2.	<b>SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU</b>
	1. Bagian Umum
	2. Bagian Persidangan dan Risalah
	3. Bagian Perencanaan dan Keuangan
3.	<b>INSPEKTORAT</b>
4.	<b>BADAN DAERAH</b>
	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
	4. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	7. Satuan Polisi Pamong Praja
5.	<b>DINAS DAERAH</b>
	1. Dinas Pendidikan
	2. Dinas Kesehatan
	3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	4. Dinas Perumahan dan Permukiman
	5. Dinas Sosial
	6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
	7. Dinas Perhubungan
	8. Dinas Komunikasi dan Informatika
	9. Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
	10. Dinas Perdagangan
	11. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
	12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	13. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
	14. Dinas Lingkungan Hidup
	15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	SEKRETARIAT/ BADAN/ DINAS/ KECAMATAN/ KELURAHAN
	16. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
	17. Rumah Sakit Daerah
6.	<b>KECAMATAN</b>
	1. Kecamatan Banjarbaru Utara
	2. Kecamatan Banjarbaru Selatan
	3. Kecamatan Cempaka
	4. Kecamatan Landasan Ulin
	5. Kecamatan Liang Anggang
7.	<b>KELURAHAN</b>
	1. Kelurahan Loktabat Utara
	2. Kelurahan Sungai Ulin
	3. Kelurahan Komet
	4. Kelurahan Mentaos
	5. Kelurahan Loktabat Selatan
	6. Kelurahan Kemuning
	7. Kelurahan Guntung Paikat
	8. Kelurahan Sungai Besar
	9. Kelurahan Cempaka
	10. Kelurahan Sungai Tiung
	11. Kelurahan Bangkal
	12. Kelurahan Palam
	13. Kelurahan Landasan Ulin Barat
	14. Kelurahan Landasan Ulin Tengah
	15. Kelurahan Landasan Ulin Utara
	16. Kelurahan Landasan Ulin Selatan
	17. Kelurahan Landasan Ulin Timur
	18. Kelurahan Syamsuddin Noor
	19. Kelurahan Guntung Payung
	20. Kelurahan Guntung Manggis

Sumber: RPJMD Kota Banjarbaru, 2021-2026

# LAPORAN KINERJA 2022

---

## PERENCANAAN KINERJA

BAB II

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2021 – 2026 ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Dalam RPJMD disebutkan, Visi Pemerintah Kota Banjarbaru adalah:

**"BANJARBARU MAJU, AGAMIS DAN SEJAHTERA"**

Rumusan Visi RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan visi RPJPD Kota Banjarbaru 2005-2025, visi RPJMD provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026, dan visi RPJMN 2019-2024. Dalam upaya menjamin konsistensi, sinergitas antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan RPJMN dan RPJPD, penjelasan visi harus menggambarkan keterkaitannya dengan RPJPD dan RPJPN untuk RPJMD provinsi dan keterkaitannya dengan RPJPD provinsi untuk RPJMD Kota Banjarbaru. Keterkaitan visi Kota Banjarbaru dengan RPJPD Kota Banjarbaru 2005 - 2025 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMN dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Keterkaitan Visi RPJMD Kota Banjarbaru dengan RPJPD, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMN**

Visi RPJMN 2019-2024	Visi RPJMD Kalsel 2021-2026	Visi RPJPD Banjarbaru 2005-2025	Visi RPJMD Banjarbaru 2021-2026
Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.	-	Terwujudnya Banjarbaru sebagai kota empat dimensi yang mandiri dan terdepan.	Banjarbaru maju, agamis dan sejahtera (Banjarbaru Juara)

Sumber: RPJMD Kota Banjarbaru, 2021-2026

Visi pembangunan Kota Banjarbaru dirumuskan berdasarkan kerangka logis pencapaian. Setidaknya terdapat tiga pilar untuk mencapai visi Banjarbaru Juara, yaitu: (1) Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing berlandaskan nilai agama dan budaya, (2) Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Inklusif; dan (3) Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah.

Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan factor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Terdapat tiga misi pembangunan dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Banjarbaru tahun 2021-2026, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia.
2. Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah.

## **2.2. Prioritas Pembangunan**

Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan sehingga terlihat upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembangunan yang ada. Prioritas pembangunan Kota Banjarbaru dirumuskan berdasarkan permasalahan dan isu strategis serta juga memperhatikan prioritas nasional dan provisi agar tetap terjaga sinkronisasinya.

Prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan yang tertuang dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang lebih fokus pada Pelayanan Publik
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana.

Mengacu pada prioritas nasional dan prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Selatan, maka di tetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan daerah agar pembangunan Kota Banjarbaru dalam 5 (lima) tahun kedepan dapat lebih terarah dan fokus, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat
3. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan
4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Prioritas pembangunan daerah Kota Banjarbaru tersebut selanjutnya akan difokuskan pada prioritas tahun rencana yang berisi program-program SKPD yang paling tinggi daya dukungnya untuk mengatasi permasalahan yang ada atau untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya dari fokus prioritas pembangunan pada tahun rencana tersebut, ditetapkan tema pembangunan yang menjadi benang merah menuju sasaran pembangunan.



### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam RPJMD 2021 – 2026, maka target – target kinerja tahunan yang tercantum dalam RPJMD dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

**Tabel 2.2.**  
**Perjanjian Kinerja Wali Kota Banjarbaru, 2022**

No	Misi	No	Sasaran Strategis	IKU	Target
I	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia	1.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	10,97
		2.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	72,20
				Angka prevalensi stunting	16,50
		3.	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks pembangunan gender	92,65
		4.	Terjaganya daya beli masyarakat	Angka Inflasi	< 3
		5.	Meningkatnya toleransi beragama, keamanan, kenyamanan, kesadaran hukum dan ketertiban masyarakat	Persentase pembinaan keagamaan, penyelesaian potensi konflik, SARA dan Pelanggaran Perda	100
				Persentase penyelesaian kebencanaan	100
II	Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	6.	Meningkatnya kegiatan perekonomian kota	Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	2,50
				Pertumbuhan pelaku usaha mikro, industri kecil dan ekonomi kreatif	4,50
		7.	Meningkatnya PAD dan Nilai Investasi Daerah	Peningkatan PAD (Milyar)	251,1 Milyar
				Persentase Peningkatan Investasi	4

No	Misi	No	Sasaran Strategis	IKU	Target
		8.	Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran	Angka Kemiskinan	4,50
				Angka Pengangguran	5,39
		9.	Meningkatnya stabilitas pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk ketersediaan pangan	80,21
		10.	Meningkatnya infrastruktur kota yang berkualitas	Indeks infrastruktur wilayah	74,28
		11.	Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	62,17
III	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah	12.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	B
				Nilai LPPD	Sangat Tinggi
				Opini BPK	WTP
				Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)	Level 3 (3,01)
				Indeks Profesionalitas ASN	72
		13.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah dan Indeks Kepatuhan	Baik (90,00)
		14.	Meningkatnya kualitas layanan informasi publik pemerintah daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,62

Sumber: Data Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, 2022

Perjanjian Kinerja Wali Kota Banjarbaru Tahun 2022 dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2022.

## 2.4. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022, yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) program sebagai berikut:

**Tabel 2.3.**  
**Rencana Kerja dan Anggaran, 2022**

No	Program	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 59.904.296.850
2.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 15.772.740.000
3.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 25.044.399.792
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 369.118.000
5.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 540.200.000
6.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 224.000.000
7.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 135.000.000
8.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 85.200.000
9.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 559.054.500
10.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 115.000.000
11.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 580.000.000
12.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 1.583.998.250
13.	Program Penanganan Bencana	Rp. 173.428.000
14.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 2.104.211.000
15.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 489.085.500
16.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 102.400.000
17.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 616.154.000
18.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 179.552.000
19.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 841.510.000

No	Program	Anggaran
20.	Program Pengembangan UMKM	Rp. 709.600.000
21.	Program Pengendalian Pelaksanaan dan Penanaman Modal	Rp. 369.695.000
22.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 1.098.959.950
23.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 4.140.012.250
24.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 556.883.000
25.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 154.400.000
26.	Program Hubungan Industrial	Rp. 189.699.500
27.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 272.987.250
28.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 1.183.396.750
29.	Program Kawasan Permukiman	Rp. 3.998.557.150
30.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 15.075.900.000
31.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 25.653.125.500
32.	Program Pengembangan Permukiman	Rp. 23.465.682.000
33.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 5.007.521.000
34.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 46.238.371.100
35.	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 900.446.000
36.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 1.582.427.500
37.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Rp. 50.000.000
38.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 19.545.570.850
39.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 23.977.864.790
40.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 5.054.561.250
41.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 2.319.164.750
42.	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 6.008.606.750
43.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 350.000.000
44.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 8.873.946.250
45.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 2.799.086.000
46.	Program Aplikasi Informatika	Rp. 3.558.077.300
47.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 516.958.878.09
		3

Sumber: RKPD Kota Banjarbaru 2022

**LAPORAN KINERJA**  
**2022**

---

**AKUNTABILITAS KINERJA**

**BAB III**

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022

Sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Laporan Kinerja Tahun 2022 ini akan memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran strategis dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan. Sesuai ketentuan, pengukuran penilaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Banjarbaru.

Pencapaian Sasaran Strategis diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja dan selanjutnya diberi pemeringkatan berdasarkan katagori capaian kinerja.

Adapun untuk pemeringkatan berdasarkan kategori capaian kinerja digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Kategori Capaian Kinerja**

Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
Lebih dari 75 % s.d. 100 %	Baik (B)
55 % s.d. 75 %	Cukup (C)
Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Sumber: Data Bagian Organisasi Setda Kota Banjarbaru

Secara umum Pemerintah Kota Banjarbaru telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka merealisasi target sasaran strategis yang telah ditetapkan, yang terdiri dari 3 (tiga) Misi, 3 (tiga) Tujuan dan 14 (empat belas) sasaran, dengan 23 (dua puluh tiga) indikator sasaran:

1. Misi I terdiri dari 1 tujuan, 5 sasaran strategis dan 7 indikator kinerja;

2. Misi II terdiri dari 1 tujuan, 6 sasaran strategis dan 9 indikator kinerja;
3. Misi III terdiri dari 1 tujuan, 3 sasaran strategis dan 7 indikator kinerja.

Dari 14 (empat belas) sasaran, dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja, pencapaian indikator kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru adalah:

**Tabel 3.2.**  
**Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru, 2022**

No.	Kategori	Jumlah Indikator Kinerja	Persentase
<b>Misi 1 (7 Indikator Sasaran)</b>			
1	Baik Sekali (BS)	3	42,86%
2	Baik (B)	3	42,86%
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	1	14,28%
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>100%</b>
<b>Misi 2 (9 Indikator Sasaran)</b>			
1	Baik Sekali (BS)	7	77,78%
2	Baik (B)	2	22,22%
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>100%</b>
<b>Misi 3 (7 Indikator Sasaran)</b>			
1	Baik Sekali (BS)	2	28,57%
2	Baik (B)	4	57,14%
3	Cukup (C)	1	14,29%
4	Kurang (K)	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Bagian Organisasi Setda Kota Banjarbaru

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 14 sasaran strategis yang mencakup 23 indikator kinerja, diketahui bahwa 12 indikator kinerja atau 52,18% kategori capaian kinerja Baik Sekali, 9 indikator kinerja atau 39,13% kategori capaian kinerja Baik, 1 indikator kinerja atau 4,35% kategori capaian kinerja Cukup dan 1 indikator kinerja atau 4,35% kategori capaian kinerja Kurang.

### 3.2. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022

Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator kinerja. Capaian kinerja 14 (empat belas) sasaran strategis dan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja disajikan dalam analisis sebagai berikut:

**Tabel 3.3.**  
**Realisasi Capaian IKU Pemerintah Kota Banjarbaru, 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
<b>Misi 1: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia</b>					
1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1. Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	10,97	10,98	100,09
2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	2. Angka harapan hidup	Tahun	72,20	72,36	100,22
	3. Angka prevalensi stunting	Angka	16,50	13,61	117,5
3. Meningkatnya kesetaraan gender	4. Indeks pembangunan gender	Indeks	92,65	92,56	99,90
4. Terjaganya daya beli masyarakat	5. Angka Inflasi	%	< 3	6,98	- 130,45
5. Meningkatnya toleransi beragama, keamanan, kenyamanan, kesadaran hukum dan ketertiban masyarakat	6. Persentase pembinaan, keagamaan, penyelesaian potensi konflik SARA dan pelanggaran Perda	%	100	100	100
	7. Persentase penyelesaian kebencanaan	%	100	100	100
<b>Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup</b>					



Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
6.	Meningkatnya kegiatan perekonomian kota	8. Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	2,50	49	1.960
		9. Pertumbuhan pelaku usaha mikro, industri kecil dan ekonomi kreatif	%	4,50	4,65	103,33
7.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Nilai Investasi Daerah	10. Peningkatan PAD (Milyar)	Rp.	251,1	293,7	116,97
		11. Persentase investasi daerah	%	4	340,14	8.503,5
8.	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	12. Angka kemiskinan	%	4,50	4,17	107,33
		13. Angka pengangguran	%	5,39	5,47	98,51
9.	Meningkatnya stabilitas ketersediaan pangan	14. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk ketersediaan pangan	Skor	80,21	84,76	105,67
10.	Meningkatnya infrastruktur kota yang berkualitas	15. Indeks infrastruktur wilayah	%	74,28	76,51	103
11.	Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	16. Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	62,17	61,83	99,45
<b>Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah</b>						
12.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan sistem pengendalian internal pemerintah daerah	17. Nilai SAKIP	Nilai	B (65,01)	B (66,74)	102,66
		18. Nilai LPPD	Nilai	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100
		19. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100
		20. Indeks Penerapan Manajemen Resiko	Indeks	Level 3 (3,01)	Level 2 (2,95)	98,33
		21. Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	72	54,68	75,94

Sasaran Strategis			Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
13.	Meningkatnya kualitas pelayanan public	22.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pemerintah daerah dan indeks kepatuhan	Indeks Nilai	Baik 90,00	Baik 100	111,11
14.	Meningkatnya kualitas layanan informasi publik pemerintah daerah	23.	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,62	2,26	86,25

Sumber: Data Bagian Organisasi Setda Kota Banjarbaru, 2022

## **MISI 1 :**

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia

## **SASARAN STRATEGIS 1 :**

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

## **INDIKATOR KINERJA 1 :**

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat adalah dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi semua orang, meningkatkan peluang akses ke pendidikan yang berkualitas, meningkatkan ketersediaan sumber daya Pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya, memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengejar pendidikan yang tinggi, dan menyediakan lebih banyak program pendidikan yang berkualitas tinggi.

Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat Kota Banjarbaru pada usia tertentu di periode RPJMD tahun 2021-2026.

Salah satu indikator untuk mengukur kualitas Pendidikan masyarakat adalah angka rata-rata lama sekolah. Indikator angka rata-rata lama sekolah digunakan untuk memberikan informasi kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 25 tahun ke atas dimana diasumsikan seseorang yang telah berumur 25 tahun, proses pendidikannya telah berakhir. Pada kondisi normal rata-rata lama sekolah di suatu wilayah diasumsikan tidak akan turun. Batas nilainya adalah minimum 0 dan maksimum 15 tahun.

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dengan indikator angka rata-rata lama sekolah adalah:

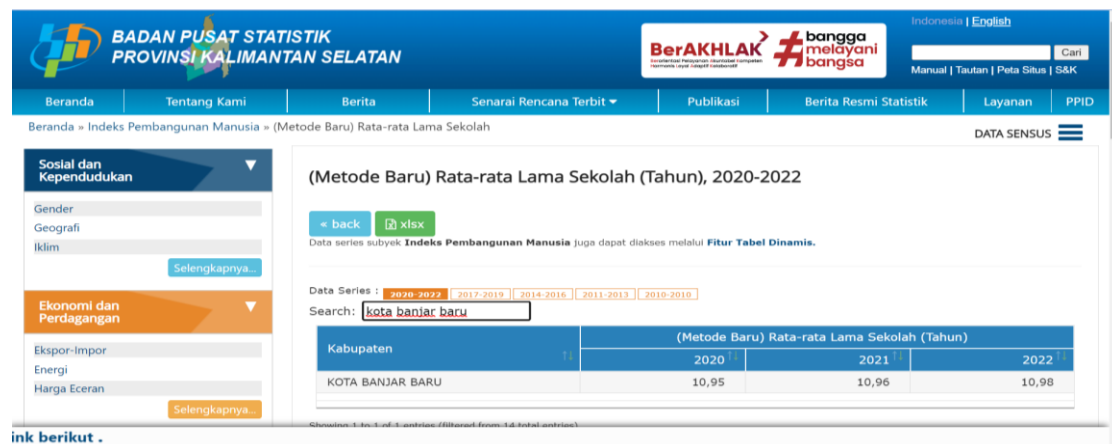
**Tabel 3.4.**  
**Realisasi Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah, 2022**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	10,97	10,98	100,09%

Sumber: Data BPS Kota Banjarbaru

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa realisasi IKU rata-rata lama sekolah telah melampaui target, dimana target kinerja sebesar **10,97** dan terealisasi **10,98** sehingga capaian kinerjanya sebesar **100,09%** dengan kategori capaian kinerja **“Baik Sekali”**.

**Gambar 3.1.**  
**Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun), 2020-2022**



Sumber: BPS Kota Banjarbaru

## **Program Pendukung Indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah**

### **a. Program Pengelolaan Pendidikan**

Program pengelolaan pendidikan adalah sebuah program yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan Pendidikan dari jenjang PAUD, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Kesetaraan (UU No. 23 tahun 2014, Kewenangan Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Pendidikan, dari jenjang Pengelolaan pendidikan usia dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal). Indikator keberhasilan pengelolaan Pendidikan adalah persentase satuan Pendidikan yang terakreditasi A.

Dalam sistem pendidikan di Indonesia, akreditasi sekolah merupakan proses yang digunakan untuk mengukur dan menilai kualitas pendidikan yang diberikan oleh sebuah sekolah atau lembaga pendidikan. Proses akreditasi diadakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan (BAN-PT) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di bawah BAN-PT, ada berbagai lembaga akreditasi yang dapat ditunjuk untuk mengaudit sekolah atau lembaga pendidikan dan memberikan sertifikat akreditasi untuk sekolah atau lembaga pendidikan yang memenuhi syarat yang ditetapkan. Akreditasi ini akan menunjukkan bahwa sekolah atau lembaga pendidikan

telah memenuhi standar kualitas dan telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas.

**Tabel 3.5.**  
**Indikator Keberhasilan Pengelolaan Pendidikan, 2021-2022**

No.	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang terakreditasi A	68,80	62,91

Sumber: Data Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru

Pada tahun 2022 terjadi penurunan persentase Pendidikan sekolah dasar yang terakreditasi A, dikarenakan score penilaian akreditasi A yang dulu cakupan nilai 85-100 menjadi 90-100, sehingga ada 8 sekolah dasar yang memiliki nilai 86-89 yang dulu terakreditasi A, turun menjadi B.

#### **b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kompetensi guru, melalui berbagai kegiatan pelatihan, serta memfasilitasi pengembangan kurikulum. Program ini juga berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dengan meningkatkan kemampuan profesional guru dan tenaga pendidikan. Indikator keberhasilan peningkatan kemampuan profesional guru dan tenaga Pendidikan diukur dengan persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang bersertifikasi.

**Tabel 3.6.**  
**Indikator Keberhasilan Peningkatan Kemampuan Professional Guru dan Tenaga Pendidikan**

No.	Indikator	2021	2022
1.	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang bersertifikasi	42,84%	44,24%

Sumber: Data Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

**Tabel 3.7.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah**  
**2 Tahun Terakhir**

No	Indikator Sasaran	2020	2021	2022
		Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian
1.	Angka rata-rata lama sekolah	10,95 101,38%	10,96 100%	10,98 100,09%

Sumber: Data BPS Kota Banjarbaru

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya (2 tahun terakhir), yaitu 2020 dan 2021 bahwa tahun 2020 sebesar 10,95 dan tahun 2021 adalah 10,96 serta tahun 2022 adalah 10,98 sehingga terlihat kenaikan sebesar 0,13. Ini menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk Banjarbaru semakin tahun semakin baik.

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

**Tabel 3.8.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah**  
**dengan Kab/Kota/Provinsi**

No.	Indikator Kinerja	Kota Banjarbaru	Kab. Banjar	Kab. Tanah Laut	Kota Banjarmasin	Prov. Kal-Sel
1.	Angka rata-rata lama sekolah	10,98	7,71	7,90	10,21	8,46

Sumber: Data BPS Kota Banjarbaru

Angka rata-rata lama sekolah Kota Banjarbaru dibandingkan dengan kabupaten/ kota/ provinsi sekitar, terlihat Kota Banjarbaru sebesar 10,98 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar dan Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru berada pada posisi paling tinggi.

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD dan Target Nasional

**Tabel 3.9.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah**  
**dengan Target RPJMD dan Target Nasional**

No.	Indikator Kinerja	Pemko Banjarbaru Tahun 2022	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional 2024
1.	Angka rata-rata lama sekolah	10,98	11,01	9,18

Sumber: Data BPS Kota Banjarbaru

Tahun 2022, realisasi kinerja indikator “Rata-rata Lama Sekolah” adalah 10,98 tahun dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 adalah 11,01 baru mencapai target 10,98%, masih ada rentan 0,03% untuk mencapai akhir periode RPJMD tahun 2026, sedangkan dibanding target RPJMN tahun 2024 adalah 9,18 Kota Banjarbaru telah melampaui target yaitu 10,98.

#### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

##### **Hambatan:**

- Masih terdapat permasalahan pada data pokok pendidikan;
- Ketersediaan sekolah yang belum merata.

##### **Rencana Tindak Lanjut:**

- Melaksanakan penyempurnaan pada data pokok pendidikan;
- Melakukan pemetaan dan pembangunan sekolah sesuai kebutuhan yang terlihat pada pemetaan serta melaksanakan revitalisasi bangunan sekolah yang ada sehingga memadai dengan jumlah anak sekolah.

## 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.10.**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Angka Rata-Rata**  
**Lama Sekolah, 2022**

No.	Program	Indikator	% Capaian Kinerja 2022	% Realisasi Anggaran 2022	Tingkat Efisiensi
1.	Program pengelolaan pendidikan	Persentase satuan Pendidikan dasar yang terakreditasi	91,43	88,85	2,58
2.	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase pendidik yang bersertifikasi	103,27	96,71	6,56

Sumber: Data Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru

## B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022 Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru melaksanakan program pengelolaan Pendidikan dengan dana yang disediakan sebesar Rp. 59.339.619.250 dan program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp. 19.345.029.000, sehingga total keseluruhan dana yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru adalah Rp. 78.684.648.250 (tidak termasuk program penunjang). Dengan rincian realisasi sebagai berikut:

**Tabel 3.11.**  
**Realisasi Anggaran Program Pendukung Angka**  
**Rata-Rata Lama Sekolah, 2022**

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	%
1.	Pengelolaan Pendidikan	59.339.619.250	52.725.594.788	88,85
	Pengelolaan Pendidikan dasar	36.435.840.221	30.429.208.177	83,51
	Pengelolaan Pendidikan sekolah menengah pertama	13.469.078.529	13.036.551.429	96,79
	Pengelolaan Pendidikan anak usia dini (Paud)	6.204.794.500	6.155.761.242	99,21
	Pengelolaan Pendidikan	3.229.906.000	3.104.074.000	99,10



	Nonformal/kesetaraan			
2.	Pendidik dan tenaga kependidikan	19.345.029.000	18.707.890.610	96,71
	Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Pendidikan dasar, Paud, dan Pendidikan Nonformal/kesetaraan	19.345.029.000	18.707.890.610	96,71

Sumber: Data Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru

#### **MISI 1 :**

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia

#### **SASARAN STRATEGIS 2 :**

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

#### **INDIKATOR KINERJA 2 :**

Angka Harapan Hidup

---

Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan untuk itu Meningkatkan Kualitas kesehatan masyarakat dipilih sebagai sasaran strategis pembangunan kesehatan di Kota Banjarbaru karena kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam Peningkatan indeks pembangunan manusia Kota Banjarbaru. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” merupakan sasaran yang mendukung Misi ke satu sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Kualitas Kehidupan

---

Masyarakat Yang Sejahtera dan Berahlak Mulia". Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator sasaran, meningkatnya Angka Harapan Hidup.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah disuatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan pembangunan sosial lainnya. Angka Harapan Hidup juga merupakan salah satu indikator derajat kesehatan suatu daerah disebut demikian karena angka harapan hidup menunjukkan mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Angka Harapan Hidup mempunyai makna perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur  $x$  pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat. Penilaian terhadap indikator kinerja Angka Harapan Hidup diperhitungkan dengan berdasarkan angka kematian menurut umur (Age Spesifik Death rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuatkan tabel kematian.

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Realisasi Angka Harapan Hidup pada tahun 2022 ini berdasarkan data Badan pusat Statistik Kota Banjarbaru adalah mencapai 72,36 Tahun, dengan realisasi ini maka capaian kinerja nya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.12.**  
**Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup, 2022**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka Harapan Hidup	tahun	72,20	72,36	100,22%

Sumber: Data BPS Kota Banjarbaru

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Angka Harapan Hidup di Kota Banjarbaru mencapai **72,36** tahun dari target **72,20** tahun dengan capaian kinerja sebesar **100,22%** atau dengan kategori **“Sangat Baik”**.

**Gambar 3.2.**  
**Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun), 2020-2022**

The screenshot shows the website of the Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. The main content area displays the title '(Metode Baru) Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun), 2020-2022'. Below the title, there are navigation buttons for 'back' and 'xlsx'. A search bar contains 'kota banjar baru'. The data series selected is '2020-2022'. The table below shows the following data:

Kabupaten	(Metode Baru) Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)		
	2020	2021	2022
KOTA BANJAR BARU	71,99	72,10	72,36

Showing 1 to 1 of 1 entries (filtered from 14 total entries).

Sumber: BPS Kota Banjarbaru

Beberapa Program yang dilaksanakan dalam rangka mencapai IKU Angka Harapan Hidup sesuai target yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Banjarbaru yaitu:

**a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Program ini dalam mendukung pencapaian indikator angka harapan hidup memiliki 2 (dua) sasaran program yaitu sasaran Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan sasaran peningkatan Derajat Keseha`tan Masyarakat. Pada sasaran Meningkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat indikator kinerja yang diukur yaitu: Persentase sarana prasarana Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dalam keadaan baik. Hasil pencapaian indikator nya sebagai berikut:

**Tabel 3.13.**  
**Realisasi Capaian Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan**  
**Upaya Kesehatan Masyarakat di Kota Banjarbaru, 2021-2022**

No	Sasaran	Indikator	Capaian Program					
			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Pemenuhan UKP UKM	Persentase sarana prasarana UKP UKM dalam keadaan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan Derajat Kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB)	4,1	4.7	85.40%	3,4	7	-5,88%
		Angka Kematian Ibu (AKI)	109/ 100.000 KH	268 /100.000 KH	- 45,87 %	90/ 100.000 KH	108/ 100.000 KH	80%
		Angka Kesakitan	27%	12%	158,6%	25%	24%	111,4%

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

Berdasarkan tabel diatas menunjukan realisasi capaian indikator kinerja persentase sarana prasarana UKP UKM di Kota Banjarbaru dalam keadaan baik dapat terealisasi 100%. Indikator ini menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% atau dengan kategori capaian kinerja **“Baik”**.

Realisasi persentase sarana prasarana UKP UKM dalam keadaan baik dilihat sejak tahun 2021 telah dapat di capai dengan baik. Pelaksanaan dan pemenuhan sarana dan prasarana UKP dan UKM mencapai target yang ditetapkan.

Pada sasaran ke dua program ini yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat ini indikator kinerja yang diukur yaitu:

- a. Angka Kematian Ibu
- b. Angka Kematian Bayi
- c. Angka Kesakitan

Adapun capaian kinerja indikator tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Indikator Angka Kematian Ibu (AKI)**

Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain.

Informasi mengenai tingginya AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (*making pregnancy safer*), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Pencapaian indikator menurunnya angka kematian ibu (AKI) sebagai mana disajikan pada Tabel 1 untuk tahun 2022 adalah 108 per 100.000 kelahiran hidup, dibanding dengan angka kematian ibu di tahun 2021 jauh menurun dan lebih baik.

Berdasarkan data laporan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru diketahui jumlah kematian ibu di Kota Banjarbaru pada tahun 2022 sebanyak 5 orang ibu, dengan rincian 2 orang kematian ibu hamil, 2 orang kematian ibu bersalin dan 1 orang kematian ibu nifas. Berdasarkan penyebab kematian ibu tertinggi sekitar 40

% (2 orang) adalah akibat Hipertensi sisanya adalah penyebab lainnya pada kehamilan dan persalinan, dapat dilihat pada tabel 3.13.

Jumlah kelahiran hidup tahun 2022 terdata sebanyak 4611 orang sehingga dengan jumlah kematian ibu sebanyak 5 orang maka angka kematian ibu pada tahun 2022 ini menjadi 108/ 100.000 kelahiran hidup.

Capaian kinerja pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu mencapai 80% atau angka kematian semakin menurun dari 268/100.000 KH pada tahun 2021 menjadi 108/100.000 KH. Meskipun penurunan angka kematian ibu ini belum mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2022 yaitu 90/100.000 kelahiran hidup. Secara absolut jumlah kematian ibu pada tahun 2021 yaitu sebanyak 12 orang dan tahun 2022 menurun menjadi 5 orang.

**Tabel 3.14.**  
**Distribusi Penyebab Kematian Menurut Kecamatan**  
**di Kota Banjarbaru, 2022**

No.	Kecamatan	Penyebab Kematian				Jumlah Kematian Ibu
		Hipertensi Dalam Kehamilan	Jantung	Asma	Gangguan Kehamilan Ektopik Terganggu	
1.	Cempaka			1		1
2.	Banjarbaru Selatan					0
3.	Banjarbaru Utara					0
4.	Landasan Ulin	1	1			2
5	Liang Anggang	1			1	2
	Total	2	1	1	1	5

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

#### **b. Indikator Angka Kematian Bayi (AKB)**

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB.

Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang Kesehatan.

AKB cenderung lebih menggambarkan kesehatan reproduksi, AKB relevan dipakai untuk memonitor pencapaian target program karena mewakili komponen penting pada kematian balita. AKB terutama terjadi pada umur 0-28 hari, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ibu pada saat hamil, bersalin dan perawatan bayi baru lahir. Perhitungan indikator ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AKB = \frac{\text{Jumlah Kematian bayi}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 1000$$

Penurunan angka kematian bayi (AKB)/1.000 Kelahiran Hidup diperhitungkan dengan jumlah bayi meninggal saat proses kelahiran sampai dengan 11 bulan dibagi kelahiran hidup dalam 1 tahun  $\times 1.000$  kelahiran hidup. Pada tahun 2022 indikator sasaran angka kematian bayi (AKB) ditargetkan sebesar 3,4/1000 kelahiran hidup.

Capaian kinerja pada tahun 2022 seperti pada tabel 1 jauh menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu mencapai -5,88% atau angka kematian meningkat yaitu sebanyak 7 kematian tiap 1000 kelahiran hidup sedangkan target yang ditetapkan untuk tahun 2022 menurunkan angka kematian hingga 3,4/1000 kelahiran hidup. Secara absolut jumlah kematian bayi pada tahun 2022 adalah 32 orang meningkat dari tahun 2021 yaitu sebanyak 21 orang.

Dari data yang diperoleh dari laporan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru jumlah kematian bayi terbanyak di wilayah Kecamatan Banjarbaru Utara yaitu sebanyak 9 orang atau 28,1% dari jumlah kematian dan terendah di Kecamatan Banjarbaru Selatan sebesar 6,2 % atau 2 orang. Distribusi jumlah kematian menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

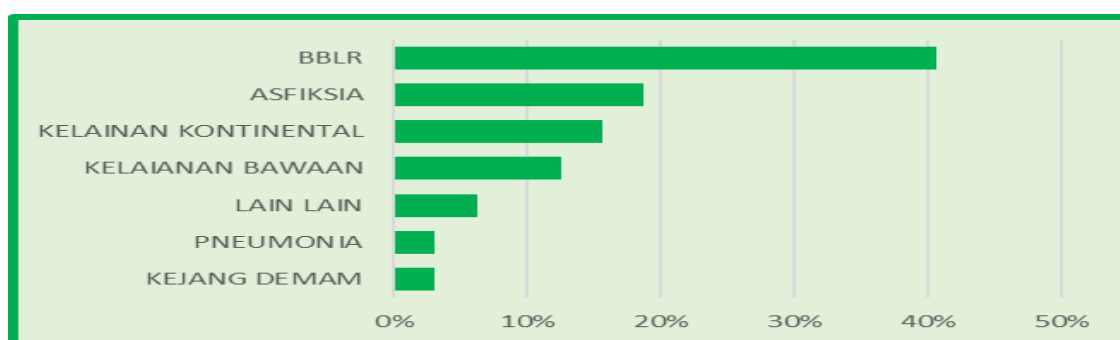
**Tabel 3.15.**  
**Distribusi Kematian Bayi Menurut Kecamatan**  
**di Kota Banjarbaru, 2022**

No.	Kecamatan	Kelahiran Hidup (Kh)	Jumlah Kematian Bayi
1.	Cempaka	548	8
2.	Banjarbaru Selatan	844	2
3.	Banjarbaru Utara	1.048	9
4.	Landasan Ulin	1.355	8
5.	Liang anggang	816	5
Total		4.611	32
Angka Kematian/1000 KH		7	

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

Dari jumlah 32 kematian bayi, 40,62% disebabkan oleh BBLR dan Prematuritas sebagai penyebab terbanyak, hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

**Gambar 3.3.**  
**Penyebab Kematian Bayi di Kota Banjarbaru Tahun 2022**



Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

Dilihat dari angka kematian dari tahun 2021 sampai dengan 2022 ini mengindikasikan angka kematian bayi meningkat. Secara absolut juga jumlah kematian di tahun 2022 lebih banyak yaitu 32 orang sedang tahun 2021 sebanyak 21 orang. Untuk itu strategi dan usaha dalam upaya penurunan angka kematian bayi di kota Banjarbaru harus terus ditingkatkan melalui beberapa kegiatan peningkatan upaya kesehatan secara menyeluruh.



### c. Indikator Angka Kesakitan

Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Indikator ini dipilih untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan. Adapun cara perhitungan dengan menghitung jumlah penduduk dengan keluhan Kesehatan dibagi jumlah penduduk di kali 100%.

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk dg keluhan Kesehatan (kunjungan Pasien)}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

Bahwa pencapaian Kinerja indikator penurunan angka kesakitan di Kota Banjarbaru dapat dikategorikan "**Sangat Baik**", hal ini dapat dilihat capaian tahun 2022 sebesar 111,4% dengan angka kesakitan sebesar 24%. Penurunan angka kesakitan tahun ini dapat melebihi dari angka kesakitan yang ditargetkan yaitu 27%.

Angka kesakitan 2021 sampai dengan 2022 ini mengindikasikan peningkatan angka kesakitan. Namun untuk capaian kinerja nya masih sangat baik. Hal ini dikarenakan kunjungan masyarakat ke Puskesmas dan rumah sakit telah kembali normal selama masa pandemi Covid-19.

## b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini memiliki sasaran program yaitu sasaran Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. Pada sasaran Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan indikator kinerja yang diukur Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan, hasil pencapaian indikator nya sebagai berikut:

**Tabel 3.16.**  
**Realisasi Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kota Banjarbaru, 2021-2022**

No	Sasaran	Indikator	Capaian Program					
			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	90%	100%	110%	100%	100%	100%

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

Dilihat dari tabel diatas, sejak tahun 2021 indikator persentase puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan telah terpenuhi yaitu sebesar 110%. Dan realisasi capaian kinerja di tahun 2022 ini capaian kinerja mencapai 100 %, dari segi persentase sepertinya terjadinya penurunan namun dari segi jumlah absolut sebenarnya adalah tetap yaitu 10 puskesmas. Perbedaan persentase ini hanya dikarenakan perbedaan target insikator, pada tahun 2021 ditargetkan 9 Puskesmas dari 10 puskesmas, sedangkan di tahun 2020 ditargetkan 10 Puskesmas dari 10 puskesmas.

Berdasarkan tabel diatas menunjukan realisasi capaian indikator kinerja persentase sarana prasarana UKP UKM di Kota Banjarbaru di Kota Banjarbaru dalam keadaan baik dapat terealisasi 100%. Indikator ini menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% atau dengan kategori capaian kinerja **“Baik”**.

### c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini memiliki sasaran program yaitu sasaran Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat kesehatan Dan Makanan Minuman Sesuai Standar, pada sasaran ini indikator kinerja yang diukur yaitu: Persentase Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar. Makna indikator ini menunjukkan Tingkat Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM telah memenuhi standar Kesehatan. Tercapainya indikator ini memberikan jaminan keamanan kesehatan bagi penduduk yang menggunakan produk yang dihasilkan. Perhitungan indikator ini dihitung berdasarkan:

$$\frac{\text{Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar kesehatan}}{\text{Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang Terdaftar}} \times 100\%$$

Capaian Indikator pada program ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.17.**  
**Realisasi Capaian Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman di Kota Banjarbaru, 2021-2022**

No	Sasaran	Indikator	Capaian Program					
			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat kesehatan Dan Makanan Minuman Sesuai Standar	Persentase Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar	98%	98%	100%	99	99,37%	100,4%

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase penyelenggara kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU dan TPM yang memenuhi standar di Kota Banjarbaru telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100,4 % dari target yang ditetapkan 99%. Dengan pencapaian kinerja sebesar 99,9% atau dengan kategori **“Sangat Baik”**. Indikator kinerja kefarmasian, alat kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar di Kota Banjarbaru yang telah mendukung tercapainya capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.18.**  
**Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang Memenuhi Standar**  
**di Kota Banjarbaru, 2022**

No.	Indikator Kinerja	Yang Terdaftar	Yang memenuhi Standar Kesehatan	% Yang Memenuhi Standar Kesehatan
1.	Penyelenggaraan Kefarmasian	151	151	100%
2.	Penyelenggara Alat Kesehatan	4	4	100%
3.	Penyelenggara TFU	1230	1223	99.4%
4.	Penyelenggara TPM	1392	1371	98,5%

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

Penyelenggara kefarmasian dan alat kesehatan yang mendapatkan izin penyelenggaraannya di Kota Banjarbaru apabila telah mendapatkan rekomendasi kesesuaian standar kesehatan untuk penyelenggaraan, selanjutnya dilakukan pengawasan berkala sehingga standar kesehatan yang dipersyaratkan tetap terpenuhi. Demikian juga pada Tempat Fasilitas Umum (TFU) dan tempat pengelolaan makanan (TPM) pembinaan dan pengawasan dilaksanakan berkala dan syarat memenuhi standar kesehatan sebagai syarat untuk mendapatkan layak sehat.

#### **d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan ini memiliki sasaran program yaitu sasaran Peningkatan Organisasi kemasyarakatan/Lintas Sektor dan UKBM yang mendukung kesehatan, pada sasaran ini indikator kinerja yang diukur yaitu: Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan.

Indikator ini di tetapkan dengan harapan penerbitan kebijakan dapat memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan pada setiap kebijakan yang diterbitkan. Dengan pencapaian indikator ini mempunyai makna setiap penerbitan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak selalu memperhatikan aspek Kesehatan

Indikator ini dapat dihitung berdasarkan:

$$\frac{\text{Jumlah Kebijakan berwawasan kesehatan yang di implementasikan}}{\text{Jumlah kebijakan berwawasan kesehatan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Adapun capaian kinerja indikator tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.19.**  
**Realisasi Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kota Banjarbaru, 2021-2022**

No	Sasaran	Indikator	Capaian Program					
			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Organisasi kemasyarakatan/Lintas Sektor dan UKBM yang mendukung kesehatan	Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

Pencapaian persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan di Kota Banjarbaru, dibanding tahun sebelumnya adalah sama, yaitu 100%.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

**Tabel 3.20.**  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup 2 Tahun Terakhir**

No.	Indikator Kinerja	2020	2021	2022
		Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian
1.	Angka Harapan Hidup	71,99 100%	72,10 100%	72,36 100,22%

Sumber: Data BPS Kota Banjarbaru

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

**Tabel 3.21.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup**  
**dengan Kab/Kota/Provinsi**

No.	Indikator Kinerja	Kota Banjarbaru	Kab. Banjar	Kab. Tanah Laut	Kota Banjarmasin	Prov. Kalsel
1.	Angka Harapan Hidup	72,36 Th	67,73 Th	69,86 Th	71,59 Th	69,13 Th

Sumber: BPS kota Banjarbaru 2022

Dilihat dari tabel Capaian indikator Angka Harapan Hidup Tahun 2022 Kota Banjarbaru dibanding dengan kabupaten/kota sekitar **lebih tinggi**, demikian pula dibanding capaian indikator Angka Harapan Hidup tingkat provinsi Kalimantan Selatan.

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam RPJMD dan Target Nasional

**Tabel 3.22.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup**  
**dengan Target RPJMD dan Target Nasional**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target RPJMD	Target Nasional
1.	Angka Harapan Hidup	72,36 Th	72,6	75,54 th

Sumber: Data BPS Kota Banjarbaru

Realisasi angka harapan hidup Kota Banjarbaru dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 tercapai **99,67%** dan target Nasional tahun 2024 tercapai **95,79%**.

### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

**Upaya yang telah dilakukan:**

- Upaya Pemenuhan sarana prasaranan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan upaya Kesehatan masyarakat (UKM) agar berkualitas baik dan terpenuhi secara kuantitas yaitu dengan:

- 1) Perbaikan sarana prasarana puskesmas yang terstandar.
  - 2) Pemenuhan alat Kesehatan sesuai standar dan kebutuhan.
  - 3) Pemenuhan kebutuhan obat dan fasilitas Kesehatan sesuai dengan kebutuhan pemenuhan program Kesehatan melalui dana DAK Kesehatan.
  - 4) Perbaikan Instalasi Pengelolaan Air Limbah untuk menunjang pengelolaan limbah di Puskesmas.
- b. Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) antara lain yaitu:
- 1) Penguatan Pelaksanaan standar pelayanan minimal untuk Ibu hamil dan bersalin pada fasyankes.
  - 2) Melakukan Singkronisasi dan Koordinasi Audit Kematian (Audit Maternal Perinatal) pengkajian pada kematian ibu dan bayi untuk mencari penyebab kematian yang terjadi agar tidak terjadi lagi kematian ibu dan bayi dengan penyebab yang sama di kemudian hari.
  - 3) Melaksanakan MPDN dan e-Kohort untuk penertiban pencatatan pelaporan pelayanan KIA di semua fasilitas kesehatan baik pemerintah dan swasta dengan menggunakan aplikasi e-Kohort agar data valid dan berkualitas. Dan penginputan kematian melalui aplikasi MPDN agar data kematian dapat diakses secara cepat dan valid sehingga dapat segera ditindak lanjuti.
  - 4) Adanya transport Jaminan Persalinan dengan maksud dan tujuan agar semua ibu hamil melahirkan di fasilitas kesehatan dan ibu hamil atau bayi yang berisiko segera mendapatkan penanganan sehingga membantu akselerasi penurunan AKI.
  - 5) Melaksanakan Pengenalan Tanda Bahaya Kehamilan, Persalinan dan Nifas Maksud dan tujuan untuk meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat, kader kesehatan merupakan orang yang paling dekat, paling mengerti dan memahami budaya sosial masyarakat di wilayahnya.
  - 6) Pelaksanaan Sistem Rujukan Terintegrasi Maternal dan Neonatal

maksud dan tujuan kegiatan adalah dalam rangka akselerasi penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang terdiri dari tata laksana emergensi sampai dengan nifas dan bayi.

- 7) Melaksanakan Program Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplikasi (P4K) dengan maksud dan tujuan kegiatan adalah meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir melalui peningkatan peran aktif keluarga dan masyarakat dalam perencanaan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi dan tanda bahaya kebidanan bagi ibu sehingga bersalin dengan aman dan melahirkan bayi yang sehat.
- c. Upaya Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) antara lain yaitu:
- 1) Optimalisasi Pelaksanaan MTBS dengan maksud dan tujuan kegiatan adalah meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan bayi dan balita sehingga bisa untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian yang terkait dengan penyebab utama penyakit pada balita.
  - 2) Pelaksanaan SDIDTK untuk pemantauan tumbuh kembang anak.
  - 3) Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (P2ASI) yaitu peningkatan pemberian air susu ibu (P2ASI) bagi wanita pekerja tentang pemberian ASI secara eksklusif.
- d. Upaya penurunan angka kesakitan yang telah dilaksanakan diantaranya:
- 1) Peningkatan kualitas pelayanan dengan akreditasi fasilitas kesehatan.
  - 2) Peningkatan upaya promosi Kesehatan dengan berbagai media.
  - 3) Pelaksanaan Program Juara Homecare memperluas jangkauan pelayanan kesehatan ke masyarakat.
  - 4) Pelaksanaan hygiene sanitasi dan kesehatan lingkungan dengan pelaksanaan PHB dan STBM.
  - 5) Gencar melaksanakan upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit menular maupun tidak menular.
  - 6) Upaya promosi kesehatan dilaksanakan dengan berbagai kegiatan



baik itu yang sifatnya pelaksanaan advokasi, sosialisasi atau pun pemberdayaan, dengan media offline dan online.

- 7) Koordinasi dengan berbagai lintas bidang dan program terutama dalam hal penerapan kebijakan kesehatan agar terimplementasi dengan baik.
- 8) Pelaksanaan penyuluhan pengelolaan makanan, pelatihan penjamah makanan sampai dengan pemeriksaan laboratorium pada produk industri rumah tangga, pengawasan toko alkes dan obat, serta pemberian laik sehat pada tempat pengelolaan makanan.

**Hambatan:**

- a. Adanya peraturan terkait dengan dicabutnya izin edar beberapa jenis obat sehingga berpengaruh kepada penyediaan obat.
- b. Pencatatan dan pelaporan yg masih kurang maksimal terutama sasaran (Bumil/Bulin dan Balita) yang diperiksa di luar wilayah/daerah tidak diikuti dan tidak tercatat.
- c. Tidak adanya laboratorium daerah untuk menunjang pemeriksaan laboratorium.
- d. Kurangnya kesadaran lansia dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan, Tidak adanya dukungan keluarga dalam membawa lansia ke pelayanan kesehatan.
- e. Skrining kesehatan untuk anak sekolah pemeriksaan berkala belum dilaksanakan secara maksimal.
- f. Pada saat imunisasi dasar lengkap pada umumnya keluarga tidak membawa untuk di pantau pertumbuhannya.
- g. Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan atau meningkatkan risiko seorang bayi terlahir dengan berat badan yang kurang. Beberapa faktor tersebut meliputi :
  - 1) Terlahir dari ibu yang memiliki masalah kesehatan selama hamil, misalnya praeklamsia, tekanan darah tinggi, atau kekurangan gizi.

- 2) Infeksi selama kehamilan.
- 3) Adanya kelainan genetik atau cacat bawaan lahir pada bayi.
- 4) Terlahir dari ibu dengan berat badan kurang selama kehamilan.
- 5) Usia ibu saat hamil kurang dari 17 tahun atau lebih dari 35 tahun.
- 6) Kehamilan kembar.

**Rencana Tindak Lanjut:**

- a. Peningkatan upaya deteksi dini untuk peningkatan kewaspadaan dini dan respon terhadap masalah Kesehatan yang cepat, sehingga masalah Kesehatan tidak meluas.
- b. Peningkatan kualitas SDM untuk peningkatan kualitas pelayanan dengan melaksanakan beberapa kegiatan workshop pada tahun 2023
- c. Meningkatkan kunjungan sehat pada fasilitas Kesehatan
- d. Pelaksanan pelayanan Kesehatan terintegrasi sebagaimana program transformasi layanan posyandu prima dengan memulai pembentukan posyandu prima
- e. Penguatan transformasi digital Kesehatan
- f. Untuk meningkatkan efektifitas di sarana pelayanan kefarmasian melalui pengkajian izin sarana kefarmasian oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan
- g. Menjaga keakuratan nilai yang dihasilkan suatu alat sehingga tidak menyimpang jauh dari ambang batas yang ditentukan
- h. Melaksanakan kegiatan pendistribusian obat dan vaksin ke puskesmas sesuai jadwal
- i. Melakukan pemantauan kunjungan rumah
- j. Peningkatan kapasitas kunjungan ANC baik kualitas maupun Kuantitas

## 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian target terutama dari segi anggaran telah dilakukan. Efisiensi atas penggunaan anggaran tersebut melalui program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dengan efisiensi untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.23.**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Angka Harapan Hidup, 2022**

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran Program Terkait	Efisiensi
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase sarana prasarana UKP UKM dalam keadaan baik	100%	78,17%	21,9%
		Angka Kematian Ibu (AKI)	80%	88%	-8%
		Angka Kematian Bayi (AKB)	-5,88 %	91,38%	-94,32 %
		Angka Kesakitan	111,4%	88,11%	23,29%.
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	100%	91,2%	8,8%
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	Persentase Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar	100,4%	81,24%,	19,13%

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran Program Terkait	Efesiensi
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan	100%	92,3	7,7%

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

## B. REALISASI ANGGARAN

**Tabel 3.24.**  
**Realisasi Anggaran Program Pendukung Angka Harapan Hidup, 2022**

Alokasi Dana	Terangngarkan				%
		Anggaran		Realisasi	
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	61.863.496.055	Rp.	59.813.482.391	96,7%
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	37.113.184.525	Rp.	31.499.523.012	84,9%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.	1.930.576.550	Rp.	1.750.901.351	90,7%
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp.	363.151.000	Rp.	302.325.343	83,2%
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp.	1.023.401.000	Rp.	936.413.565	91,5%
Jumlah Total	Rp.	102.293.809.203	Rp.	94.302.645.662	92,2%

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

**MISI 1**

:

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia

**SASARAN STRATEGIS 2** :

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

**INDIKATOR KINERJA 3** :

Angka Prevalensi Stunting

---

Stunting atau pendek adalah status gizi yang ditandai dengan kondisi gangguan pertumbuhan (pendek) pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang merupakan dampak dari berbagai faktor seperti berat lahir yang rendah, stimulasi dan pengasuhan anak yang kurang tepat, asupan nutrisi kurang, dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan serta berbagai faktor lingkungan lainnya.

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia stunting adalah status gizi yang ditandai dengan gangguan pertumbuhan (pendek) berdasarkan parameter antropometri tinggi badan yaitu Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U). Hasil pengukuran berada pada ambang batas (Z-Score)  $<-2$  SD sampai dengan  $-3$  SD (pendek/stunted) dan  $<-3$  SD (sangat pendek/severely stunted). Stunting pada anak sangat berdampak pada kesehatan dalam jangka pendek maupun jangka panjang antara lain meningkatkan potensi sakit dan kematian pada anak, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal anak menjadi terhambat dan tidak optimal, stunting juga berdampak meningkatkan resiko mengidap penyakit tidak menular seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes dan lain-lain serta dalam jangka panjang pada saat dewasa produktifitas rendah dan kapasitas kerja yang tidak optimal sehingga bisa mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi yang

nantinya bisa meningkatkan angka kemiskinan dan memperlebar angka ketimpangan ekonomi.

Indikator ini bermakna kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi Angka Prevalensi Stunting sehingga anal lebih pendek untuk seusianya (kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal kehidupan setelah lahir, tetapi baru tampak setelah anak berusia 2 tahun). Indikator ini dipilih karena indicator ini dapat menunjukkan kondisi stunted yang akan memberikan dampak bagi perkembangan tubuh dan otak anak menuju dewasa.

Cara perhitungan indikator angka prevalensi stunting mengacu pada elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-ppgbm) pada setiap puskesmas. **Prevalensi Stunting = Jumlah Balita Stunted dibagi jumlah seluruh balitanyang diukur dikali 100.**

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.25.  
Realisasi Kinerja Angka Prevalensi Stunting, 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka Prevalensi Stunting	Tahun	16,50	13,61	117,5%

Sumber: Hasil EPPBGM tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Angka Prevalensi Stunting di Kota Banjarbaru masih memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar mencapai **13,61%** dari target **16,50%** dengan capaian kinerja sebesar **117,5%** kategori **“Sangat Baik”**.

Beberapa program pendukung untuk IKU Prevalensi Stunting, antara lain:

- a. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Program ini dalam mendukung pencapaian Angka Prevalensi Stunting memiliki 1 (satu) sasaran program yaitu Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat. Pada sasaran Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat indikator kinerja yang diukur yaitu: Prevalensi Gizi Kurang.

Berdasarkan tabel di bawah menunjukkan realisasi capaian indikator kinerja Prevalensi Gizi Kurang di Kota Banjarbaru pada tahun 2021 adalah **43,44%** dan pada tahun 2022 adalah **86,25%**. Indikator ini menunjukkan peningkatan nilai kinerja dengan kategori capaian kinerja **“Baik”**.

**Tabel 3.26.**  
**Realisasi Capaian Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Kota Banjarbaru, 2021-2022**

No	Sasaran	Indikator	Capaian Program					
			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat	Prevalensi Gizi Kurang	9	14,09%	43,44%	8	9.10	86,25%

Sumber: Hasil EPPBGM, 2021-2022

#### **b. Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM**

SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) adalah suatu sistem yang di dalamnya mencakup proses penyediaan air minum mulai dari perencanaan sumber air baku (kualitas & kuantitas), transmisi air baku dari intake (sumber air baku) ke Instalasi Pengolahan Air (IPA), teknologi Instalasi Pengolahan Air/ IPA yang efektif dari segi performance dan biaya, transmisi air olahan (air minum) dari lokasi IPA ke reservoir (offtake), sampai distribusi air minum ke masyarakat atau daerah pelayanan. Hal-hal teknis maupun administrasi yang terkait dengan proses penyediaan air minum dimasukkan dalam sistem pengelolaan SPAM.

Indikator kinerja adalah Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota. Indikator ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan akses air minum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga diharapkan masyarakat dapat menjalani kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

Capaian Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM dengan indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 97,70%, telah terealisasi yaitu 98,42%. Capaian kinerjanya ini sebesar 100,674%. Sedangkan capaian Tahun 2021 sebesar 100,62%.

**a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

**Tabel 3.27.**  
**Target dan Realisasi, 2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	%	97,70	98,42	100,74

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Capaian Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM dengan indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 97,70%, telah terealisasi yaitu 98,42%.



**b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir**

**Tabel 3.28.**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja, 2021-2022**

No	Indikator Sasaran	2021	2022
		Realisasi / Capaian	Realisasi / Capaian
1.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	97,15 100,62	98,42 100,74

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 meningkat sebesar **0,12%**.

**c. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

Secara umum limbah domestik yang berasal dari rumah tangga dan yang tidak memiliki akses terhadap bangunan pengolahan merupakan sumber pencemaran utama bagi lingkungan yang dapat menimbulkan dampak yang serius karena dapat dengan mudah masuk ke badan air atau pun meresap ke badan tanah. Fakta dilapangan menunjukkan, air limbah domestik ini merupakan sumber utama pencemar badan air lingkungan terutama di daerah perkotaan.

Fasilitas sistem pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah satu kesatuan sistem fisik (teknis) dan non fisik (non teknis) berupa unit pengolahan setempat (tangki septik/MCK komunal) dan/atau berupa sistem pengolahan terpusat (pengaliran air limbah dari sambungan rumah melalui jaringan perpipaan yang kemudian diolah pada instalasi pengolahan air limbah baik skala kawasan maupun skala kota/regional).

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

**Tabel 3.29.**  
**Target dan Realisasi Kinerja, 2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota	%	100	100	100

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Capaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu **100%**, telah terealisasi yaitu **100%**.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

**Tabel 3.30.**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir**

No	Indikator Sasaran	Tahun 2021 Realisasi / Capaian	Tahun 2022 Realisasi / Capaian
1.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota	100 100	100 100

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 tetap sama yaitu **100%**.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

**Tabel 3.31.**  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Angka Prevalensi Stunting 2 Tahun Terakhir**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2020 Realisasi/ Capaian	Tahun 2021 Realisasi/ Capaian	Tahun 2022 Realisasi/ Capaian
1.	Angka Prevalensi Stunting	17,34% 100%	17,11% 99,53%	13,61% 102,78

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

**Tabel 3.32.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Prevalensi Stunting dengan Kab/Kota/Provinsi**

No.	Indikator kinerja	Kota Banjarbaru	Kab Banjar	Kab Tanah Laut	Kota Banjarmasin	Prov Kalsel
1.	Angka Prevalensi Stunting	13,61%	16,95	5,3	2,93	8,87

Sumber : Hasil EPPBGM tahun 2022

Dilihat dari tabel di atas, capaian Angka Prevalensi Stunting Tahun 2022 Kota Banjarbaru lebih tinggi dibandingkan dengan Kab/Kota sekitar, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan Kab. Banjar.

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam RPJMD dan Target Nasional

**Tabel 3.33.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Prevalensi Stunting dengan Target RPJMD dan Target Nasional**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target RPJMD	Target Nasional
1.	Angka Prevalensi Stunting	13,61%	13,8%	14%

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Angka Prevalensi Stunting Tahun 2022 berdasarkan eppbgm adalah **13,61%**, maka capaian kinerjanya jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah tercapai **101,37%**. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMN telah tercapai **102,78%**.

### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

#### Upaya yang telah dilakukan:

- Upaya-upaya konseling pelayanan balita termasuk didalamnya masalah gizi dilakukan baik melalui online dan kunjungan rumah oleh petugas

Puskesmas, namun untuk pelaksanaan penimbangan Balita tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Pencegahan masalah gizi kurang ini harus dilaksanakan secara bersamaan dari semua lintas sektor dan masyarakat, yaitu mulai dari perbaikan sanitasi lingkungan, menstabilkan kondisi ekonomi, upaya-upaya pembinaan masyarakat untuk mampu meningkatkan daya beli, menjamin ketersediaan pangan yang berkualitas yang mudah didapat oleh masyarakat Banjarbaru. Tentunya juga terus melaksanakan promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga terhadap penanganan gizi terhadap Balita secara khusus dan terhadap keluarga secara umum.

- b. Pemerintah Kota Banjarbaru mempunyai perhatian serius terhadap upaya penurunan stunting di Kota Banjarbaru, untuk itu telah dibentuk Tim KP2S (Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting) tingkat kota Banjarbaru yang mempunyai tugas untuk melaksanakan program-program upaya percepatan penurunan stunting di Kota Banjarbaru. Tim KP2S pembagian peran perangkat daerah sesuai dengan strategi penanganan stunting. Dalam strategi kegiatan penanganan stunting mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yaitu kegiatan Intervensi Spesifik dan kegiatan Intervensi Sensitif. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa intervensi spesifik mempunyai kontribusi 30% dalam pencegahan stunting, sedangkan intervensi sensitive berkontribusi 70%. Intervensi spesifik ditujukan kepada anak dalam 1000 hari pertama kehidupan (HPK), kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PMP dan PA. Masa 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK) terdiri atas 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pada dua tahun pertama kehidupan buah hati. Intervensi Sensitif kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting. ditujukan melalui kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan, sasarannya adalah masyarakat umum. Dengan upaya-upaya

intervensi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Banjarbaru indikator angka prevalensi stunting diharapkan dapat dicapai sesuai dengan target pada masa akhir RPJMD tahun 2026, sehingga kualitas kesehatan masyarakat Kota Banjarbaru dapat ditingkatkan.

- c. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota, yaitu dalam rangka meningkatkan persentase air minum yang aman menuju 100% pada tahun 2024 nanti, Bidang Cipta Karya berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum aman melalui pembangunan jaringan distribusi sekunder dan tersier perpipaan air minum diameter 2-8 inch yang tersebar di seluruh Kota Banjarbaru. Selain itu, untuk meng-*cover* Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak mampu membayar biaya berlangganan PTAM Intan Banjar telah direncanakan jaringan perpipaan non PTAM yang rencananya fisik konstruksinya akan dilaksanakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Air Minum pada tahun 2023.
- d. Selanjutnya, Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota, yaitu untuk mencapai akses sanitasi aman bagi masyarakat Kota Banjarbaru, Bidang Cipta Karya berupaya membangun infrastruktur sanitasi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain itu, sejak 2022 Bidang Cipta Karya juga berupaya untuk ikut berkolaborasi dalam mengintervensi pencegahan *stunting* bagi balita. Hal ini dilakukan melalui pembangunan tangki septik individual yang didanai melalui Dana Alkasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Sanitasi dan pembangunan WC melalui APBD Kota Banjarbaru. Kegiatan ini rencananya akan tetap dilaksanakan di tahun-tahun mendatang sampai seluruh rumah Kepala Keluarga (KK) yang memiliki balita yang tersuspek

akan mengalami *stunting* telah memiliki akses sanitasi dan air minum yang aman.

**Hambatan:**

- a. Permasalahan gizi kurang masih menjadi salah satu isu penting yang dihadapi saat ini. Faktor Kesehatan serta pemenuhan gizi seimbang menjadi kebutuhan dasar untuk dapat dipenuhi dalam permasalahan gizi kurang, selain juga pemenuhan gizi yang baik dimasa kehamilan agar tidak kekurangan energi, protein, vitamin dan mineral. berdasarkan analisis dalam eppbgm kondisi gizi kurang ini dikarenakan riwayat kehamilan ibu KEK dan Anggota keluarga masih ada yang merokok/ tinggal dalam lingkungan merokok.
- b. Banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya gizi kurang pada Balita diantaranya dari karakteristik keluarga (seperti pengetahuan, pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga) dan Pola asuh (asuh makan, asuh kesehatan) selain itu juga kondisi medis si balita. Pengetahuan dalam hal ini bukan masalah tingkat pendidikan tetapi pengetahuan terhadap asupan gizi terhadap Balita.
- c. Untuk hambatan yang dihadapi dalam Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota, yaitu pada pembangunan jaringan air minum skala distribusi sekunder dan tersier, sebagaimana kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru, sering dihadapkan pada belum terkoneksi secara keseluruhan jaringan pipa PTAM Intan Banjar. Selain itu distribusi air minum melalui jaringan primer, jaringan pipa Banjarbakula seringkali mengalami perbaikan, yang mengakibatkan air minum tidak mengalir dengan lancar atau bahkan mengalami mati total pada hari-hari tertentu ada saat perbaikan dilaksanakan.

- d. Selanjutnya, hambatan yang dihadapi dalam Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota, yaitu pada akses aman sanitasi, selama ini masih kurangnya kesadaran warga untuk membangun sarana dan prasarana sanitasi yang aman. Mereka masih berpendapat, bahwa tangki septik yang tidak pernah disedot merupakan tangki septik yang aman. Padahal tangki septik yang tidak pernah disedot merupakan indikator bahwa tangki septik mereka telah mencemari air tanah, karena tinja/black water telah menyebar ke mana-mana di bawah tanah.

#### **Rencana Tindak Lanjut:**

- a. Pencegahan masalah gizi kurang ini harus dilaksanakan secara bersamaan dari semua lintas sektor dan masyarakat, yaitu mulai dari perbaikan sanitasi lingkungan, menstabilkan kondisi ekonomi, upaya-upaya pembinaan masyarakat untuk mampu meningkatkan daya beli, menjamin ketersediaan pangan yang berkualitas yang mudah didapat oleh masyarakat Banjarbaru. Tentunya juga terus melaksanakan promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga terhadap penanganan gizi terhadap Balita secara khusus dan terhadap keluarga secara umum.
- b. Rencana tindak lanjut terkait rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM, Bidang Cipta Karya di tahun-tahun mendatang apabila terjadi peristiwa mati total air minum terjadi, berencana akan mendistribusikan air minum gratis bagi warga yang terdampak mati total pada saat perbaikan pipa jaringan primer Banjarbakula maupun ppa jaringan PTAM Intan Banjar sedang berlangsung. Hal ini dilakukan melalui pembangunan sumur bor, pembelian mobil tangki air untuk mendistribusikan air minum dan pembangunan stasiun pengisian air minum cadangan di beberapa titik yang padat penduduk. Selain itu, di tahun 2023, Bidang Cipta Karya juga akan melakukan inisiasi

pendampingan terhadap pasca konstruksi pembangunan sumur bor yang tersebar di Kecamatan Cempaka, agar Kelompok Penggunan dan Pemanfaat (KPP) pada daerah tersebut dapat memiliki daya saing usaha pemanfaatan air baku yang akan dijadikan air minum dan dapat dijual kepada warga sekitar yang membutuhkan. Hal ini dapat menjadi inisiasi awal sirkular ekonomi yang dapat meningkatkan ekonomi warga MBR.

- c. Selanjutnya rencana tindak lanjut terkait rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota, yaitu akan melakukan penuntasan akses sanitasi aman, Bidang Cipta Karya telah membuat beberapa prototipe DED Tangki Septik dan bangunan WC di atasnya agar dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan, kondisi tanah eksisting dan pembiayaan yang akan dilaksanakan. Gunanya agar di tahun-tahun mendatang, selain melalui mekanisme pendanaan melalui DAK dan APBD, juga melalui mekanisme *Corporate Social Responsibility* (CSR).

## 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.34.**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Angka Prevalensi Stunting, 2022**

No	Program	Indikator	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran Program Terkait	Efisiensi
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Gizi Kurang	86,25%	87,56	-1,31%
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di	100,74	85,17	15,57



Kota					
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota	100	93,87	6,13

Sumber: Data Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR

## B. REALISASI ANGGARAN

**Tabel 3.35.**  
**Realisasi Anggaran Program Pendukung**  
**Angka Prevalensi Stunting, 2022**

Alokasi Dana	Keuangan		%
	Anggaran	Realisasi	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 37.113.184.525	Rp. 31.499.523.012	84,9
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 3.394.892.000	Rp. 2.891.412.000	85,17
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 6.353.015.000	Rp. 5.963.275.000	93,87
Jumlah Total	Rp. 46.861.091.525	Rp. 40.354.210.012	86,11

Sumber: Data Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR

### MISI 1 :

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia

### SASARAN STRATEGIS 3 :

Meningkatnya Kesenjangan Gender

### INDIKATOR KINERJA 4 :

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

---

Kesetaraan gender adalah kondisi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesempatan, hak, manfaat, dan akses yang sama sebagai manusia, untuk berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya,

---

pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Sehingga kesetaraan gender merupakan suatu kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki. kesetaraan gender mengangkat persamaan akses, peluang partisipasi kontrol, dan manfaat yang sama antara pria dan wanita. Oleh karena itu, kesadaran tentang isu kesetaraan gender merupakan hal yang perlu dicapai.

Indikator kinerja untuk mengukur kesetaraan gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks Pembangunan Gender merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia, IPG merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. IPG merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dimensi pendidikan menggunakan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dimensi kesehatan menggunakan umur harapan hidup, serta dimensi ekonomi menggunakan pengeluaran per kapita disesuaikan.

Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh

akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Ukuran yang dipakai adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), melalui IPG perbedaan pencapaian yang menggambarkan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dapat dijelaskan

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kesetaraan gender dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) berdasarkan target 2022 indeks sebesar **92,65%**, telah terealisasi sebesar **92,83%**. Data tersebut merupakan realisasi Tahun 2021 dikarenakan data Indeks Pembangunan Gender tahun 2022 belum tersedia pada BPS Kota Banjarbaru.

**Gambar 3.4.**  
**Indeks Pembangunan Gender (IPG), 2019-2021**



Kabupaten	2019	2020	2021
KOTA BANJAR BARU	92,43	92,55	92,56

Sumber: BPS Kota Banjarbaru

Angka IPG yang mendekati 100 menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan perempuan hampir sama dengan laki-laki. Namun, kita perlu perhatikan level pencapaian IPM laki-laki dan perempuan di suatu wilayah yaitu apakah sama-sama tinggi atau sama-sama rendah.

Program pendukung indikator Indeks Pembangunan Gender pada SKPD di Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru antara lain:

**a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi		Capaian
				2021	2022	
1.	Peningkatan Implementasi PUG dan Pemberdayaan Perempuan	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada APBD 2. Persentase Organisasi Perempuan yang aktif	30 % 100%	2 % 100%	46 % 100%	153,3 % 100%

Sumber: Data DPPKBPMPPA Kota Banjarbaru

**b. Program Perlindungan Perempuan**

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi		Capaian
				2021	2022	
1.	Peningkatan perlindungan perempuan terhadap kasus kekerasan	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data DPPKBPMPPA Kota Banjarbaru

**c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi		Capaian
				2021	2022	
1.	Peningkatan Kualitas Keluarga	1. Persentase Sekolah inspirasi perempuan tekun yang aktif 2. Persentase kelompok Industri Rumahan Perempuan yang aktif	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%

Sumber: Data DPPKBPMPPA Kota Banjarbaru

#### d. Program Pemenuhan Hak Anak

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi		Capaian
				2021	2022	
1.	Peningkatan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang aktif	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data DPPKBPMPPA Kota Banjarbaru

#### e. Program Perlindungan Khusus Anak

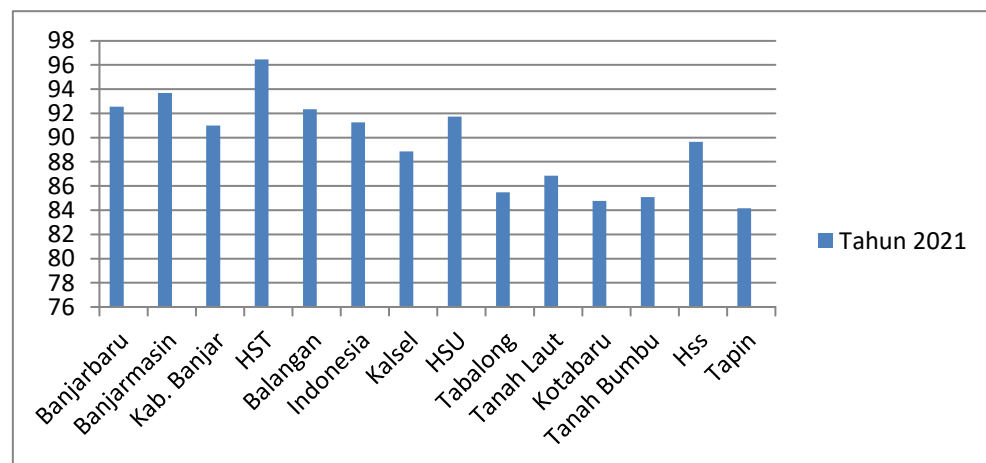
No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi		Capaian
				2021	2022	
1.	Peningkatan perlindungan anak terhadap kekerasan	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data DPPKBPMPPA Kota Banjarbaru

### 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi tahun sebelumnya dimana kinerja terus meningkat, pada tahun 2020 adalah **92,55** dan pada tahun 2021 adalah **92,56**.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi



#### **4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam RPJMD dan Target Nasional.**

Realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Pemerintah Kota Banjarbaru dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 yaitu 92,85 % tercapai dan target akhir Nasional Tahun 2024 sebesar 91,39 % tercapai. Realisasi Indeks Pembangunan Gender Kota Banjarbaru Telah melebihi Target akhir IPG Nasional Tahun 2024 yang termuat dalam RPJMN.

#### **5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Upaya yang telah dilakukan:**

Sebagai langkah dan inovasi untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yaitu:

- a. Semua Pembangunan gender mempunyai faktor pendukung yang meliputi pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang meliputi gender laki-laki dan perempuan yang melibatkan lintas SKPD sehingga pengukuran dan perhitungan terkait dengan BPS Kota Banjarbaru;
- b. Pelibatan seluruh stakeholder untuk menghilangkan anggapan bahwa perempuan kodratnya hanya sebagai pengurus rumah tangga dan bukan sebagai penunjang kebutuhan keluarga melalui Evaluasi Pengarusutamaan Gender Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2021 dan 2022;
- c. Mendorong perempuan agar meningkatkan kapasitasnya dan ikut serta dalam proses pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan perempuan;
- d. Memberikan bimbingan dan pelatihan disegala bidang tentang pentingnya peran serta perempuan dalam membangun keluarga;
- e. Sinergitas dan optimalisasi program kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak lintas sektoral;

- f. Pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi menuju Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- g. Melaksanakan program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan menunjuk Pilot Proyek yang menjadi Lokus pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga;
- h. Sosialisasi Ke Sekolah Sekolah terkait Pencegahan Pernikahan Usia Anak, Kekerasan terhadap Anak dan kasus bullying;
- i. Sosialisasi Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan ke Kelurahan;
- j. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Tim penanganan kekerasan dan UPTD. PPA.

**Hambatan:**

- a. Belum Maksimalnya fungsi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG);
- b. Belum maksimalnya Fungsi Focal point di tiap-tiap SKPD;
- c. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah data yang penyajiannya adalah kewenangan BPS dan hanya dapat dikeluarkan pada bulan Maret Tahun berjalan sehingga mengakibatkan terlambatnya dalam pembuatan Laporan dan evaluasi pengukuran capaian Pembangunan Gender per indikator;
- d. Masih adanya pemahaman SKPD yang Bias Gender.

**Rencana Tindak Lanjut:**

- a. Meningkatkan kapasitas SDM Tim Tekhnis PUG untuk selanjutnya mampu melakukan pendampingan dan asistensi Kepala Focal Point yang ada di tiap tiap SKPD
- b. Memaksimalkan Kinerja Pokja PUG dan Focal Point PU.
- c. Melaksanakan Evaluasi Implementasi PUG di Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.

- d. Bekerjasama dengan BPS melalui fasilitasi Bappeda dan Diskominfo Kota Banjarbaru untuk dapat menyediakan Data Banjarbaru Dalam Angka yang terpilah dan dikeluarkan maksimal pada bulan Januari pada bulan berjalan berikutnya.
- e. Melakukan kegiatan Komunukiasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Kesetaraan gender secara massive baik kepada SKPD maupun langsung kepada masyarakat.

## 8. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.36.**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IPG, 2022**

No	Program	Indikator	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1. Persentase Anggaran Responsif Gender Pada APBD 2. Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	100 %	97.15%	2,85%
2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	100%	24%	76%
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1. Persentase Sekolah Inspirasi Perempuan Tekun yang aktif 2. Persentase Kelompok Industri Rumahan Perempuan yang aktif	100%	100%	- -
4	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang aktif	100%	73 %	27%
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	100%	38%	62%

Sumber: Data DPPKBPMPPA Kota Banjarbaru



## B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran program untuk mendukung terealisasinya Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.510.550.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.139.238.018 atau sebesar 75,42%.

**Tabel 3.37.**  
**Realisasi Anggaran Program Pendukung IPG, 2022**

No	Program	Pagu (Rp)	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	730.300.000	709.543.018	97,15%
2.	Program Perlindungan Perempuan	186.000.000	44.972.500	24%
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	166.950.000	166.950.000	100%
4.	Program Pemenuhan Hak anak	161.500.000	118.050.000	73%
5.	Program Perlindungan Khusus Anak	265.800.000	99.722.500	38%
Jumlah		1.510.550.000	1.139.238.018	75,42%

Sumber: Data DPPKBPMPPA Kota Banjarbaru

### **MISI 1 :**

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia

### **SASARAN STRATEGIS 4 :**

Terjaganya Daya Beli Masyarakat

### **INDIKATOR KINERJA 5 :**

Angka Inflasi

---

Angka Inflasi merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI). Persentase kenaikan IHK

---

dikenal dengan inflasi. Perhitungan Angka Inflasi diperoleh dari BPS Kota Banjarbaru.

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja sasaran terjaganya daya beli masyarakat dengan indikator kinerja angka inflasi berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu  $< 3$  dan telah terealisasi dengan nilai **6,98**. Hasil tersebut belum sesuai dengan target yang diharapkan.

**Gambar 3.5.**  
**Inflasi (Persen), 2022**



Sumber: Data BPS Kota Banjarbaru

Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung sasaran strategis Terjaganya Daya Beli Masyarakat adalah Program Perekonomian dan Pembangunan di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dan Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru.

### 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi 2 tahun sebelumnya dimana tahun 2020 angka inflasi sebesar **1,67%**. Di tahun 2021 angka inflasi sedikit naik menjadi **2,53%**.

Sedangkan pada tahun 2022 angka inflasi kota Banjarbaru berada pada posisi 6,98%.

### 3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

Di Provinsi Kalimantan Selatan ada 3 Kabupaten/Kota yang menjadi sampel yaitu, Kota Banjarmasin, Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Kotabaru. Kota Banjarbaru sendiri mengikuti perhitungan Kota Banjarmasin. Berikut angka Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan:

**Tabel 3.38.**  
Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Inflasi  
dengan Kab/Kota/ Provinsi

No	Indikator kinerja	Kota Banjarmasin	Kab. Tabalong	Kab. Kotabaru	Prov. Kalsel
1.	Angka Inflasi	6,98	5,01	8,65	6,99

Sumber: Data BPS Kota Banjarbaru

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional.

Realisasi Angka Inflasi Kota Banjarbaru di posisi 6,98 masih belum sesuai dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 maupun target inflasi nasional tahun 2022 di angka < 3.

### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

#### Upaya yang telah dilakukan:

1. Kebijakan Moneter, bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan langkah-langkah yang fokus di bidang keuangan (moneter). Terdapat tiga wujud kebijakan moneter, yaitu:
  - a) Penetapan persediaan kas;

- b) Diskonto, Bank Indonesia menerapkan kebijakan peningkatan suku bunga sehingga masyarakat jadi tergerak untuk menyimpan uang di Bank dan uang yang beredar di masyarakat bisa berkurang;
  - c) Operasi pasar terbuka, berupa penjualan surat berharga akan menyerap uang masyarakat dan menekan peredaran uang sehingga laju inflasi bisa ditekan.
2. Kebijakan Fiskal, penerapan kebijakan fiska dapat mempengaruhi nominal pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini dapat berbentuk dua kegiatan, yaitu:
- a) Menghemat pengeluaran pemerintah, saat pengeluaran negara ditekan maka jumlah pembelian produk barang dan jasa akan ikut turun. Demand yang turun akan mampu menekan laju inflasi;
  - b) Menaikkan tarif pajak, dengan adanya kenaikan tarif pajak akan turut mengurangi tingkat belanja masyarakat. Sehingga peredaran uang ditengah masyarakat berkurang dan harga barang berangsur-angsur kembali ke kondisi normal;
3. Kebijakan Lainnya, selain fokus dibidang moneter dan fiskal, masih ada cara mengatasi inflasi yang bisa dilakukan pemerintah, yaitu:
- a) Menambah jumlah barang di pasar, dapat diwujudkan dengan dua cara, yaitu dengan pemberian subsidi atau stimulus agar industri meningkatkan produksi hingga level tertentu dan melakukan pelonggaran keran impor agar stok barang di pasar meningkat secara signifikan.
  - b) Menetapkan harga batas atas, laju inflasi bisa ditekan dengan menetapkan harga maksimal untuk barang-barang tertentu. Tujuannya agar harga tidak semakin naik dan tidak terkendali.

**Hambatan:**

- a. Kenaikan Harga BBM dan Komoditas lokal seperti Batubara, Sawit

- b. Gangguan rantai pasok yang selama ini terjadi saat pandemi Covid-19 tidak bisa memenuhi permintaan yang melonjak pasca pandemic
- c. Perang dagang Amerika Serikat dan RRT
- d. Perang antara Rusia dan Ukraina yang mengganggu pasokan pangan serta memicu krisis energi
- e. Kenaikan Suku Bunga Acuan *the fed* yang membuat dolar AS menguat.

#### Rencana Tindak Lanjut:

Mengintensifkan setiap upaya yang telah dilaksanakan sebelumnya serta meningkatkan koordinasi dengan seluruh *stake holder* terkait Inflasi.

### 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Program Perekonomian dan Pembangunan (Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian) dan Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang mendukung indikator kinerja utama Angka Inflasi Tahun 2022, diperoleh tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.39.**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Angka Inflasi, 2022**

No.	Program	Indikator	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Program Perekonomian dan Pembangunan (Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian)	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Perekonomian yang selesai ditindaklanjuti	85	79,58	5,42
2.	Program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	persentase stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang	100	99	1

No.	Program	Indikator	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
penting					

Sumber: Data Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Banjarbaru

## B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran program untuk mendukung terealisasinya Angka Inflasi sesuai target tahun 2022 adalah sebesar Rp. 416.779.350 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 365.777.250 atau 87,76%.

**Tabel 3.40.**  
**Realisasi Anggaran Program Pendukung Angka Inflasi, 2022**

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1.	Program Perekonomian dan Pembangunan (Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian)	241.716.850	192.378.750	79,58
2.	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	175.062.500	173.398.500	99
Jumlah		416.779.350	365.777.250	87,76

Sumber: Data Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Banjarbaru

**MISI 1 :**

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia

**SASARAN STRATEGIS 5 :**

Meningkatnya Toleransi Beragama, Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat

**INDIKATOR KINERJA 6 :**

Persentase Pembinaan Keagamaan, Penyelesaian Potensi Konflik SARA dan Pelanggaran Perda

---

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penanganan Konflik Sosial, bahwa yang disebut dengan **konflik** adalah perseteruan dan/ atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional di daerah serta menghambat pembangunan.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Konflik yang berupa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan.

Untuk mengetahui sejauh mana keamanan dan kenyamanan masyarakat serta stabilitas daerah dapat dilihat dari formulasi Persentase Penyelesaian Potensi Konflik SARA yang terjadi di Kota Banjarbaru. Semakin tinggi realisasi yang dicapai dalam penyelesaian potensi konflik SARA maka menggambarkan terciptanya situasi atau kondisi di wilayah Kota Banjarbaru **yang semakin kondusif (aman, nyaman dan tertib)**, sesuai dengan misi kesatu Kota Banjarbaru

---

**“Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak mulia”.**

Pembinaan keagamaan, Penyelesaian Potensi Konflik SARA dan Pelanggaran Perda merupakan proses untuk menciptakan kondisi kehidupan yang aman dan damai sehingga stabilitas daerah dan pembangunan dapat berjalan lancar. Pembinaan keagamaan, Penyelesaian Potensi Konflik SARA dan Pelanggaran Perda diukur berdasarkan permasalahan yang telah diproses/diselesaikan dibagi 3 dengan hasil pengukuran berupa Persentase Pembinaan keagamaan, Penyelesaian Potensi Konflik SARA dan Pelanggaran Perda.

## **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Capaian kinerja sasaran meningkatnya Toleransi Beragama, Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat adalah:

**Tabel 3.41.**  
**Realisasi Kinerja Meningkatnya Toleransi Beragama, Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat, 2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian/ Katagori
1.	Persentase Pembinaan Keagamaan, Penyelesaian Potensi Konflik SARA dan Pelanggaran Perda	%	100%	100%	100%

Sumber: Data Bagian Kesra, Bakesbangpol, dan Satpol PP

Pencapaian indikator persentase Pembinaan keagamaan, Penyelesaian Potensi Konflik SARA dan Pelanggaran Perda dari target yang telah ditentukan yaitu 100% telah terealisasi 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori capaian kinerja baik). Program yang menunjang capaian kinerja tersebut adalah Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan



peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial. Terkait Pembinaan keagamaan yang dilakukan:

**Tabel 3.42.**  
**Pengukuran Realisasi Berdasarkan Pembinaan Keagamaan**

No	Uraian	Keterangan
1.	Pembinaan Tilawatil Qur'an dan buta aksara Al Qur'an	Terealisasi
2.	Pembinaan rumah ibadah muslim dan non muslim	Terealisasi
3.	Pembinaan PHBI dan ta'mir	Terealisasi

Sumber: Data Bagian Kesra Setda Kota Banjarbaru

Terkait Penyelesaian Potensi Konflik SARA, berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa di wilayah Kota Banjarbaru selama tahun 2022 kondisinya dalam keadaan terjadi 5 kasus SARA yang ditangani dan masalah telah selesai.

**Tabel 3.43.**  
**Data Potensi Konflik SARA yang Terjadi di Kota Banjarbaru, 2022**

No.	Uraian Permasalahan	Tindakan Yang Dilakukan	Keterangan
1.	Penolakan Warga RT.005/RW.III Kel. LAURA atas Kegiatan Kelompok Sholawat Pelangi 7 Warna pimpinan Sdr.Arbain (Guru Sepunggur) di kediaman Sdr. SUPRIYAMBODO yang terindikasi menyimpang.	Telah dilakukan Mediasi antara masyarakat dan Kelompok Sholawat Pelangi 7 Warna Pada rakor Tim Kewaspadaan Dini Kota Banjarbaru dan menghasilkan kesepakatan dengan surat pernyataan bahwa kelompok tsb tidak lagi melakukan kegiatan yang meresahkan masyarakat sekitar.	Telah dibuatkan Surat Pernyataan bahwa Kelompok Solawat Pelangi 7 Warna tidak dibolehkan lgi melakukan kegiatan di Rumah sdr. Supriyambodo maupun di seluruh wilayah Kota Banjarbaru. (Masalah Selesai)
2.	Penolakan Masyarakat atas berdirinya Bangunan yang akan dijadikan Mesjid LDII di RT.19/ RW.08 Jl. Pondok IV dengan memboikot Pengurusan IMB.	Telah dilakukan fasilitasi pertemuan pada Rakor Tim Kewaspadaan Dini Kota Banjarbaru antara Pengurus LDII dengan Perwakilan Masyarakat setempat dengan hasil, masyarakat sekitar tetap menolak untuk menyetujui Pemberian Izin Bangunan dimaksud dijadikan Mesjid, dan Masyarakat dapat menyetujui	Perizinan masih dalam proses. (FKUB dan Kemenag Telah Menerbitkan Rekomendasi) (Masalah selesai)

No.	Uraian Permasalahan	Tindakan Yang Dilakukan	Keterangan
		dikeluarkan ijin dalam bentuk Bangunan Mushala.	
3.	Penolakan Warga RT. 024. RW. 05 Kelurahan Kemuning dan Warga RT.04 RW. 05 Kelurahan Loktabat Selatan atas rencana pendirian Gereja HKBP di Wilayah RT.04 RW. 05 dengan alasan Rencana Pendirian Bangunan Gereja tersebut terlalu dekat dengan Pondok Pesantren serta mayoritas Penduduk sekitar Muslim.	Telah dilakukan Fasilitasi dan Koordinasi dengan Ketua RT dan Tokoh Agama serta Pihak HKBP Menyarankan kepada Pengurus HKBP untuk melakukan pendekatan dan sosialisasi terhadap warga sekitar	Pihak Panitia Pembangunan Gereja tidak akan mendirikan bangunan sebelum semua persyaratan terpenuhi sesuai SKB no.8 dan 9. (Masalah selesai)
4	Penerbitan IMB untuk masjid Salman Al Farisy yang berada di wilayah Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan. Permasalahannya adalah keluarnya IMB sebelum melalui prosesn pemberian rekomendasi oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banjarbaru	Telah dilakukan fasilitasi dan koordinasi dengan panitia pengurus Yayasan Masjid Salman Alfarisy terkait IMB yang telah keluar. Pihak Yayasan mengajukan kembali proses ijin kepada FKUB dengan memenuhi tanda tangan dari pengguna rumah ibadat dan masyarakat sekitar dengan syarat 60/90	IMB telah diterbitkan dan tidak diperlukan lagi rekomendasi dari FKUB (Masalah selesai)
5	Pembangunan masjid Salma bin Muhammed yang berada di Wilayah Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin akan melaksanakan pembangunan masjidnya, tetapi belum mempunyai IMB dan belum mengurus proses rekomendasi dari FKUB dan Kamenag yang sesuai dengan peraturan 2 menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.	Telah dilakukan fasilitasi dan koordinasi dengan berpegang pada Peraturan 2 menteri tentang prosedur pembangunan rumah ibadat. Sebelum rekomendasi dari Kamenag dan FKUB keluar, maka proses pembangunan masjid Salma Bin Mohammad dihentikan	Rekomendasi FKUB dan Kementerian Agama telah diterbitkan (Masalah selesai)

Sumber: Data Bakesbangpol Kota Banjarbaru

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Capaian kinerja sesuai dengan pengukuran kinerja tahun 202 dengan 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2020 tidak dapat dilakukan karena adanya perbedaan indikator sasaran sehingga perbandingan realisasi/ capaian dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan.

**Tabel 3.44.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pembinaan Keagamaan, Penyelesaian Potensi Konflik SARA dan Pelanggaran Perda 2 Tahun Terakhir**

No	Indikator Sasaran	2020	2021	2022
		Realisasi / Capaian	Realisasi / Capaian	Realisasi / Capaian
1.	Persentase Pembinaan keagamaan, Penyelesaian Potensi Konflik SARA dan Pelanggaran Perda	100%	100%	100 %

Sumber: Data Bagian Kesra, Bakesbangpol, dan Satpol PP

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD dan Nasional

**Tabel 3.45.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pembinaan Keagamaan, Penyelesaian Potensi Konflik SARA dan Pelanggaran Perda dengan Target RPJMD dan Target Nasional**

No	Indikator Kinerja	Pemko Banjarbaru Tahun 2022	Target RPJMD Tahun 2022	Target Nasional
1.	Persentase Pembinaan keagamaan, Penyelesaian Potensi Konflik SARA dan Pelanggaran Perda	100%	100%	-

Sumber: Data Bagian Kesra, Bakesbangpol, dan Satpol PP

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa indikator kinerja Persentase Pembinaan keagamaan, Penyelesaian Potensi Konflik SARA dan Pelanggaran Perda realiasi capaian 100% dari target akhir RPJMD tahun 2022. Hal menunjukan pencapaian dalam **kategori baik** dari segi keamanan dan kenyamanan masyarakat serta stabilitas daerah terkait Persentase Pembinaan keagamaan, Penyelesaian Potensi Konflik SARA dan Pelanggaran Perda yang terjadi di Kota Banjarbaru. Sedangkan untuk **target Nasional tidak ada**.

#### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

##### **Upaya yang telah dilakukan:**

Untuk merealisasikan target ada beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu dengan menindaklanjuti laporan yang diterima terkait konflik SARA dengan Pencapaian sasaran Persentase Penyelesaian Potensi Konflik SARA yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencapaian penanganan kasus potensi rawan konflik SARA agar tidak sampai menjadi kasus konflik di Kota Banjarbaru. Adapun upaya lanjutan yang dilakukan antara lain:

- 1) Melaksanakan dialog dan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan agama serta pemberdayaan forum-forum kemitraan dan kerjasama (FKDM, FKUB dan FPK serta dengan kalangan ormas dan kepemudaan lainnya).
- 2) Memaksimalkan fungsi dan peranan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) kota Banjarbaru tahun 2022 dalam merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah melalui deteksi dini dan peringatan dini serta alternatif cara bertindak dan tukar menukar informasi intelijen
- 3) Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan pemantauan perkembangan situasi politik daerah dan stabilitas politik pemerintahan, yang dilaksanakan secara terpadu dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat dengan tujuan agar keberadaan dan aktifitasnya dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara serta menghindari keberadaan ormas-ormas yang dapat meresahkan masyarakat, memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta merongrong NKRI.

### **Hambatan:**

Masyarakat Banjarbaru yang Heterogen, baik agama, pekerjaan maupun tingkat pendidikan, ditambah situasi sosial dan politik Nasional yang terjadi sehingga rawan berpotensi konflik, khususnya konflik yang berlatar belakang SARA seperti pendirian rumah ibadah, pendirian warung remang-remang, sengketa lahan, dan Pilkada.

### **Rencana Tindak Lanjut:**

- a. Lebih meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kemampuan deteksi dini melalui pemetaan daerah rawan konflik agar potensi konflik yang muncul di daerah tidak berkembang menjadi konflik yang anarkis yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Koordinasi yang intensif dengan jajaran Forkopimda untuk mendukung terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kota Banjarbaru.
- c. Memberdayakan segala potensi yang ada dan/ atau yang dimiliki dengan memprioritaskan membangun komitmen dan dedikasi serta integritas yang tinggi dari semua sumber daya aparatur yang jumlah dan kualitas saat sekarang ini masih kurang memadai untuk peningkatan produktifitas kinerjanya.
- d. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif dengan semua instansi/SKPD terkait, forum-forum, organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat dan agama, serta elemen-elemen kemasyarakatan lainnya. Karena tingkat keberhasilan pencapaian kinerja hampir disemua kegiatan/ program sangat/ atau selalu tergantung dari sinergitas dan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait instansi diluar (eksternal) organisasi.

### Pendukung Capaian Kinerja:

- a. Pencapaian sasaran Meningkatnya Toleransi Beragama, Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat di dukung oleh program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru.
- b. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efisiensi atas penggunaannya sebesar **16%**.

## 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.46**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Persentase Pembinaan Keagamaan, Penyelesaian Potensi Konflik SARA dan Pelanggaran Perda, 2022**

Program	Indikator Sasaran Program	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Efisiensi
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase potensi konflik Ipolek Sosbud Hankam yang ditangani	100	84	16
Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindaklanjuti	100	90,86	9,14
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pelanggaran Perda/ Perkada	100	96,8	3,2
	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100	92,3	7,7

Sumber: Data Bagian Kesra, Bakesbangpol, dan Satpol PP

## B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan pagu anggaran, program untuk mendukung terealisasinya kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat tahun 2022 sebesar Rp. 580.000.000,00 sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar Rp. 488.344.884,00 sebesar atau 84% dengan rincian per program sebagai berikut:

**Tabel 3.47.**  
**Realisasi Anggaran Program Pendukung Persentase Pembinaan Keagamaan, Penyelesaian Potensi Konflik SARA dan Pelanggaran Perda, 2022**

No	Program	Pagu	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	%
1.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Rp. 580.000.000	Rp. 488.344.884	84
2.	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 2.127.606.700	Rp. 1.933.043.000	90,86
3.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 2.622.131.000	Rp. 2.437.142.803	92,3

Sumber: Data Bagian Kesra, Bakesbangpol, dan Satpol PP

### **MISI 1 :**

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia

### **SASARAN STRATEGIS 5 :**

Meningkatnya Toleransi Beragama, Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat

### **INDIKATOR KINERJA 7 :**

Persentase Penyelesaian Kebencanaan

---

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga

---

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, keuangan harta benda dan dampak psikologis.

Program Penanganan Bencana memberikan bantuan makanan siap saji, kepada warga yang terdampak bencana dan paket sembako kepada korban bencana. Bencana yang terjadi tahun 2022, yaitu bencana alam seperti Banjir, angin puting beliung dan kebakaran.

Indikator Persentase Penyelesaian Kebencanaan dipilih dengan maksud untuk memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat pasca bencana bagi korban bencana alam dan sosial.

Pelaksanaan penanganan bencana dilaksanakan bekerjasama dengan SKPD terkait, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan UPT Pemadam Kebakaran apabila terjadi musibah kebakaran. Capaian indikator kinerja diukur berdasarkan perhitungan **Persentase penanggulangan bencana + persentase penanganan pasca bencana dibagi 2.**

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja dengan indikator kinerja Persentase Penyelesaian Kebencanaan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.48.**  
**Realisasi Kinerja Persentase Penyelesaian Kebencanaan, 2022**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penyelesaian Kebencanaan	%	100%	100%	100%

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Banjarbaru

Indikator Persentase Penyelesaian Kebencanaan pada tahun 2022 target 100% terealisasi 100%, dikarenakan dalam penanganan korban pasca bencana



Dinas Sosial Kota Banjarbaru bekerjasama dengan anggota Tagana, relawan sosial dan elemen masyarakat.

Adapun bencana alam dan sosial yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 3.49.**  
**Bencana Alam Yang Ditangani, 2022**

No	Jenis Bencana	Jumlah (Jiwa)	Keterangan
1	Banjir	1.639	Kelurahan Sungai Tiung 152 KK, 577 jiwa (4 Juli 2022); Kelurahan Cempaka 446 KK, 1.348 jiwa (7 September 2022); Kelurahan Sungai Tiung 160 KK, 614 jiwa (7 September 2022); Kelurahan Loktabat Selatan 50 jiwa (24 September 2022); Kelurahan Kemuning 50 jiwa (24 September 2022)
2	Puting Beliung	8	Kelurahan Loktabat Selatan 3 buah rumah, 3 KK, 8 jiwa (27 Desember 2022)
3	Kebakaran	45	Kelurahan Guntung Manggis 1 rumah, 1 KK 2 jiwa (23 Januari 2022) Kelurahan Sungai Tiung 6 rumah, 7 KK 20 Jiwa (03 Pebruari 2022) Kelurahan Loktabat Selatan 1 rumah, 1 KK, 2 jiwa (28 Maret 2022) Kelurahan Kemuning 5 rumah, 5 KK, 21 jiwa (21 Agustus 2022)
4	Isoman Covid 19	751	17 s/d 28 Pebruari 2022 Kelurahan Landasan Ulin Barat 23 jiwa Kelurahan Cempaka 16 jiwa Kelurahan Sungai Ulin 107 jiwa Kelurahan Landasan Ulin Timur 50 jiwa Kelurahan Guntung Manggis 84 jiwa Kelurahan Guntung Payung 48 jiwa Kelurahan Sungai Tiung 15 jiwa Kelurahan Bangkal 16 jiwa Kelurahan Palam 23 jiwa Kelurahan Loktabat Utara 17 jiwa Kelurahan Mentaos 30 jiwa Kelurahan Kemuning 37 jiwa Kelurahan Sungai Besar 60 jiwa Kelurahan Guntung Paikat 70 jiwa Kelurahan Loktabat Selatan 80 jiwa

No	Jenis Bencana	Jumlah (Jiwa)	Keterangan
			Relawan 75 jiwa

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Banjarbaru

Indikator Persentase Penanganan Pasca Bencana yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru didukung dengan program kegiatan yaitu:

### 1. Program Penanganan Bencana

Program ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam penanganan akibat terjadi bencana alam dan sosial yang bertujuan agar kehidupan masyarakat yang mengalami bencana dapat pulih (trauma healing) sehingga diharapkan dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali.

Pada program Penanganan Bencana, terdapat 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banjarbaru, yaitu:

- a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyediaan Makanan.
- b. Kegiatan ini melaksanakan memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat pasca bencana bagi korban bencana alam dan sosial. Dan apabila terjadi musibah banjir maka akan didirikan tenda penampungan di kelurahan setempat dan membuka dapur umum lapangan yang ada pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru.
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota.
- d. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat atau relawan sosial yang dibentuk Dinas Sosial Kota Banjarbaru yaitu Taruna Siaga Bencana (TAGANA) berjumlah 28 orang. Apabila terjadi bencana alam dan sosial mereka akan turun langsung ke lokasi bencana bersama dengan BPBD dan relawan lainnya seperti TNI, Babinsa dan elemen masyarakat.

Program Penanganan Bencana melaksanakan kegiatan memberikan bantuan kepada korban pasca bencana yaitu memberikan makanan siap saji kepada korban yang terdampak bencana banjir dan paket sembako, makanan anak velbet, matras, kasur, selimut kepada korban kebakaran.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

**Tabel 3.50.**  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Kebencanaan 2 Tahun Terakhir**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penyelesaian Kebencanaan	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Banjarbaru

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD dan Target Nasional

**Tabel 3.51.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penyelesaian Kebencanaan dengan Target RPJMD dan Target Nasional**

No.	Indikator Kinerja	Kota Banjarbaru	Target RPJMD tahun 2022	Target Nasional
1.	Persentase Penyelesaian Kebencanaan	100%	100%	100%

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Banjarbaru

## 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

### Upaya-Upaya yang dilakukan:

Upaya yang dilakukan untuk merealisasikan target penanganan penyelesaian kebencanaan dengan cara:

- Mendirikan tenda di pos-pos pengungsi bekerja sama dengan BPBD dan kelurahan setempat.
- Membuka dapur umum lapangan dibantu Anggota oleh Tagana, relawan sosial seperti PMI, Perguruan Tinggi, Mahasiswa, Pramuka dan aparat.
- Membuka layanan pengaduan bagi korban yang terdampak bencana.

Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Kebencanaan dapat terlaksana didukung dengan:

- 1) Adanya Komitmen Kepala Dinas Sosial dan aparatnya dalam penanganan korban pasca bencana
- 2) Melaksanakan Koordinasi dengan SKPD terkait bantuan kebencanaan seperti BPBD Kota Banjarbaru dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3) Bekerjasama dengan aparat masing-masing Kelurahan, Kecamatan dan Babinsa.
- 4) Dibentuknya Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kota Banjarbaru
- 5) Dibentuknya Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kelurahan Sungai Tiung
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana operasional lapangan
- 7) Tersedianya buffer stok bantuan dari Kemensos RI
- 8) Tersedianya bahan makanan.

**Hambatan:**

- a. Terbatasnya persediaan buffer stock seperti bahan makanan, matras, valbet, selimut, kasur, makanan anak, tenda pengungsi handy talk).
- b. Terbatasnya relawan sosial penanganan bencana pada tiap kelurahan.
- c. Kurangnya keahlian/skill anggota Tagana dalam penanganan bencana.
- d. Kurangnya sarana prasarana yang memadai.
- e. Minimnya Anggaran penanggulangan bencana.

**Rencana Tindak Lanjut:**

- a. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penanganan kebencanaan seperti Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan BPBD Kota Banjarbaru.
- b. Bekerjasama dengan aparat Kelurahan, Kecamatan, Babinsa dan Babinkamtibmas.

- c. Penambahan Pengadaan Sarana dan Prasarana operasional lapangan terkait kebencanaan seperti tenda, matras dan valbet, kasur, selimut, sepatu boot dan Handy Talky.
- d. Penyediaan posko-posko penampungan korban pasca bencana
- e. Membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB) di tiap-tiap kecamatan.
- f. Penambahan buffer stock kebencanaan dari APBD Kota Banjarbaru.
- g. Penambahan anggaran penanggulangan bencana.

## 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan pagu anggaran Program Penanganan Bencana yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator kinerja Persentase Penyelesaian Kebencanaan Tahun 2022 sebesar **Rp. 509.813.000** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 455.314.000** atau persentase **89,31%** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.52.**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
**Penyelesaian Kebencanaan, 2022**

No.	Program	Indikator	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Program Penanganan Bencana	Persentase Penyelesaian Kebencanaan	100	89,31	10,69
	Jumlah		100	89.31	10.69

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Banjarbaru

## B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran yang tersedia pada Program Penyelesaian Kebencanaan dengan pagu Rp. 509.813.000 terealisasi Rp. 455.314.000 dengan persentase 89,31%. dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.53.**  
**Realisasi Anggaran Program Pendukung**  
**Penyelesaian Kebencanaan, 2022**

No.	Program	Pagu (Rp)	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penanganan Bencana	509.813.000	455.314.000	89,31
	Jumlah	509.813.000	455.314.000	89,31

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Banjarbaru

## **MISI 2**

:

Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

## **SASARAN STRATEGIS 6**

:

Meningkatnya Kegiatan Perekonomian Kota

## **INDIKATOR KINERJA 8**

:

Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata

---

Meningkatnya kegiatan perekonomian kota berdampak langsung terhadap pertumbuhan perekonomian diberbagai bidang, tak terkecuali bidang pariwisata. Meningkatnya kegiatan perekonomian Kota Banjarbaru berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang terekam pada usaha penyedia jasa akomodasi pariwisata yang ada di Kota Banjarbaru, serta tingginya mobilitas wisatawan yang masuk ke Kota Banjarbaru. Tentunya akan berdampak langsung menghidupkan ekosistem perekonomian masyarakat khususnya golongan masyarakat sadar wisata yang ada di Kota Banjarbaru. Hal ini tentu saja membuat sektor pariwisata berkontribusi langsung terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarbaru secara aktif.

Pengukuran capaian kinerja indikator Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata adalah nilai absolut realisasi penerimaan PAD sektor pariwisata.

---

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja sasaran meningkatnya Kegiatan Perekonomian Kota dengan indikator kinerja pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata berdasarkan target 2,50% telah terealisasi sebesar 49%. Pada Tahun 2021, PAD Sektor Pariwisata Kota Banjarbaru sebesar Rp. 31.179.311.653,94 meningkat menjadi Rp. 46.531.287.690. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja sebesar 1.960% dengan kategori sangat baik. Peningkatan pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata yang sangat signifikan ini disebabkan oleh kembalinya aktifitas pariwisata yang sempat menurun pertumbuhannya di masa pandemi covid-19.

**Tabel 3.54.**  
**Realisasi Kinerja Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata, 2022**

No	Rincian Kinerja Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Bina Wisata	%	Rp. 17.500.000,-	Rp. 17.500.000,-	100 %
2.	Pajak Restoran	%	Rp. 28.587.491.764,-	Rp. 31.466.209.530,-	110 %
3.	Pajak Hotel	%	Rp. 6.733.094.411,-	Rp. 8.540.185.691,-	127 %
4.	Pajak Hiburan Umum	%	Rp. 5.500.000.000,-	Rp. 6.507.392.469,-	118 %
TOTAL			Rp. 40.838.086.175,-	Rp. 46.531.287.690,-	114 %

Sumber: Data Disporabudpar Kota Banjarbaru

Program yang dilaksanakan untuk mencapai kinerja tersebut adalah Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Kebudayaan, dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

### 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi 2 tahun sebelumnya dimana pertumbuhan PAD sektor pariwisata meningkat, tahun 2020 adalah -7,22% dan tahun 2021 meningkat menjadi 16% dan tahun 2022 meningkat menjadi 49%.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD

Realisasi pertumbuhan PAD sektor pariwisata Pemerintah Kota Banjarbaru, terdata realisasi PAD pariwisata meningkat dari target RPJMD 2026 dengan persentase **49%** dan untuk **target nasional tidak ada**.

### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

#### **Hambatan:**

Secara umum target yang telah ditetapkan bisa tercapai. Namun pada perjalanannya ada beberapa hambatan yang dihadapi kinerja yang dicapai tidak lebih tinggi lagi antara lain:

- a. Sarana/Prasarana yang masih kurang memadai.
- b. Belum tersebar luasnya informasi tentang pariwisata di Kota Banjarbaru.
- c. Kurangnya kesadaran pelaku industri pariwisata terkait perizinan.

#### **Rencana Tindak Lanjut:**

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan PAD sektor pariwisata:

1. Melakukan peningkatan sarana prasarana terhadap Objek PAD Kota Banjarbaru Sektor Pariwisata dengan melakukan peningkatan sarana dan prasarana pendukung dengan mempertimbangkan prinsip tepat guna sehingga akan berdampak langsung terhadap kenaikan nilai pakai/sewa.
2. Melakukan promosi objek PAD sektor pariwisata dengan melakukan kegiatan promosi objek PAD sektor pariwisata dengan merangkul para duta wisata dalam skala dan pangsa pasar yang beragam dengan tujuan meningkatkan daya tarik objek PAD sektor pariwisata.
3. Dengan mengadakan pelatihan untuk pelaku usaha jasa pariwisata dan kelompok sadar wisata serta melakukan pembinaan terhadap usaha jasa pariwisata untuk mengenal kelengkapan perizinan online (OSS-RBA).



## 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Berdasarkan pagu anggaran Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, Program pemasaran pariwisata, Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator kinerja Persentase Penyelesaian Kebencanaan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.55.**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pertumbuhan PAD**  
**Sektor Pariwisata, 2022**

No.	Program	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1.	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan destinasi wisata unggulan	24%	99,18 %	-75,18
2.	Program pemasaran pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	106%	92,26 %	13,74
3.	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase kelompok sadar wisata yang dibina	87,5%	70 %	23,75
		Persentase usaha ekonomi kreatif yang dibina	100%		
4.	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	100%	88,25%	11,75
		Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kegiatan ekonomi mandiri (wirausaha)	100%		

Sumber: Data Disporabudpar Kota Banjarbaru

## B. REALISASI ANGGARAN

Total pagu anggaran program untuk mendukung terealisasinya pertumbuhan PAD sektor pariwisata tahun 2022 adalah sebesar **Rp.4.223.033.700** dengan total realisasi anggaran sebesar **Rp. 3.802.743.904** atau capaian **90,04%**.

**Tabel 3.56.**  
**Realisasi Anggaran Program Pendukung Pertumbuhan PAD**  
**Sektor Pariwisata, 2022**

No	Program	Pagu (Rp)	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	%
1	Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Rp. 302.400.000	Rp. 299.912.000	99,18%
2	Program pemasaran pariwisata	Rp. 855.374.000	Rp. 789.151.500	92,26%
3	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Rp. 179.552.000	Rp. 125.632.000	70 %
4	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Rp. 1.426.154.200	Rp. 1.258.601.235	88,25%
5	Program pengembangan kebudayaan	Rp. 984.733.500	Rp. 910.761.700	92,5 %
6	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Rp. 474.820.000	Rp. 418.685.469	88,18%
Jumlah		Rp. 4.223.033.700	Rp.3.802.743.904	90,04%

Sumber: Data Disporabudpar Kota Banjarbaru

## MISI 2

:

Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

## SASARAN STRATEGIS 6 :

Meningkatnya Kegiatan Perekonomian Kota

## INDIKATOR KINERJA 9 :

Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro, Industri Kecil dan Ekonomi Kreatif

Sasaran Meningkatkan Kegiatan Perekonomian Kota dengan indikator Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro dipilih dengan maksud untuk menggambarkan peningkatan Kegiatan Perekonomian Kota oleh pemerintah Kota Banjarbaru, dengan indikator Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro. Indikator Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro menunjukkan kemampuan pembinaan Pemerintah Kota kepada masyarakat untuk berwirausaha dan terdaftar.

Meningkatkan Kegiatan Perekonomian Kota diukur berdasarkan Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro hasil penilaian (jumlah usaha mikro tahun  $n$  dikurang jumlah usaha mikro - $n$  dibagi dengan jumlah usaha mikro - $n$  dikalikan 100.

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.57.  
Realisasi Kinerja Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro,  
Industri Kecil dan Ekonomi Kreatif, 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian/ Kategori
1.	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro, Industri Kecil dan Ekonomi Kreatif	%	4,50	4,65	103,33% (Baik Sekali)

Sumber: Data Diskop, UKM, & Naker Kota Banjarbaru

Pada Tahun 2021 jumlah Usaha Mikro yang ada di Kota Banjarbaru sebanyak **11.124 UMKM**, sedangkan Data Usaha Mikro Tahun 2022 sebanyak **11.641 UMKM**.

Adapun Usaha Mikro yang terdata dan menjadi binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru adalah sebanyak 3.899 (berdasarkan data pada aplikasi <http://siapkk.banjarbarukota.go.id>.)

Rumus dari indikator Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro yaitu: (jumlah Usaha Mikro tahun 2022 dikurang jumlah Usaha Mikro 2021 dibagi dengan jumlah Usaha Mikro 2021 dikalikan 100 Jadi capaian indikator persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro adalah  $(11.641-11.124)/11.124 \times 100\% = 4,65\%$ .

**Tabel 3.58.**  
**Rekapitulasi Data UMKM Perbidang Usaha, 2022**

NO	KECAMATAN	BIDANG								UMKM
		Kuliner	Fashion	Pendidikan	Otomotif	Agribisnis	T. Internet	Jasa	Bidang Lainnya	
1	Banjarbaru Selatan	1719	523	70	432	59	32	77	1324	4.236
2	Banjarbaru Utara	994	471	44	212	67	28	63	839	2.718
3	Cempaka	319	298	17	322	114	9	29	309	1.417
4	Landasan Ulin	485	338	1	296	312	19	43	278	1.772
5	Liang Anggang	263	329	1	332	246	9	42	276	1.498
Total Keseluruhan		3.780	1.959	133	1.594	798	97	254	3.026	11.641

Sumber: Data Diskop, UKM, & Naker Kota Banjarbaru

**Tabel 3.59.**  
**Rekapitulasi Data UMKM Perbidang Usaha, 2021**

NO	KECAMATAN	BIDANG								UMKM
		Kuliner	Fashion	Pendidikan	Otomotif	Agribisnis	T. Internet	Jasa	Bidang Lainnya	
1	Banjarbaru Selatan	1625	513	70	421	51	32	63	1289	4.064
2	Banjarbaru Utara	928	460	44	212	67	28	39	839	2.617
3	Cempaka	298	298	17	322	104	9	26	305	1.379
4	Landasan Ulin	401	338	1	296	289	19	36	266	1.646
5	Liang Anggang	232	325	1	332	225	9	36	258	1.418
Total Keseluruhan		3.484	1.934	133	1.583	736	97	200	2.957	11.124

Sumber: Data Diskop, UKM, & Naker Kota Banjarbaru

Program pendukung indikator Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro, Industri Kecil dan Ekonomi Kreatif antara lain:

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).

Capaian program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) dengan indikator persentase usaha mikro yang telah mendapatkan fasilitasi program pemberdayaan Tahun 2022 adalah 33,44% sedangkan capaian Tahun 2021 adalah 25,78%.

2. Program Pengembangan UMKM

Capaian program pengembangan UMKM dengan indikator persentase usaha mikro menjadi usaha kecil Tahun 2022 adalah 0,08% sedangkan capaian Tahun 2021 adalah 0,17%

3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Capaian program pengawasan dan pemeriksaan koperasi dengan indikator persentase koperasi yang berkualitas Tahun 2022 adalah 22,64% sedangkan capaian Tahun 2021 adalah 19,11%.

4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Capaian program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi dengan indikator persentase koperasi yang sehat Tahun 2022 adalah 3,66% sedangkan capaian Tahun 2021 adalah 1,9%.

5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Capaian program pendidikan dan latihan perkoperasian dengan indikator persentase pengurus dan pengawas yang telah membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatannya Tahun 2022 adalah 24,06% sedangkan capaian Tahun 2021 adalah 19,60%.

6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Capaian program pemberdayaan dan perlindungan koperasi dengan indikator persentase kenaikan omset koperasi yang terfasilitasi dengan mitra koperasi pada tahun n Tahun 2022 adalah 233,54% sedangkan capaian Tahun 2021 adalah 273%.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

**Tabel 3.60.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro, Industri Kecil dan Ekonomi Kreatif, 2020-2022**

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022
		Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian
1.	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro, Industri Kecil dan Ekonomi Kreatif	-0,67% 100%	10,68% 356%	4,65% 103,33%

Sumber: Data Diskop, UKM, & Naker Kota Banjarbaru

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD

Realisasi kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebagai berikut:

**Tabel 3.61.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro, Industri Kecil dan Ekonomi Kreatif dengan Target RPJMD**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target RPJMD
1.	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro, Industri Kecil dan Ekonomi Kreatif	4,65%	6,50%

Sumber: Data Diskop, UKM, & Naker Kota Banjarbaru

Realisasi kinerja indikator “Pertumbuhan UMKM” tahun 2022 adalah **4,65%** sedangkan target RPJMD yang berakhir tahun 2026 adalah **6,5%**, kondisi ini masih memperlihatkan bahwa realisasi kinerja belum mencapai target RPJMD. Dan untuk **target nasional tidak ada**.

## 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

**Upaya yang telah dilakukan:**

- 1) Selama tahun 2022, Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru telah melaksanakan kegiatan sosialisasi, praktik, dan pendampingan meliputi aspek legalitas, perizinan, inovasi produk melalui praktik pengolahan

produk, packaging/kemasan, foto produk, pemasaran digital serta pembukuan sederhana.

2) Pendampingan dari hulu ke hilir ini merupakan solusi dari permasalahan yang sering dialami oleh UMKM di Kota Banjarbaru.

a. Melaksanakan sosialisasi perizinan

Perizinan berusaha merupakan salah satu aspek penting dalam memulai usaha. Dengan memiliki izin usaha, pelaku usaha dapat menjalankan operasional bisnis secara aman dan nyaman sehingga tidak perlu khawatir terhadap ancaman-ancaman lain yang kerap menimpa usaha yang tidak memiliki perizinan seperti penertiban maupun pembongkaran. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru melaksanakan Sosialisasi Perizinan berusaha dan Pendataan berkolaborasi dengan DPM PTS Kota Banjarbaru.

b. Melaksanakan praktik/pelatihan kemasan

Dengan Ditetapkannya Kota Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan tentunya memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan diberbagai sektor, salah satunya adalah sektor UMKM. Persaingan dalam Dunia Bisnis yang semakin Ketat, membuat para pelaku usaha mencari strategi yang tepat untuk memasarkan produknya, salah satu kendala yang dihadapi UMKM adalah minimnya pengetahuan mengenai kemasan yang merupakan salah satu hal penting dalam menarik minat konsumen untuk membeli suatu produk.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan juga pengendalian inflasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru melaksanakan kegiatan Praktik Pengemasan Produk untuk memberikan pengetahuan tentang cara yang baik dan benar dalam pengemasan dan pelabelan suatu produk.

c. Melaksanakan praktik/pelatihan foto produk

UMKM telah memberikan kontribusi yang besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat Indonesia. Karena itu, pemberdayaan dan pengembangan yang berkelanjutan perlu dilakukan agar UMKM tidak hanya tumbuh dari aspek jumlah semata, tetapi juga dalam aspek kualitas dan daya saing produk beserta brandnya. Salah satu pembentuk daya saing dari sebuah brand UMKM adalah bagaimana brand tersebut terekam dalam foto produk, yang biasanya dipajang dalam etalase digital di media sosial berupa Instagram atau *marketplace* lainnya.

Di era digital saat ini, UMKM dituntut untuk berperan aktif dalam memasarkan hasil produk secara *online*. Para UMKM membutuhkan kemampuan untuk dapat menampilkan produknya agar lebih menarik untuk itu Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru melaksanakan pelatihan Foto Produk.

d. Pembukuan sederhana

Pembukuan sederhana merupakan hal penting yang perlu dilakukan dalam menjalankan sebuah bisnis atau usaha baik dalam skala kecil maupun besar. Pembukuan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana laporan keuangan bisnis sekaligus mengukur apakah bisnis yang dijalankan berkembang atau tidak.

Menjalankan sebuah bisnis memang diperlukan ketelitian bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Dengan membuat pembukuan usaha seperti ini, akan memudahkan pemilik usaha untuk mengontrol arus keuangan sehingga bisa meminimalisir risiko akan adanya masalah keuangan di masa mendatang.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru mengupayakan para UMKM memiliki kemampuan dalam Menyusun pembukuan sederhana melalui pelatihan Pembukuan Sederhana.



e. Pemasaran digital

Seiring kemajuan teknologi, kebutuhan dan cara manusia dalam melakukan suatu hal berubah, termasuk pada teknik pemasaran. Jika dahulu cara pemasaran dilakukan dengan konvensional seperti menyebar selebaran, memasang iklan di televisi atau radio dan sejenisnya, sekarang proses pemasaran sudah memasuki fase baru yang memanfaatkan teknologi melalui pemasaran digital atau digital marketing.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru mendukung Digitalisasi para UMKM agar dapat bersaing pada kemajuan digital saat ini. Hal ini didukung dengan dilaksanakannya pelatihan Pemasaran Digital.

f. Pemberian Fasilitas Halal dan HAKI

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan adalah kegiatan yang terdapat dalam Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Untuk itu, Pemerintah melakukan berbagai upaya pengembangan produktivitas dan daya saing UMKM melalui pemberian berbagai kemudahan untuk pengembangan usahanya, Bahwa Undang-Undang Cipta Kerja mengamanatkan tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM melalui pengelolaan terpadu UMKM, partisipasi UMKM dalam infrastruktur publik, kemudahan perizinan berusaha, layanan bantuan dan pendampingan hukum, kemudahan fasilitasi pembiayaan dan insentif fiskal, dan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem/aplikasi pembukuan. Dengan harapan bahwa semua kemudahan tersebut dapat mendorong tumbuhnya UMKM di Indonesia yang akan

berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Mengingat arti penting Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan.

Berdasarkan hal tersebut Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru telah mengambil langkah dengan memberikan berbagai kegiatan yang bertujuan dalam rangka pengembangan UMKM serta pemberian Fasilitas Pengurusan Sertifikat Halal Produk UMKM dan Fasilitas Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

g. Kemitraan

Menjalin kerjasama bisnis atau kemitraan sudah lama menjadi program terobosan untuk memperluas jaringan usaha guna mendapatkan berbagai manfaat yang saling mendukung untuk kepentingan usahanya masing-masing dari kedua belah pihak yang melakukan kerjasama bisnis, baik kerjasama manajemen, pembiayaan, pemasaran maupun kerjasama merger usaha yang saling memberi penguatan dari berbagai sektor usaha tentunya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru memfasilitasi para UMKM agar dapat bermitra dengan dilaksanakannya sosialisasi kemitraan bersama swalayan lokal Pinus dan pasar modern *Alfamart*.

h. Pemberian stimulus Ekonomi

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa stimulus Perekonomian Daerah untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan menengah (KUMKM) di Daerah, dalam hal ini KUMKM di Kota

Banjarbaru. Bahwa program stimulus tersebut diberikan sebagai salah satu dukungan dalam rangka mensukseskan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Banjarbaru.

Bahwa sesuai Peraturan Walikota Banjarbaru nomor 35 tahun 2021 Tentang Pemberian Stimulus Perekonomian Daerah Sebagai Langkah Kebijakan Mengatasi Krisis Akibat Dampak Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Untuk Koperasi Dan Usaha Mikro, disebutkan dalam perwali, bentuk stimulus yang diberikan berupa pemberian Subsidi Bunga dan Gratis Ongkos Kirim Produk KUMKM.

i. Melaksanakan promosi

Salah satu strategi promosi yang sering digunakan untuk mengenalkan produk yaitu dengan mengikuti pameran. Pameran merupakan ajang untuk mengenalkan produk dan meningkatkan penjualan dengan menjaring konsumen sebanyak-banyaknya.

Berkembangnya Event pameran yang diadakan pemerintah maupun berbagai perusahaan, memberikan keuntungan besar bagi para UMKM. Sebagian besar UMKM mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya, selain itu ketatnya persaingan bisnis juga memaksa mereka untuk mempromosikan bisnisnya ke pasar. Dengan adanya pameran, para UMKM dapat mempromosikan produk mereka langsung dengan terjun langsung melihat peluang pasar bagi produk mereka.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru memberikan kesempatan kepada para UMKM untuk mempromosikan produk mereka pada pameran yang diikuti oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru diantaranya Pameran Kementerian Kelautan Bangsa Produk Buatan Indonesia Di Siring Banjarmasin, Pameran Apeksi di

Kota Padang, Gelar Produk Di Area *Car Free Day* Gubernurnuran, MTQ Nasional di Alun-Alun Martapura dengan menjadi juara 2 stand terbaik.

**Hambatan:**

- a. Pemberian Subsidi bunga;
- b. Adanya kebijakan perbankan yang tidak mengizinkan UMKM/ pelaku usaha untuk mengajukan KUR jika telah menggunakan fasilitas serupa di Bank lain.

**Rencana Tindak Lanjut:**

- a. Meningkatkan pemasaran produk secara online dan stimulus ekonomi melalui program gratis ongkir untuk semua produk UMKM.
- b. Pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan potensi dan peluang usaha mikro.
- c. Memberikan stimulus ekonomi melalui pinjaman tanpa bunga dan jaminan bekerjasama dengan Bank Kalsel.
- d. Mengikutkan event promosi dalam dan luar provinsi.
- e. Fasilitasi sertifikasi halal produk makanan minuman dan hak kekayaan intelektual untuk merk produk UMKM.

**5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**Tabel 3.62.**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro, Industri Kecil dan Ekonomi Kreatif, 2022**

No	Program	Indikator	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang telah mendapatkan fasilitasi program pemberdayaan	117,17	87,33	12,67

No	Program	Indikator	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
2.	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	27,59	33,62	-
3.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang berkualitas	115,45	99,59	0,41
4.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi yang sehat	140,77	99,32	0,68
5.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengurus dan pengawas yang telah membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatannya	123,38	77,56	22,44
6.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase kenaikan omset koperasi yang terfasilitasi dengan mitra koperasi pada tahun n	3892,33	92,85	7,15

Sumber: Data Diskop, UKM, & Naker Kota Banjarbaru

## B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan pagu anggaran program untuk mendukung terealisasinya sasaran Meningkatnya Kegiatan Perekonomian Kota tahun 2022 sebesar Rp.2.369.431.000,00 sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar Rp. 1.750.780.641,00 sebesar atau 73,89% dengan rincian per program sebagai berikut:

**Tabel 3.63.**  
**Realisasi Anggaran Program Pendukung Persentase Pertumbuhan**  
**Pelaku Usaha Mikro, Industri Kecil dan Ekonomi Kreatif, 2022**

No	Program	Pagu	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.166.401.000	1.018.627.795	87,33
2.	Program Pengembangan UMKM	560.850.000	188.536.146	33,62
3.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	85.000.000	84.650.000	99,59
4.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	52.980.000	52.620.500	99,32
5.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	404.200.000	31.3493.000	77,56
6.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	100.000.000	92.853.200	92,85
Jumlah		2.369.431.000	1.750.780.641	73,89

Sumber: Data Diskop, UKM, & Naker Kota Banjarbaru

**MISI 2 :**

Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

**SASARAN STRATEGIS 7 :**

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Nilai Investasi Daerah

**INDIKATOR KINERJA 10 :**

Persentase Peningkatan PAD

---

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Banjarbaru dalam meningkatkan penerimaan asli daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Indikator sasaran adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan peningkatan jumlah pendapatan yang diperoleh berdasarkan akumulasi penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun berjalan. Pengukuran capaian

---

kinerja indikator peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah nilai absolut realisasi penerimaan PAD.

## **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan target yaitu **Rp. 251.128.912.750** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 293.750.948.335,36**. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja sebesar **116,97%**. Keseluruhan realisasi penerimaan PAD melebihi target dari yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya PAD Kota Banjarbaru menurun sebesar 9%.

Program yang berkontribusi dalam pencapaian kinerja di atas adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

### **2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir**

Perbandingan realisasi tahun sebelumnya dimana capaian kinerja selalu melebihi target, capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar **125,08%**, tahun 2021 sebesar **122,86%** dan tahun 2022 sebesar **116,97%**.

### **3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD dan Target Nasional**

Realisasi Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 167 dan tercapai 170,7% sedangkan untuk **target Nasional tidak ada**.

### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

**Upaya yang Telah Dilakukan:**

- a. Melakukan pemuthakiran data dan pendataan ulang terhadap wajib pajak

- dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah.
- b. Melakukan pemasangan alat perekam transaksi.
  - c. Pengembangan pelayanan pajak online.
  - d. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah.
  - e. Meningkatkan manajemen pengelolaan pajak daerah.
  - f. Meningkatkan Sumber daya manusia pada aparaturnya pajak daerah dan Wajib Pajak.
  - g. Melakukan penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan monitoring terhadap wajib pajak dan calon wajib Pajak.

**Hambatan:**

- a. Kurang optimalnya penagihan/koordinasi dengan Wajib Pajak yang berdomisili di luar daerah;
- b. Pemungutan pajak belum mencerminkan nilai riil sesungguhnya karena transaksi pembayaran tidak semua transaksi menggunakan bukti bayar;
- c. Kurang jujur Wajib Pajak melaporkan hasil usahanya;
- d. Kurangnya monitoring dan pengawasan terhadap wajib pajak khususnya wajib pajak yang dipasang alat perekam transaksi online (tapping box, cro, tapping printer)
- e. Kegiatan sosialisasi penyuluhan belum maksimal dan tepat sasaran terhadap Wajib Pajak khususnya calon Wajib Pajak baru yang baru membuka usaha.
- f. Penegakan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak masih belum tegas karena aturan yang mengatur pemberian sanksi belum bisa mengakomodir BPPRD melakukan tindakan penutupan kepada Wajib Pajak yang melanggar.
- g. Objek pajak reklame banyak yang terpasang dahulu dan baru dibayarkan setelah di tagihkan;



- h. Kurangnya kolaborasi serta kerjasama dengan aparaturnya kecamatan dan kelurahan dalam hal penyampaian SPPT PBB-P2 dan pemutakhiran data.

#### **Rencana Tindak Lanjut:**

- a. Ekstensifikasi Pendapatan Pajak Daerah

Ekstensifikasi pendapatan pajak daerah dapat dilakukan dengan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjangkauan Wajib Pajak Daerah atau Wajib Retribusi Daerah baru. Untuk menarik minat yang mendaftar menjadi Wajib Pajak daerah diperlukan kemudahan dalam pendaftaran salah satunya bisa melalui sistem daring.

- b. Intensifikasi Pendapatan Pajak Daerah

Intensifikasi pendapatan pajak daerah dapat dilakukan dengan optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah serta optimalisasi penerimaan dari piutang. Salah satu kunci untuk mencapai potensi pajak daerah yaitu melalui pemutakhiran atau validasi data pajak daerah. Validasi data pajak daerah dapat dilakukan dengan pengecekan di lapangan secara bertahap apakah data wajib pajak masih sama atau sudah berubah. Jika terdapat perubahan perlu penyesuaian pada basis data. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) perlu dilakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar tidak terlalu jauh dari nilai pasar yang ada.

Piutang Pajak Daerah merupakan salah satu permasalahan yang harus dapat diselesaikan dan akan menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan verifikasi dan validasi data piutang pajak kepada seluruh objek pajak daerah untuk memastikan kebenaran data piutang yang dapat ditagih, khususnya data piutang PBB-P2 yang selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, untuk piutang pajak daerah yang sudah kadaluarsa dapat dilakukan penghapusan sesuai peraturan perundang-undangan melalui ketetapan kepala daerah.

c. Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam optimalisasi penerimaan daerah. Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), modernisasi administrasi perpajakan daerah serta penyederhanaan proses bisnis.

Kendala yang dihadapi saat ini yaitu kurangnya SDM yang memiliki keahlian di bidang perpajakan khususnya penilai pajak dan juru sita. Peningkatan wawasan SDM melalui penyertaan aparat dalam setiap Diklat, Workshop, Focus Group Discussion (FGD) dan forum-forum lainnya.

Modernisasi sistem aplikasi serta administrasi perpajakan daerah melalui penguatan mekanisme pemungutan pajak daerah yang dimulai dari pendataan, pendaftaran, pembayaran, pengawasan, penagihan hingga pemeriksaan. Selain itu pemungutan perpajakan dilakukan melalui pendekatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah dan kerjasama dengan instansi terkait antara lain Badan Pertanahan Nasional dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk sinergi pengelolaan PBB P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru, Kejaksaan Negeri untuk pendampingan dalam penagihan pajak daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk sinergi perizinan dan integrasi sistem informasi.

## 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.64.**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Persentase Peningkatan PAD, 2022**

No	Program	Indikator	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Efisiensi
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	109,94	92,10	17,84
		Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah	113,04	92,10	20,94
		Rasio PAD terhadap APBD Deviasi	30,59	92,10	- 61,51
		Realisasi PAD terhadap APBD	89,02	92,10	-3,08

Sumber: Data DPPRD Kota Banjarbaru

### B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran program untuk mendukung terealisasinya IKU Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.65.**  
**Realisasi Anggaran Program Pendukung Persentase Peningkatan PAD, 2022**

No	Program	Pagu (Rp)	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.277.967.250	3.939.999.214	92,1
	Jumlah	4.277.967.250	3.939.999.214	92,1

Sumber: Data DPPRD Kota Banjarbaru

**MISI 2**

:

Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

**SASARAN STRATEGIS 7** :

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Nilai Investasi Daerah

**INDIKATOR KINERJA 11** :

Peningkatan Investasi Daerah (Milyar)

---

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.

Tantangan pembangunan penanaman modal/investasi yang nyata dihadapi pada masa yang akan datang adalah tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang dihasilkan dari kegiatan sektor ekonomi atau investasi yang harus diikuti dengan pelayanan yang semakin baik. Sementara ketersediaan lahan peruntukan investasi sektor riil terutama perdagangan dan jasa, industri dan perumahan/properti akan semakin terbatas, bersaing dengan upaya mempertahankan kemampuan kecukupan dan ketahanan pangan yang juga membutuhkan lahan yang cukup. Sedangkan tantangan pelayanan terpadu yang nyata adalah semakin meningkatnya keinginan dunia usaha atas pelayanan yang semakin cepat, mudah, murah, praktis, pasti dan transparan sedangkan regulasi dan kemampuan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta sistem pelayanan yang masih sangat terbatas. Tantangan tersebut tentu tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi dan peradaban yang semakin maju, yang saat ini dikuasai oleh teknologi informasi yang serba digital.

Hal-hal tersebut diatas berimplikasi terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Pemerintah Kota Banjarbaru untuk memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan penanaman modal/ investasi dan pelayanan terpadu satu pintu 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perlu ditetapkan indikator sasaran. Memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru merumuskan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi yaitu meningkatnya nilai investasi daerah.

**Tabel 3.66.**  
**Data Realisasi Peningkatan Investasi Daerah, 2021-2022**

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	% Peningkatan Investasi Daerah
1	Nilai Investasi Daerah	146.755.600.000	645.930.580.000	340,14%

Jumlah investasi tahun n dikurangi jumlah investasi tahun n-1:  
*Peningkatan Investasi Daerah* =  $n - (n - 1)$

$$\begin{aligned} \text{Peningkatan Investasi Daerah} \\ = \text{Rp. 645.930.580.000} - \text{Rp. 146.755.600.000} \end{aligned}$$

$$\text{Peningkatan Investasi Daerah} = \text{Rp. 499.174.980.000}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui bahwa jumlah peningkatan investasi daerah sebesar Rp. 499.174.980.000 dengan persentase sebesar 340.14%.

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

**Tabel 3.67.**  
**Realisasi Kinerja Peningkatan Investasi Daerah, 2022**

No	Program	Uraian	2022
1	Program Pengembangan Iklim Pengembangan Modal	Nilai Realisasi Investasi	Rp. 645.930.580.000
2	Program Promosi Penanaman	Jumlah Investor Baru	33 Investor

No	Program	Uraian	2022
	Modal		
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penanaman Modal yang Melaksanakan Kegiatan Investasi Sesuai Ketentuan	60,98%
4	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data Terbaru ( <i>up to date</i> )	100%

Sumber: Data DPMPTSP Kota Banjarbaru

**Gambar 3.6.**  
**Peringkat Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor, 2022**

PMA			PMDN		
	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)		Proyek	Investasi (Rp. Juta)
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	4	8.540,9	Pertambangan	10	210.649,4
Industri Kimia Dan Farmasi	2	2.053,2	Perdagangan dan Reparasi	103	112.369,2
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	1	1.834,7	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	11	100.263,7
Perdagangan dan Reparasi	3	21,9	Jasa Lainnya	21	27.923,4
Hotel dan Restoran	1	0,0	Hotel dan Restoran	11	5.971,1
Jasa Lainnya	3	0,0	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	5	4.614,5
Industri Makanan	3	0,0	Konstruksi	3	1.635,1
Pertambangan	1	0,0	Industri Makanan	5	1.486,6
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>12.450,7</b>	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	2	1.120,0
			Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	1	818,8
			Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	2	411,2
			Kehutanan	1	0,0
			Industri Kayu	1	0,0
			Industri Kimia Dan Farmasi	1	0,0
			Industri Karet dan Plastik	2	0,0
			Industri Mineral Non Logam	1	0,0
			<b>Total</b>	<b>180</b>	<b>467.263,0</b>

Sumber: Data DPMPTSP Kota Banjarbaru

	Nilai Realisasi Investasi (US\$)	Nilai Realisasi Investasi (Rupiah)
<b>PMA</b>	US\$ 12.450.700 *	Rp. 178.667.580.000
<b>PMDN</b>		Rp. 467.263.000.000
<b>TOTAL</b>		Rp. 645.930.580.000

\*Kurs: Rp. 14.350

Realisasi Nilai Investasi Daerah Kota Banjarbaru berhasil melampaui target yang telah ditentukan di RPJMD sebesar 4%, dimana nilai tersebut meningkat dari sebelumnya pada tahun 2021 sebesar Rp. 146.755.600.000 menjadi Rp. 645.930.580.000 pada tahun 2022 atau sebesar 340,14%.

Peningkatan pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata yang sangat signifikan ini disebabkan oleh kembalinya aktifitas pariwisata yang sempat menurun pertumbuhannya di masa pandemi covid-19.

Berkenaan sasaran strategis Pemerintah Kota Banjarbaru untuk peningkatan investasi daerah ada beberapa program yang dilaksanakan, antara lain:

**a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Capaian program pengembangan iklim penanaman modal yaitu meningkatnya nilai realisasi investasi dengan indikator keluaran jumlah kebijakan daerah tentang pemberian insentif yang ditetapkan, jumlah kajian peta potensi investasi dan peluang usaha dan jumlah rencana umum penanaman modal yang tersusun. Kegiatan Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota merupakan pelaksanaan tupoksi Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal yang merupakan bagian dari Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Pelaksanaan kegiatan Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota merupakan cara yang efektif untuk menarik minat investor agar mau melakukan investasi di Kota Banjarbaru sehingga menyebabkan peningkatan Nilai Realisasi investasi yang merupakan indikator dari tercapainya Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

**Tabel 3.68.**  
**Data Nilai Realisasi Investasi, 2020-2022**

No	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Rp. 88.715.880.000	Rp. 146.755.600.000	Rp. 645.930.580.000

Sumber: Data DPMPTSP Kota Banjarbaru

Untuk tahun 2022 Nilai Realisasi Investasi ditargetkan sebesar Rp. 130.000.000.000 (Seratus tiga puluh milyar rupiah) dan realisasi sebesar Rp.

645.930.580.000 (Enam ratus empat puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) Terdapat peningkatan Nilai Realisasi Investasi yaitu sebesar 496,86 % dari target tahun 2022, hal tersebut diakibatkan oleh Adanya perubahan sistem OSS RBA yang mengintegrasikan system pelaporan dengan system perizinan sehingga memudahkan investor untuk melaporkan realisasi investasi, Adanya Peningkatan pengawasan DPMPTSP Kota Banjarbaru kepada perusahaan yang belum pernah melaporkan realisasi investasinya dan Semakin membaiknya iklim investasi setelah pandemi covid 19, sehingga para investor asing (PMA) meningkatkan penanaman modalnya di Kota Banjarbaru.

#### **b. Program Promosi Penanaman Modal**

Capaian program promosi penanaman modal yaitu meningkatnya investor baru dengan indikator keluaran jumlah dokumentasi hasil kegiatan promosi penanaman modal kab/kota dan hasil peningkatan penyelenggaraan promosi penanaman modal. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan TUPOKSI Bidang Perencanaan Iklim dan Promosi Penanaman Modal yang merupakan bagian dari Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal merupakan salah satu cara mempromosikan daerah untuk meningkatkan daya jual suatu daerah kepada calon investor agar tertarik untuk berinvestasi.

**Tabel 3.69.**  
**Data Realisasi Investor, 2020-2022**

No.	2020	2021	2022
1	18 Investor	22 Investor	33 Investor

Sumber: Data DPMPTSP Kota Banjarbaru

Untuk tahun 2022 target investor sebanyak 22 investor dan realisasi sebanyak 33 investor. Terdapat peningkatan jumlah investor dari tahun ke



tahun yaitu persentase kenaikan jumlah investor tahun 2022 sebanyak 50% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Letak strategis posisi Kota Banjarbaru yang berada di tengah jalur lintasan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Infrastruktur dan Kawasan di Kota Banjarbaru sudah tertata dengan baik.
- c. Memiliki Kawasan/lahan yang bisa dikembangkan.
- d. Banjarbaru telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan.
- e. Kota dengan Indeks Pembangunan Manusia (IKM) tertinggi Se Kalimantan Selatan.
- f. Keberadaan Bandara Syamsudin Noor yang ada di Banjarbaru dan dekat dengan Pelabuhan peti kemas dan penumpang trisakti.

**c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Capaian program pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan indikator persentase penanaman modal yang melaksanakan kegiatan investasi sesuai ketentuan. Keluaran dari program ini adalah berupa jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dengan hasil yaitu peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal merupakan pelaksanaan TUPOKSI Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Pelaksanaan kegiatan pengendalian penanaman modal ditujukan agar penanam modal melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Tabel 3.70.**  
**Data Pencapaian Penanam Modal yang Melaksanakan**  
**Kegiatan Investasi Sesuai Ketentuan, 2022**

Tahun 2022	Target	Realisasi
	77,00%	60,98%

Sumber: Data DPMPTSP Kota Banjarbaru

Dari tabel di atas, dari target yang ada sebanyak 77,00%, pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan investasi sesuai ketentuan dalam artian melaporkan LKPM setiap semester maupun triwulan hanya sebanyak 60,98%. Hal ini disebabkan karena:

- 1) Belum optimalnya penyampaian informasi kepada pelaku usaha.
- 2) Sebagian besar perusahaan cabang tidak diberikan akses oleh perusahaan pusat dalam akun perizinan berusaha.

#### **d. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota yang terwujud dalam program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal juga terdiri dari salah satunya sub kegiatan pengelolaan, penyajian, pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Kegiatan ini menghasilkan tersedianya dokumen data perizinan terbaru (*up to date*) untuk diolah, dikaji, dan dimanfaatkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Banjarbaru. Adapun hasil dari kegiatan diharapkan:

- 1) Dokumen data perizinan.
- 2) Sasaran dari terlaksananya kegiatan ini adalah meningkatnya mutu pelayanan dan terpenuhinya harapan masyarakat dalam rangka pengurusan perizinan di Kota Banjarbaru.

- 3) Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bermutu dan berkarakter dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dengan target Banjarbaru berkarakter, Banjarbaru melayani, Banjarbaru bisa bisa sesuai visi dan misi Wali Kota Banjarbaru.

Metode yang digunakan dalam memperoleh data tersebut dengan mengambil secara langsung melalui aplikasi perizinan Intan bjb serta dari sistem Online Single Submission (OSS) dan SIMBG.

**Tabel 3.71.**  
**Persentase Pengolahan Data dan Sistem Informasi**

<b>Tahun 2022</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
	100%	100%

Sumber: Data DPMPTSP Kota Banjarbaru

Berdasarkan tabel di atas, proses pengolahan data dan sistem informasi dapat dilaksanakan sesuai target dan telah tercapai 100% sampai akhir tahun 2022.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

**Tabel 3.72.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Peningkatan Investasi Daerah  
2 Tahun Terakhir**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp. 146.755.600.000	Rp. 645.930.580.000
2	Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Investor Baru	Jumlah Investor Baru	22 Investor	33 Investor
3	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penanaman Modal Yang Melaksanakan Kegiatan Investasi Sesuai Ketentuan	-	60,98%
4	Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan	Persentase Pengelolaan Data Dan	100%	100%

No	Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022
	Penanaman Modal	Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Sistem Informasi Penanaman Modal		

Sumber: Data DPMPTSP Kota Banjarbaru

Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2020 tidak ada datanya karena IKU Nilai Investasi Daerah belum dipergunakan untuk IKU Kota. Pada pelaksanaannya, pada tahun 2019 dan 2020 perhitungan investasi masih menggunakan **Rencana Investasi**, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 telah menggunakan **Realisasi Investasi**.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD dan Target Nasional

**Tabel 3.73.**  
Perbandingan Realisasi Kinerja Peningkatan Investasi Daerah dengan Target RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator Kinerja	Pemko Banjarbaru 2022	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional (Provinsi)
1.	Peningkatan Investasi Daerah	Rp. 645.930.580.000	Rp. 112.254.649.398	Rp. 216.600.000.000

Sumber: Data DPMPTSP Kota Banjarbaru

### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

#### Upaya yang telah dilakukan:

- Membuat kajian mengenai peta potensi investasi di wilayah kota banjarbaru, sehingga dapat memberikan gambaran dan informasi kepada investor mengenai potensi investasi yang ada di kota banjarbaru dan juga mengakomodasi potensi unggulan daerah yang dapat dijadikan peluang daerah nya dalam menarik minat investasi.
- Melakukan pembuatan video promosi investasi, mengadakan dan mengikuti pameran promosi investasi, menyusun bahan promosi, mengadakan sosialisasi promosi investasi, mendorong terjalannya kemitraan investasi, dan melakukan promosi lewat website sipelangi yang

di dalamnya terdapat sarana informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh investor.

- c. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko dengan mengutamakan materi seputar pelaporan lkpm. Selain itu dilakukan juga kegiatan pengawasan kepada pelaku-pelaku usaha yang belum melaporkan LKPM.
- d. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang mengelola data & memastikan penarikan data dilakukan setiap bulan dengan akurat.

**Hambatan:**

- a. Masih ditemukan banyaknya pelaku usaha yang belum menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga berpengaruh pada capaian nilai realisasi investasi.
- b. Adanya pandemi covid serta pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (ppkm) mengakibatkan tidak terealisasinya kegiatan promosi seperti FGD, sosialisasi serta pameran.
- c. Alamat kantor dari pelaku usaha yang kadang tidak sesuai dengan data perizinannya, kurangnya kesadaran dari pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan usahanya, tidak hadirnya pelaku usaha dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan, dan kurangnya sdm dalam melaksanakan kegiatan.
- d. Gangguan pada sistem pusat (OSS dan SIMBG) sehingga penarikan data dapat tertunda hingga sistem dapat diakses kembali.

**Rencana Tindak Lanjut:**

- a. Melakukan sosialisasi/bimtek mengenai tata cara pengisian LKPM melalui sistem OSS sehingga para pelaku usaha mengerti dan paham mengenai hal tersebut.
- b. Melakukan kegiatan promosi dengan media digital.

- c. Melakukan penyusunan potensi investasi sebagai bahan untuk promosi
- d. Membuat jadwal kegiatan yang lebih terorganisir, membuat draft informasi yang lebih lengkap serta mudah dipahami.
- e. Melaporkan ke Help Desk masing-masing sistem pusat tersebut (OSS dan SIMBG).

## 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah berhubungan erat dengan produktifitas, pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisiensi apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang minimal.

**Tabel 3.74.**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Peningkatan**  
**Investasi Daerah, 2022**

No	Program	Indikator	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Program Pengembangan Iklim Pengembangan Modal	Nilai realisasi investasi	496,86	93,58	403,28
2	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor baru	137,5	93	44,5
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penanaman modal yang melaksanakan kegiatan investasi sesuai ketentuan	60,98	66,8	-5,82
4	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal	100	99,6	0,4

Sumber: Data DPMPSTP Kota Banjarbaru

## B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.75.  
Realisasi Anggaran Program Pendukung  
Peningkatan Investasi Daerah, 2022

No	Program	Pagu (Rp)	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	%
1	Program Pengembangan Iklim Pengembangan Modal	185.000.000	173.118.900	93.58
2	Program Promosi Penanaman Modal	354.040.000	329.840.160	93.2
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	369.695.000	246.883.496	66.8
4	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	235.400.000	234.400.000	99.6

Sumber: Data DPMPTSP Kota Banjarbaru

### MISI 2 :

Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

### SASARAN STRATEGIS 8 :

Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran

### INDIKATOR KINERJA 12 :

Angka Kemiskinan

---

---

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Angka Kemiskinan adalah jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan yang ditetapkan berdasarkan harga barang makanan dan non makanan. Indikator kinerja angka kemiskinan dipilih dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar penduduk yang masih memiliki kesejahteraan yang rendah. Capaian indikator kinerja angka kemiskinan diukur

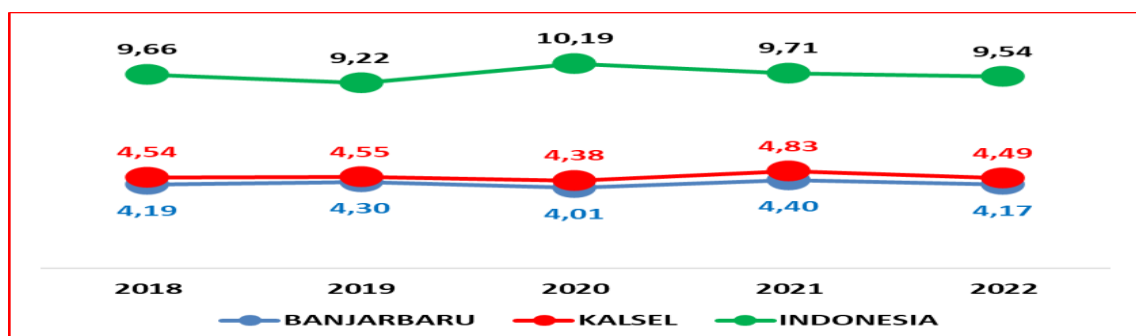
---

berdasarkan perhitungan Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah seluruh penduduk dikali 100%.

### Persentase Angka Kemiskinan

Persentase kemiskinan adalah ukuran persentase penduduk miskin terhadap total penduduk suatu wilayah. Perkembangan presentase penduduk miskin di Kota Banjarbaru selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 selalu mengalami tren yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin di Kota Banjarbaru adalah sebesar 4,19%, meningkat 0,11 poin menjadi 4,30% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 sempat turun signifikan sebesar 0,29 poin menjadi sebesar 4,01%, namun pada tahun 2021 kembali meningkat sebesar 0,39 poin menjadi 4,40%. Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,23 poin menjadi sebesar 4,17%. Selama rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir, persentase penduduk miskin Kota Banjarbaru selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Selatan dan Indonesia. Secara lengkap perbandingannya dapat dilihat sebagaimana tersaji pada grafik di bawah ini.

Gambar 3.7. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Indonesia, 2018-2022



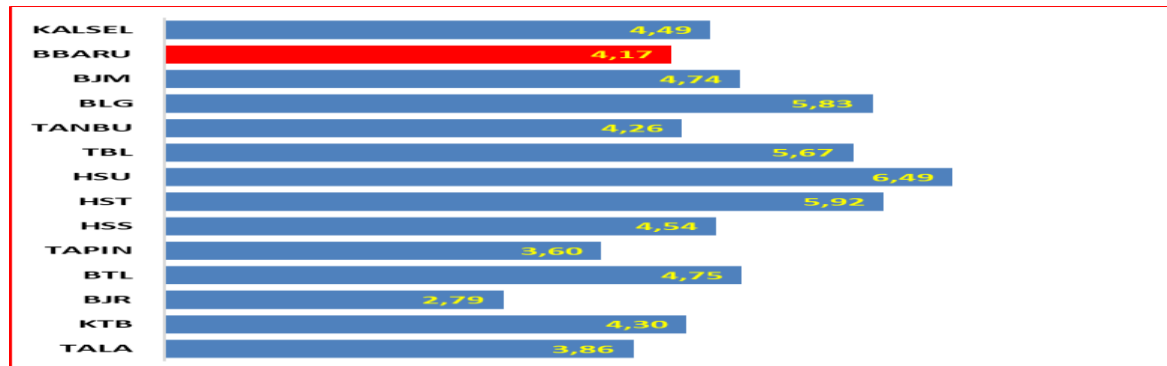
Sumber : BPS Kota Banjarbaru

Berdasarkan data BPS (per September 2022), Kota Banjarbaru merupakan daerah dengan **peringkat ke-4** dengan persentase penduduk miskin terendah diantara Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Selatan setelah Kabupaten Banjar (2,79%), Kabupaten Tapin (3,60%), dan Kabupaten Tanah Laut (3,86%).



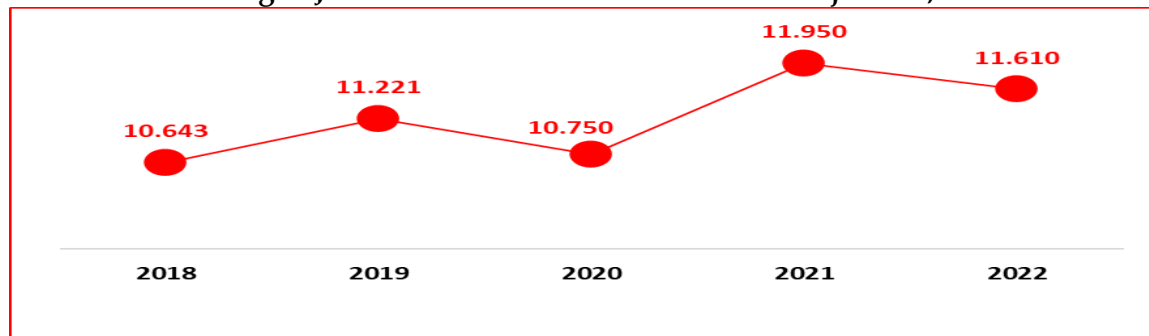
Perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota se- Kalimantan Selatan tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana tersaji pada grafik di bawah ini.

**Gambar 3.8.**  
**Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2022**



rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 selalu berfluktuasi. Secara kumulatif, jumlah penduduk miskin di Kota Banjarbaru meningkat sebanyak 967 jiwa dari sebanyak 10.643 jiwa pada tahun 2018 menjadi sebanyak 11.610 jiwa pada tahun 2022 yang berarti terjadi peningkatan rata-rata sebanyak 193,4 jiwa setiap tahun. Perkembangan jumlah penduduk miskin Kota Banjarbaru selama rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat sebagaimana grafik berikut ini.

**Gambar 3.9.**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Banjarbaru, 2018-2022**

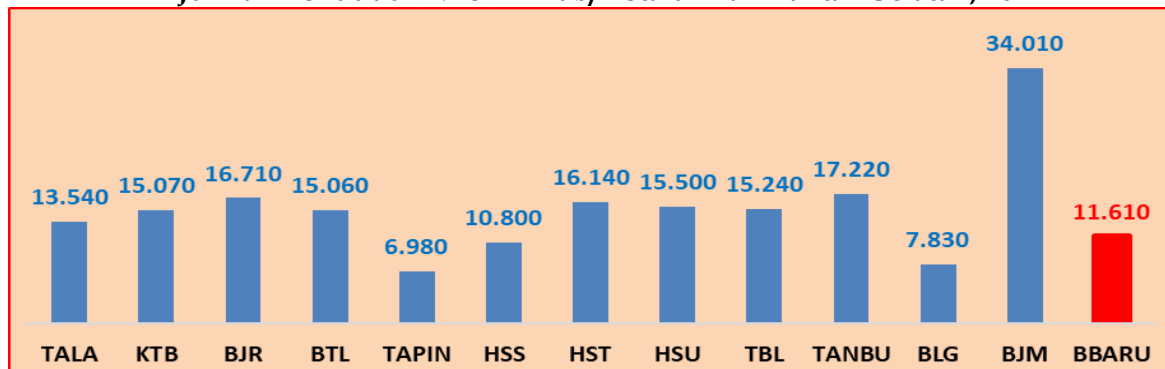


Sumber: BPS Kota Banjarbaru

Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kota Banjarbaru adalah sebanyak 11.610 jiwa, menurun sebanyak 340 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 yang mencapai sebanyak 11.950 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota yang lain di Provinsi Kalimantan Selatan, maka Kota Banjarbaru menempati urutan ketiga daerah dengan penduduk miskin terendah setelah Kabupaten Tapin (6.980 jiwa)

dan Kabupaten Balangan (7.830 jiwa). Perbandingan jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 selengkapnya dapat dilihat sebagaimana tersaji pada grafik di bawah ini.

**Gambar 3.10.**  
**Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota di Kalimantan Selatan, 2022**



Sumber : BPS Kota Banjarbaru

## Pendukung Capaian Kinerja

Pencapaian sasaran strategis Menurunnya Kemiskinan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Banjarbaru tahun 2022 didukung dengan program-program sebagai berikut:

### 1. Program Pemberdayaan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial melaksanakan kegiatan pembinaan kepada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna (KT), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga. (LK3) dapat berperan aktif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

- PSM dan TKSK perpanjangan tangan dalam hal mendata/menjaring keluarga.
- Karang Taruna berperan dalam hal pengembangan kegiatan untuk dapat usaha ekonomi produktif dengan melibatkan anggota Karang Taruna dan masyarakat tidak mampu.
- LK3 berperan dalam hal penanganan kemiskinan lebih banyak memberikan saran, pendapat serta solusi atas permasalahan kesejahteraan

sosial yang dihadapi misalnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT, anak terlantar dll).

## **2. Program Rehabilitasi Sosial**

Program ini melaksanakan kegiatan memberikan pendampingan dan pelayanan dan kepada orang terlantar, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), lansia terlantar, PSK, gelandangan dan pengemis yang terjaring razia oleh Satpol PP Kota Banjarbaru dan ditampung sementara dirumah singgah serta pemulangan orang terlantar ketempat tinggal asalnya.

Program Rehabilitasi Sosial ini juga melaksanakan Program JUARA Pemerintah Kota Banjarbaru yaitu Program HOMECARE bidang sosial yaitu:

- a. Penyediaan permakanan (sembako) kepada lansia dan penyandang disabilitas.
- b. Memberikan bantuan makanan siap saji kepada penyandang disabilitas dan lansia terlantar.
- c. Pemberian alat bantu kepada penyandang disabilitas berupa kursi roda dan tongkat.

## **3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Program ini bertujuan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Program ini juga untuk menjamin fakir miskin, anak terlantar dan penyandang disabilitas yang mengalami masalah sosial ekonomi agar terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Program Jaminan Sosial dari Kementerian Sosial RI yaitu melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/BPNT dan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta Bantuan Program Sembako dari APBD Kota Banjarbaru.

Dalam hal Penanganan kemiskinan Dinas Sosial Kota Banjarbaru bersama SKPD terkait yaitu: Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Disdalduk, KBPMPPA, Dinas Koperasi UKM dan Naker, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, dan Dinas PUPR.

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja Angka Kemiskinan diukur berdasarkan perhitungan **Jumlah Penduduk miskin dibagi Jumlah seluruh penduduk (proyeksi BPS) dikalikan 100%** (dengan perincian jumlah penduduk miskin 11.610 jiwa dibagi jumlah seluruh penduduk 278.417 jiwa dikali 100% = 4,17%).

**Tabel 3.76.**  
**Realisasi Kinerja Angka Kemiskinan, 2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Kemiskinan	%	4,50	4,17	107,33%

Sumber: BPS Kota Banjarbaru

Capaian Angka kemiskinan (persentase penduduk miskin) Kota Banjarbaru pada tahun 2022 adalah sebesar **4,17%**, lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam RPJMD, yaitu sebesar **4,40%**. Capaian keberhasilan menurunkan angka kemiskinan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan adalah sebesar **105%**.

**Gambar 3.11.**  
**Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa), 2020-2022**



Sumber: BPS Kota Banjarbaru

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Tabel 3.77.  
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja  
Angka Kemiskinan 2 Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian
1.	Angka Kemiskinan	4,01 % 100%	4,40 % 102,22%	4,17 % 105%

Sumber: Data BPS Kota Banjarbaru

Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Banjarbaru mampu menurunkan angka kemiskinan sebanyak 0,23 poin dari capaian tahun 2020 sebesar **4,01%** menjadi **4,40%** pada tahun 2021 dan **4,17%** pada tahun 2022. Dari sisi realisasi kinerja capaian ini mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2021 realisasi kinerja adalah sebesar **102,22%** meningkat menjadi **105%** pada tahun 2022.

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Target Jangka Menengah dalam RPJMD dan Nasional

Tabel 3.78.  
Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Kemiskinan dengan  
Target RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator Kinerja	Kota Banjarbaru	Target RPJMD Tahun 2022	Target Nasional
1	Angka Kemiskinan	4,17	4,40	9,71

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Banjarbaru

Jika dibandingkan dengan target dan capaian persentase penduduk miskin (angka kemiskinan), maka angka kemiskinan Kota Banjarbaru sangat jauh berada di bawah angka kemiskinan target dan realisasi angka kemiskinan nasional. Pada tahun 2022 angka kemiskinan Kota Banjarbaru sebesar **4,17%**, 2 (dua) kali lipat lebih rendah dari target nasional yakni **9,71%** dan capaian nasional sebesar **9,54%**.

#### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

##### Upaya yang telah dilakukan:

- a. Melaksanakan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terkait Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/BPNT dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
- b. Melaksanakan Program Jaminan Sosial baik berupa Jaminan Kesehatan dan Bantuan Sembako.
- c. Memberikan bantuan Makanan Siap Saji bagi Lansia dan Disabilitas.

##### 1) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data Induk yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kota Banjarbaru berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 251/HUK/2022 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tanggal 16 Desember 2022 tersaji di bawah ini:

**Tabel 3.79.**  
**Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, 2022**

No.	Kecamatan / Kelurahan	Jumlah Individu
<b>1.</b>	<b>Kecamatan Banjarbaru Utara</b>	<b>9.244</b>
	Kelurahan Komet	690
	Kelurahan Loktabat Utara	4.025
	Kelurahan Mentaos	1.740
	Kelurahan Sungai Ulin	2.789
<b>2.</b>	<b>Kecamatan Banjarbaru Selatan</b>	<b>11.350</b>
	Kelurahan Guntung Paikat	2.216
	Kelurahan Kemuning	3.180
	Kelurahan Sungai Besar	3.700
	Kelurahan Loktabat Selatan	2.254
<b>3.</b>	<b>Kecamatan Landasan Ulin</b>	<b>18.034</b>
	Kelurahan Guntung Payung	3.054
	Kelurahan Guntung Manggis	7.408
	Kelurahan Landasan Ulin Timur	2.865
	Kelurahan Syamsudin Noor	4.707

No.	Kecamatan / Kelurahan	Jumlah Individu
<b>4.</b>	<b>Kecamatan Liang Anggang</b>	<b>13.359</b>
	Kelurahan Landasan Ulin Barat	2.273
	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	2.500
	Kelurahan Landasan Ulin Tengah	3.300
	Kelurahan Landasan Ulin Utara	5.286
<b>5.</b>	<b>Kecamatan Cempaka</b>	<b>18.641</b>
	Kelurahan Cempaka	8.610
	Kelurahan Bangkal	4.286
	Kelurahan Sungai Tiung	2.702
	Kelurahan Palam	3.043
	Null	8.351
	<b>Total</b>	<b>78.979</b>

Sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, 2022.

## 2) Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu Perlindungan Sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan PKH diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu di mana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta PKH.

Keluarga Penerima Manfaat PKH didorong untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Sosial serta didampingi untuk mendapatkan bantuan komplementer secara berkelanjutan. Sinergi antara Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Sosial merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat PKH.

### a. Tujuan PKH

1. Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;

3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
  4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
  5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.
- b. Kriteria Penerima Manfaat PKH
- Penerima PKH dapat dibedakan berdasarkan komponen, yaitu komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Setiap komponen memiliki kriteria dengan rincian berikut:
1. Komponen Kesehatan
    - a. Ibu hamil/nifas/menyusui
    - b. Anak Usia Dini
  2. Komponen Pendidikan
 

Kriteria penerima PKH komponen pendidikan yakni anak usia sekolah.
  3. Komponen Kesejahteraan Sosial
    - a. Lanjut Usia diatas usia 60 tahun.
    - b. Penyandang Disabilitas Berat.

**Tabel 3.80.**  
**Indeks Bantuan Sosial PKH**

No.	Faktor Penimbang	Indeks/ Tahun (Rp)	Indeks/ 3 bulan (Rp)
1.	Kategori Ibu Hamil		
2.	Kategori Anak Usia 0 s.d 6 Tahun		
3.	Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat		
4.	Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat		
5.	Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat		
6.	Kategori Penyandang Disabilitas Berat		
7.	Kategori Lanjut Usia		

Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial No. 9/3/Bs.02.01/2/2022 tanggal 16 Februari 2022



a. Jumlah KPM PKH Kota Banjarbaru Tahun 2022

**Tabel 3.81.**  
**Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH**  
**Kota Banjarbaru, 2022 (Tahap 4)**

No.	Kecamatan / Kelurahan	Jumlah KPM
<b>1.</b>	<b>Kecamatan Banjarbaru Utara</b>	<b>580</b>
	Kelurahan Komet	41
	Kelurahan Loktabat Utara	250
	Kelurahan Mentaos	114
	Kelurahan Sungai Ulin	175
<b>2.</b>	<b>Kecamatan Banjarbaru Selatan</b>	<b>776</b>
	Kelurahan Guntung Paikat	155
	Kelurahan Kemuning	206
	Kelurahan Sungai Besar	267
	Kelurahan Loktabat Selatan	148
<b>3.</b>	<b>Kecamatan Landasan Ulin</b>	<b>1.322</b>
	Kelurahan Guntung Payung	174
	Kelurahan Guntung Manggis	450
	Kelurahan Landasan Ulin Timur	386
	Kelurahan Syamsudin Noor	311
	Null	1
<b>4.</b>	<b>Kecamatan Liang Anggang</b>	<b>830</b>
	Kelurahan Landasan Ulin Barat	176
	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	222
	Kelurahan Landasan Ulin Tengah	166
	Kelurahan Landasan Ulin Utara	266
<b>5.</b>	<b>Kecamatan Cempaka</b>	<b>1.954</b>
	Kelurahan Cempaka	612
	Kelurahan Bangkal	310
	Kelurahan Sungai Tiung	769
	Kelurahan Palam	263
<b>Total</b>		<b>5.462</b>

Sumber: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI Tahun 2022

b. Bantuan Program Sembako / Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Program Sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari Bantuan Pangan Non Tunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program Sembako diberikan melalui KKS yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial.

**c. Nilai Bantuan**

Nilai Bantuan Program Sembako sebesar Rp.200.000-/ bulan/Keluarga Penerima Manfaat.

**d. Bahan Pangan**

Bantuan yang diberikan berupa beberapa jenis bahan pangan yang terdiri dari:

- 1) Karbohidrat (beras, jagung pipilan, sagu);
- 2) Protein Hewani (telur, daging ayam, daging sapi, ikan segar);
- 3) Protein Nabati (kacang-kacangan, tahu, tempe);
- 4) Sumber Vitamin & Mineral (Sayur Mayur, Buah-buahan).

**e. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Tahun 2022**

**Tabel 3.82.**  
**Jumlah KPM Program Sembako di Kota Banjarbaru, 2022**

No.	Kecamatan / Kelurahan	Jumlah KPM
<b>1.</b>	<b>Kecamatan Banjarbaru Utara</b>	<b>502</b>
	Kelurahan Komet	47
	Kelurahan Loktabat Utara	264
	Kelurahan Mentaos	139
	Kelurahan Sungai Ulin	152
<b>2.</b>	<b>Kecamatan Banjarbaru Selatan</b>	<b>765</b>
	Kelurahan Guntung Paikat	159
	Kelurahan Kemuning	196
	Kelurahan Sungai Besar	259
	Kelurahan Loktabat Selatan	151
<b>3.</b>	<b>Kecamatan Landasan Ulin</b>	<b>1.849</b>
	Kelurahan Guntung Payung	213
	Kelurahan Guntung Manggis	630
	Kelurahan Landasan Ulin Timur	571
	Kelurahan Syamsudin Noor	435
<b>4.</b>	<b>Kecamatan Liang Anggang</b>	<b>1.133</b>
	Kelurahan Landasan Ulin Barat	199
	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	290
	Kelurahan Landasan Ulin Tengah	319
	Kelurahan Landasan Ulin Utara	457
<b>5.</b>	<b>Kecamatan Cempaka</b>	<b>2.177</b>
	Kelurahan Cempaka	775
	Kelurahan Bangkal	373

No.	Kecamatan / Kelurahan	Jumlah KPM
	Kelurahan Sungai Tiung	919
	Kelurahan Palam	360
	<b>Total</b>	<b>6.908</b>

Sumber: PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Banjarbaru Tahun 2022

#### **Hambatan:**

- Penduduk miskin dan tidak mampu masih ada yang belum memiliki NIK yang valid.
- Penduduk miskin dan tidak mampu tinggal berpindah-pindah (tidak memiliki tanah sendiri yang dibuktikan dengan surat kepemilikan tanah).

#### **Rencana Tindak Lanjut:**

- Membantu penduduk miskin dan tidak mampu agar memiliki KTP-El dan NIK yang valid
- Mengusulkan penduduk miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan bantuan, baik itu berupa program jaminan sosial atau program pemberdayaan sosial.

### **5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**Tabel 3.83.**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
**Angka Kemiskinan, 2022**

No	Program	Indikator	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial keluarga, tenaga sumber kesejahteraan kelembagaan masyarakat dan LK3 yang memperoleh fasilitasi peningkatan kemampuan	100	90,57	9,43
2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia	100	87,04	12,96

No	Program	Indikator	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
		terlantar serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak terlantar yang dipelihara	100	88,73	11,27
		Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat			

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Banjarbaru

## B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan pagu anggaran program kegiatan yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator Angka Kemiskinan tahun 2022 sebesar **Rp. 2.637.991.000** terealisasi sebesar **Rp. 2.316.774.356** atau **87,82%** dengan rincian per program sebagai berikut:

**Tabel 3.84.**  
**Realisasi Anggaran Program Pendukung**  
**Angka Kemiskinan, 2022**

No	Program	Pagu	Keuangan Realisasi (Rp)	%
1	Program Pemberdayaan Sosial	147.600.250	133.688.750	90,57
2	Program Rehabilitasi Sosial	1.573.032.750	1.369.131.450	87,04
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	917.358.000	813.954.156	88,73
	Total	2.637.991.000	2.316.774.356	87,82

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Banjarbaru

## MISI 2

:

Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

## SASARAN STRATEGIS 8 :

Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran

## INDIKATOR KINERJA 13 :

Angka Pengangguran

---

Sasaran Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran dengan indikator kinerja Angka Pengangguran dipilih dengan maksud untuk menggambarkan perbandingan jumlah Penganggur dengan jumlah Angkatan Kerja ditingkat Pemerintah Kota Banjarbaru pada periode RPJMD tahun 2021-2026. Indikator ini menunjukkan suatu nilai persentase perbandingan jumlah Penganggur dengan jumlah Angkatan Kerja, penurunan persentase dapat diindikasikan penyerapan tenaga kerja meningkat, tetapi jika persentase meningkat kemungkinan faktor yang mempengaruhinya adalah terjadinya peningkatan jumlah Angkatan Kerja sebagai akibat dari meningkatnya laju pertumbuhan penduduk.

Menurunnya pengangguran diukur berdasarkan Angka Pengangguran hasil penilaian dari jumlah pengangguran dibagi dengan angkatan kerja dikalikan 100.

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.85.  
Realisasi Kinerja Angka Pengangguran, 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka Pengangguran	%	5,39	5,47	95,61%

Sumber: Data BPS Kota Banjarbaru

Indikator Angka Pengangguran berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 5,39% telah teralisasi sebesar **5,47%** dengan capaian kinerja sebesar **95,61%** kategori **Baik**.

**Gambar 3.12.**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka, 2020-2022**



Sumber: BPS Kota Banjarbaru

## Program Pendukung Indikator Angka Pengangguran antara lain:

### 1. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Capaian program perencanaan tenaga kerja dengan indikator Persentase informasi kebijakan strategis rencana tenaga kerja 5 tahunan Tahun 2022 adalah 100% sedangkan capaian Tahun 2021 adalah 100%.

### 2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Capaian program penempatan tenaga kerja dengan indikator persentase tenaga kerja yang ditempatkan Tahun 2022 adalah 7,66% sedangkan capaian Tahun 2021 adalah 5,02%.

### 3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Capaian program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan indikator persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat berbasis kompetensi Tahun 2022 adalah 0,71% sedangkan capaian Tahun 2021 adalah 0,57%.

#### 4. Program Hubungan Industrial

Capaian program hubungan industrial dengan indikator persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sesuai ketentuan Tahun 2022 adalah 1,54% sedangkan capaian Tahun 2021 adalah 4,09%.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

**Tabel 3.86.**  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Angka Pengangguran 2 Tahun Terakhir**

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022
		Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian
1.	Angka Pengangguran	5,54%	5,70%	5,47%
		100%	94,25%	95,61%

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Banjarbaru

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kab/Kota/Provinsi

**Tabel 3.87.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Pengangguran dengan Kab/Kota/Provinsi**

No.	Indikator Kinerja	Kota Banjarbaru	Kab Banjar	Kab Tanah Laut	Kota Banjarmasin	Prov Kalsel
1.	Angka Pengangguran	5,47%	2,72%	4,17%	6,96%	4,47%

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Banjarbaru

Angka pengangguran di Kota Banjarbaru dibandingkan dengan Kabupaten/Kota/Provinsi sekitar. Angka pengangguran Kota Banjarbaru lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut dan Provinsi Kalimantan Selatan namun masih rendah dibandingkan dengan Kota Banjarmasin.

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD dan Target Nasional

**Tabel 3.88.**  
**Perbandingan Kinerja Angka Pengangguran**  
**dengan Target RPJMD dan Target Nasional**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target RPJMD	Target Nasional
1.	Angka Pengangguran	5,47%	4,64%	3,4%

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Banjarbaru

Realisasi angka pengangguran Kota Banjarbaru tahun 2022 adalah 5,47% belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2026 sebesar 4,64% dan target nasional untuk wilayah Kalimantan sebesar 3,4%.

#### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

##### Upaya yang telah dilakukan:

- Melaksanakan *Job Fair* atau Bursa Kerja di Kota Banjarbaru pada Tahun 2022 yang diikuti 20 perusahaan dengan jumlah 392 lowongan pekerjaan.
- Melaksanakan pelatihan-pelatihan berdasarkan link dan match yang berbasis kompetensi untuk pencari kerja di Kota Banjarbaru yang diselenggarakan di kelurahan Palam, Landasan Ulin, Bangkal dan yang diselenggarakan SeKota Banjarbaru.
- Melaksanakan sistem online informasi lowongan pasar kerja melalui Karirhub dari Kementerian Ketenagakerjaan dan menginformasikan lowongan melalui media sosial resmi kantor.
- Melaksanakan kunjungan perusahaan-perusahaan di wilayah Kota Banjarbaru untuk kegiatan cek lowongan dan monitoring penempatan.
- Melaksanakan penyusunan Rencana Tenaga Kerja Tahun 2022-2027, dimana setelah melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan tenaga kerja tersebut Wali Kota Banjarbaru menerima penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan.



### **Hambatan:**

- a. Kesadaran untuk wajib lapor penempatan dari pencari kerja dan perusahaan masih rendah.
- b. Adanya kendala tidak adanya sarana dan prasarana pendukung petugas cek lowongan kerja secara berkala ke perusahaan.

### **Rencana Tindak Lanjut:**

Perbaikan kedepan yang akan dilaksanakan:

- a. Melaksanakan Job Fair/Bursa Kerja di Kota Banjarbaru.
- b. Memberikan fasilitasi dukungan pelatihan kerja sebagai modal keterampilan kerja.
- c. Melaksanakan pelayanan AK/I dan informasi lowongan kerja secara online kepada pencari kerja dan pemberi kerja.

## **6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**Tabel 3.89.**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
**Angka Pengangguran, 2022**

No	Program	Indikator	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase informasi kebijakan strategis rencana tenaga kerja 5 tahunan	100	97,96	2,04
2.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat berbasis kompetensi	118,33	97,71	2,29
3.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	238,63	95,55	4,45
4.	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sesuai ketentuan	36,67	73,00	-

## B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan pagu anggaran program untuk mendukung terealisasinya sasaran menurunnya angka pengangguran tahun 2022 sebesar **Rp. 1.215.982.500,00** sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar **Rp. 1.138.487.080,00** sebesar atau **93,63%** dengan rincian per program sebagai berikut:

**Tabel 3.90.**  
**Realisasi Anggaran Program Pendukung**  
**Angka Pengangguran, 2022**

No	Program	Pagu	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	%
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 51.500.000	Rp. 50.447.330	97,96
2.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 840.883.000	Rp. 821.613.000	97,71
3.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp. 133.900.000	Rp. 127.939.000	95,55
4.	Program Hubungan Industrial	Rp. 189.699.500	Rp. 138.487.750	73,00
	Jumlah	Rp. 1.215.982.500	Rp. 1.138.487.080	93,63

### **MISI 2 :**

Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

### **SASARAN STRATEGIS 9 :**

Meningkatnya Stabilitas Ketersediaan Pangan

### **INDIKATOR KINERJA 14 :**

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk Ketersediaan Pangan

Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan merupakan susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dan zat gizi yang dihasilkan dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran kualitas

keragaman ketersediaan pangan yang siap dikonsumsi oleh penduduk/masyarakat.

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja sasaran meningkatnya stabilitas pangan masyarakat dengan Indikator skor PPH ketersediaan Pangan berdasarkan target yang ditentukan yaitu 80,45 telah terealisasi 84,76. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerjanya sebesar 105,35% dengan kategori Sangat Baik.

PPH diukur berdasarkan kelompok pangan yang tersedia di kota Banjarbaru dengan hasil pengukuran skor PPH ketersediaan Pangan, dapat di pada sajian tabel laporan tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 3.91.**  
**Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Ketersediaan, 2022**

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks	Ket
1.	Padi-padian	1.278	53,3	0,5	26,6	25,0	25,0	+
2.	Umbi-umbian	100	4,2	0,5	2,1	2,1	2,5	-
3.	Pangan Hewani	274	11,4	2,0	22,8	22,8	24,0	-
4.	Minyak dan Lemak	397	16,5	0,5	8,3	5,0	5,0	+
5.	Buah/biji berminyak	39	1,6	0,5	0,8	0,8	1,0	-
6.	Kacang-kacangan	81	3,4	2,0	6,7	6,7	10,0	-
7.	Gula	140	5,8	0,5	2,9	2,5	2,5	+
8.	Sayuran dan buah	95	4,0	5,0	19,9	19,9	30,0	-
9.	Lain-lain		-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2.403	100,1		90,1	84,76	100,0	

Program yang mendukung IKU Kota pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah sebagai berikut:

### 1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Untuk memenuhi kebutuhan hidup khususnya makanan setiap hari diharapkan masyarakat tidak hanya beras atau nasi saja yang harus dikonsumsi tetapi ada jenis makanan yang sumber energinya sama dengan nasi. Setiap daerah mempunyai produk makanan lokal masing-masing, yang umum diketahui adalah jenis ubi-ubian yang mengandung nilai karbohidrat yang cukup bagi manusia. Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary

Pattern adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama, baik secara absolut maupun relatif dari suatu pola dari ketersediaan atau konsumsi pangan. FAO-RAFA (1989) mendefinisikan PPH sebagai komposisi kelompok pangan utama yang apabila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Dengan pendekatan PPH, mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari score pangan (dietary score) yang dikenal dengan skor PPH. Semakin tinggi score PPH konsumsi pangan semakin beragam dan seimbang. Skor PPH Konsumsi Kota Banjarbaru tahun 2022 adalah 91,70 lebih rendah dibanding tahun 2021 sebesar 92,2, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.92.**  
**Target, Realisasi dan Capaian Kinerja PPH Konsumsi, 2022**

Indikator Kinerja	Uraian Kinerja Tahun 2022		
	Target (kali)	Realisasi (kali)	Capaian (%)
PPH Konsumsi	90,25	91,70	101,60

Sumber: Data DKP3 Kota Banjarbaru

Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 mengalami peningkatan dengan target 90,25 dan realisasi 91,70 ini menunjukkan bahwa warga Kota Banjarbaru sudah melaksanakan pola makan “Beragam Bergizi Seimbang dan Aman” (B2SA).

## 2. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Keamanan pangan (*food safety*) tidak terpisahkan dari ketahanan pangan yang tertuang dalam Deklarasi Roma tahun 1992 disampaikan Badan PBB yang menangani masalah pangan dan kesehatan (FAO/WHO). Pangan yang aman harus diperoleh dengan memenuhi kriteria cukup bergizi dan bebas dari cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar dimasyarakat merupakan tugas pemerintah pusat dan daerah, pemerintah daerah wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar

asal tumbuhan (PSAT) baik sebelum beredar di pasaran (pre market) maupun yang sudah beredar di pasaran (post market).

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengujian mutu dan dan keamanan pangan segar asal tumbuhan adalah:

- Meningkatkan pengawasan terhadap keamanan pangan segar
- Tersedianya data keamanan pangan segar terkait residu pestisida, cemaran mikroba dan cemaran bahan berbahaya lainnya.
- Tersedianya informasi keamanan pangan segar.

**Tabel 3.93.**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Uji Sampel, 2022**

Indikator Kinerja	Uraian Kinerja Tahun 2022		
	Target (kali)	Realisasi (kali)	Capaian (%)
Jumlah Uji Sampel	70	91,44	130,62

Sumber: Data DKP3 Kota Banjarbaru

### 3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor unggulan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru yang mempunyai peluang besar untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan produksi perikanan untuk memenuhi protein hewani masyarakat Kota Banjarbaru. Indikator kinerja adalah jumlah produksi perikanan budidaya (ton) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.94.**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Produksi, 2022**

Indikator Kinerja	Uraian Kinerja Tahun 2022		
	Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)
Jumlah produksi	399,55	449,95	112,61

Sumber: Data DKP3 Kota Banjarbaru

Dari tabel tersebut diketahui bahwa realisasi yang dicapai pada tahun 2022 sudah melampaui target dengan capaian 112,61%, hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan produksi perikanan budidaya meningkat adalah:

1. Tingginya permintaan ikan;
2. Dukungan dari pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat berupa bantuan benih maupun bantuan teknologi budidaya, puga peningkatan SDM penyuluh perikanan;
3. Banyaknya tempat usaha dengan produksi olahan ikan;
4. Hubungan baik yang terjalin antara stakeholder.

#### 4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Untuk meningkatkan sumber daya kelautan dan perikanan di Kota Banjarbaru upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah Kota Banjarbaru adalah menambah volume penebaran bibit ikan di danau, kolam, sungai yang ada di wilayah Banjarbaru, dengan harapan meningkatkan produksi perikanan tangkap. Ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk menambah pendapatan masyarakat khususnya pembudidaya ikan air tawar, target dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.95.**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Produksi, 2022**

Indikator Kinerja	Uraian Kinerja Tahun 2022		
	Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)
Jumlah produksi	35,05	101,20	288,70

Sumber: Data DKP3 Kota Banjarbaru

Dari tabel tersebut terlihat jumlah realisasi 101,20ton jauh lebih tinggi dari target yang hanya 35,05ton, ini menunjukkan perikanan tangkap di Kota Banjarbaru mengalami peningkatan yang signifikan.

#### 5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Salah satu upaya untuk meningkatkan fungsi dari hasil produksi pertanian dan perikanan adalah pengolahan hasil yang tidak hanya bisa dikonsumsi segar tapi juga dikonsumsi dalam bentuk olahan dengan merubah rasa dan bentuknya. Sehingga dapat merubah selera /keinginan

masyarakat untuk mengkonsumsi produk pertanian olahan. Produk olahan pertanian dapat disimpan dalam waktu yang lama dan tidak mudah rusak.

#### 6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian/ Peternakan

Salah satu faktor yang berperan penting dalam upaya meningkatkan produksi baik tanaman pangan, tanaman hortikultura, juga produksi peternakan, yang mencakup tersedianya bibit unggul, pupuk tanaman dan pakan ternak, serta alat-alat mesin pertanian (alsintan) adalah sarana pertanian yang biasa disebut saprodi (sarana produksi pertanian). Untuk mengukur indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah produksi tanaman pangan (ton) khususnya tanaman padi, dengan rumus:

Produksi = luas panen x Produktivitas.

**Tabel 3.96.**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Produksi**  
**Tanaman Pangan, 2022**

Indikator Kinerja	Uraian Kinerja Tahun 2022		
	Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)
Jumlah Produksi Tanaman Pangan	6.943,81	4.525,98	65,88

Sumber: Data DKP3 Kota Banjarbaru

Tabel tersebut menunjukkan indikator kinerja jumlah produksi tanaman pangan khususnya padi pada tahun 2022 dengan target 6.943,81ton, realisasinya 4.525,98ton dengan capaian 65,88%.

#### 7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian, salah satu yang perlu disiapkan adalah menyediakan prasarana pertanian.

#### 8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Sub Sektor peternakan merupakan unggulan di Kalimantan Selatan termasuk di Kota Banjarbaru terus didorong dan dikembangkan sehingga

mampu menjadi daerah penyedia ternak bagi daerah lain. Berbagai upaya dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan untuk meningkatkan produksi ternak diantaranya dengan menambah sarana dan prasarana penunjang usaha peternakan diantaranya dengan membangun klinik kesehatan hewan ternak, unit pelaksana teknis balai pembibitan ternak. Untuk mengukur sasaran indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah populasi ternak (ekor).

**Tabel 3.97.**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Populasi, 2022**

Indikator Kinerja	Uraian Kinerja		
	Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Capaian (%)
Jumlah Populasi	2.851.000	2.854.153	99,88

Sumber: Data DKP3 Kota Banjarbaru

Realisasi kinerja tahun 2022 dengan jumlah populasi 2.854.153 ekor mengalami peningkatan dibanding dengan realisasi tahun 2021 dengan jumlah populasi 2.832.443 ekor.

**Tabel 3.98.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Populasi Ternak  
3 Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	2020		2021		2022	
	Realisasi (ekor)	Capaian (%)	Realisasi (ekor)	Capaian (%)	Realisasi (ekor)	Capaian (%)
Jumlah Populasi Ternak	2.820.347	101,93	2.832.443	100,32	2.854.153	99,88

Sumber: Data DKP3 Kota Banjarbaru

Dari tabel tersebut terlihat bahwa setiap tahun jumlah produksi ternak mengalami peningkatan dari 2020 sampai tahun 2022 walaupun secara persentase mengalami penurunan karena target tiap tahun angkanya juga dinaikkan. Sejak munculnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) distribusi/pengiriman hewan ternak khususnya ternak besar mengalami penurunan.



## 9. Persentase Jumlah Poktan yang Naik Kelas /Score.

Peningkatan kelembagaan penyuluh dan petani menjadi sangat penting dan dipilih karena sumber day a penyuluh dan petani merupakan salah satu ujung tombak agar produktifitas pangan, pertanian dan perikanan meningkat, sehingga kesejahteraan masyarakat disektor pertanian juga akan meningkat. Untuk mengukur sasaran ini digunakan satu indikator utama yaitu persentase jumlah poktan yang naik kelas/score dengan rumus:

$$\% \Sigma \text{ Poktan yang Naik Kelas} = \frac{\Sigma \text{ Kel.yang Naik Kelas}}{\Sigma \text{ Kel. Tani}} \times 100\%$$

Penilaian kelas kelompok tani merupakan salah satu bentuk pembinaan untuk memberikan motivasi agar kelompok lebih berprestasi untuk naik ke kelompok yang lebih tinggi, disamping itu untuk mengetahui kelemahan yang dimiliki sehingga mudah dalam melakukan pembinaan. Indikator yang dinilai terdiri dari aspek merencanakan, kemampuan mengorganisasikan, kemampuan melaksanakan kegiatan, kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan serta kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompok tani.

**Tabel 3.99.**  
**Jumlah Kelompok Tani dan Jumlah Kelompok Tani yang naik kelas/score**

No.	Kecamatan	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah Kelompok Yang Naik Kelas
1	Liang Anggang	67	47
2	Landasan Ulin	77	37
3	Cempaka	88	46
4	Banjarbaru Utara	53	54
5	Banjarbaru Selatan	32	32
<b>Jumlah</b>		317	216

Sumber: Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Sismlihtan).

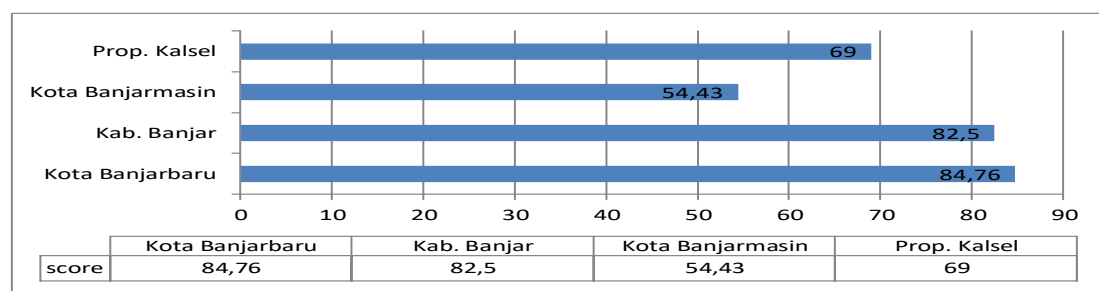
Dari 317 jumlah kelompok tani yang ada di Kota Banjarbaru jumlah yang meningkat kapasitasnya atau naik kelas/score berjumlah 216 atau 68, 13 % pada tahun 2022.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi 2 tahun sebelumnya, dimana tahun 2022 adalah 84,76 dibandingkan dengan tahun 2021 adalah 80,79 ada kenaikan score sebesar 3,97 poin. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 80,11 ke tahun 2021, ada kenaikan sebesar 0,68 poin. Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai score PPH Ketersediaan terjadi peningkatan atau kenaikan artinya kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan strategis secara kuantitatif cukup tersedia untuk konsumsi.

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

**Gambar 3.13.**  
**Perbandingan Realiasi Kinerja dengan Kab/Kota/Provinsi**



Dari perbandingan nilai score PPH dengan daerah lain terlihat bahwa Kota Banjarbaru masih lebih tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan kebutuhan pangan strategis merata di semua wilayah atau kecamatan/kelurahan sehingga untuk memperoleh bahan pangan tidak terkendala dengan akses. Dibanding dengan daerah lain untuk memperoleh bahan pangan akan terkendala dengan akses jalan yang rusak atau jarak yang jauh.

#### **4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional.**

Realisasi PPH Ketahanan Pemerintah Kota Banjarbaru sebesar **84,76** dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar **88** dengan capaian **105,67%** dan untuk target PPH nasional **tidak ada**.

#### **5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

**Upaya yang telah dilakukan:**

- a. Memasysaratkan diversifikasi pangan.
- b. Mendorong peningkatan produksi hasil pertanian secara umum.
- c. Melaksanakan pengawasan mutu pangan yang beredar.

**Hambatan:**

- a. Alih fungsi lahan pertanian;
- b. Kurangnya minat generasi muda untuk berusaha di sektor pertanian.

**Rencana Tindak Lanjut:**

- a. Berkoordinasi dengan stake holder terkait untuk mencegar alih fungsi lahan pertanian.
- b. Memberikan sosialisasi kepada generasi muda terkait teknik pertanian modern serta membuka jalur pemasarannya.

#### **7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya program yang mendukung PPH untuk ketersediaan pangan, realisasi anggaran sudah rata- rata diatas 90 % dan capaian kinerja lebih juga lebih besar dari realisasi anggaran, namun program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dan program

Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian lebih kecil dari realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.100.**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Skor Pola Pangan Harapan**  
**untuk Ketersediaan Pangan, 2022**

No.	Program	Indikator	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Scor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	100	98,27	1,73
2.	Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase PSAT (pangan segar asal tumbuhan) yang aman (%)	100	99,78	0,22
3.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	112,61	99,71	12,9
4.	Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	288,70	99,67	189,03
5.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pertumbuhan produksi olahan hasil perikanan	105	97,41	7,59
6.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	65,1	99,46	-34,36
7.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase prasarana pertanian yang diaplikasikan	65,1	96,64	-31,54
8.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah hewan yang tertangani (ekor)	200	94,45	105,55
9.	Penyuluhan Pertanian	Persentase jumlah poktan yang naik kelas/score	101,68	98,56	3,12

Sumber: Data DKP3 Kota Banjarbaru

## B. REALISASI ANGGARAN

**Tabel 3.101.**  
**Realisasi Anggaran Program Pendukung Skor Pola Pangan Harapan**  
**untuk Ketersediaan Pangan, 2022**

No.	Program	Pagu (Rp)	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	%
1.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.225.546.750	1.204.401.750	98,27
2.	Pengawasan Keamanan Pangan	100.955.500	100.738.600	99,78
3.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	493.707.000	492.292.730	99,71
4.	Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	31.040.000	30.940.000	99,67
5.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	418.769.000	407.927.000	97,41
6.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.627.502.500	2.613.324.500	99,46
7.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	368.880.000	356.512.700	96,64
8.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	130.039.000	122.824.000	94,45
9.	Penyuluhan Pertanian	802.781.750	791.230.180	98,56

Sumber: Data DKP3 Kota Banjarbaru

Peningkatan kebutuhan produksi dan pengadaan ternak baik ternak besar maupun ternak jenis unggas dalam upaya pemenuhan kebutuhan protein hewani bagi masyarakat Kota Banjarbaru, namun dengan munculnya Penyakit Mulut dan Kuku yang menyerang hewan ternak besar sehingga distribusi/pengiriman dari luar sangat ketat. Hal ini tentunya mengurangi kuantitas kebutuhan akan hewan tersebut, sehingga perlu kebijakan prioritas anggaran untuk mengatasi masalah tersebut.

## **MISI 2**

:

Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

## **SASARAN STRATEGIS 10 :**

Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas

## **INDIKATOR KINERJA 15 :**

Indeks Infrastruktur Wilayah

---

Indeks Infrastruktur Wilayah merupakan hasil perhitungan untuk memberikan gambaran tentang kondisi infrastruktur secara lebih menyeluruh dengan memperhatikan berbagai aspek yang bertujuan membantu pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan.

## **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Capaian kinerja sasaran meningkatnya infrastruktur kota yang berkualitas dengan indikator kinerja Indeks Infrastruktur Wilayah berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu **75,99**, telah terealisasi dengan nilai **76,51**. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerjanya sebesar **100,68%** dengan kategori **Baik Sekali**.

Program pendukung indikator Indeks Infrastruktur Wilayah, antara lain:

#### **1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**

Pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dapat dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu:

- a. Persentase peningkatan perlindungan banjir.
  - b. Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.
-

## **2. Program Penyelenggaraan Jalan**

Tingkat kemantapan jalan kota menggambarkan kondisi jalan dan jembatan yang telah terbangun dan yang telah dipelihara oleh Pemerintah Kota Banjarbaru sampai dengan tahun 2026 sebagai implementasi dari perencanaan yang telah tertuang dalam Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tingkat kemantapan jalan kota diukur berdasarkan hasil dari panjang jalan kota dalam kondisi baik dan sedang (sampai dengan tahun 2022) dibagi total panjang jalan dengan status ruas jalan kota dikali 100.

## **3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**

Persentase saluran drainase yang berfungsi baik diukur berdasarkan hasil dari panjang drainase jalan kota dan drainase jalan lingkungan yang berfungsi baik dibagi total target panjang drainase.

## **4. Program Pengembangan Permukiman**

Meningkatnya kemantapan jalan lingkungan menggambarkan kondisi Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang telah terbangun dan yang telah dipelihara oleh Pemerintah Kota Banjarbaru sampai dengan tahun 2021 sebagai implementasi dari perencanaan yang telah tertuang dalam Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Meningkatnya kemantapan jalan lingkungan diukur berdasarkan hasil dari panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik dan sedang dibagi total panjang jalan dengan status ruas jalan lingkungan dikali 100%.

## **5. Program Penataan Bangunan Gedung**

Meningkatnya Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik melalui Program Penataan Bangunan Gedung diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Banjarbaru dalam

meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Banjarbaru dan mampu melayani kebutuhan masyarakat.

Indikator Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik dihitung berdasarkan hasil dari jumlah paket yang direncanakan pada Program Penataan Bangunan Gedung dibagi jumlah paket yang terlaksana dikali 100%.

## 6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Meningkatnya Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik melalui Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya diharapkan dapat meningkatkan prasarana fasilitas umum berupa Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan, sehingga dapat digunakan secara maksimal oleh pengguna.

Indikator Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik dihitung berdasarkan hasil dari jumlah paket yang direncanakan pada Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dibagi jumlah paket yang terlaksana dikali 100%.

### a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

**Tabel 3.102.**  
**Realisasi Program Pengelolaan Sumber Daya Air, 2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun RPJMD 2026
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Persentase peningkatan perlindungan banjir	%	35,24	39,11	110,98	70,07
2	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	69,35	69,35	100	90,40
Rata-rata Capaian Kinerja					105,49	

Sumber: Data PUPR Kota Banjarbaru



### **Program 1 Indikator 1 : “Persentase peningkatan perlindungan banjir”**

Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air menggambarkan tindakan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk menyelenggarakan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air termasuk didalamnya mengurangi kawasan rawan banjir yang setiap tahunnya terjadi dengan pemeliharaan sungai, embung/kolam retensi dan pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur perlindungan banjir seperti tanggul, perkuatan tebing sungai dan embung. banjir di beberapa tahun sebelumnya, yang mana penanganan banjir melainkan harus menyeluruh dengan memperhatikan kondisi dari hulu ke hilir.

Indikator kinerja adalah persentase peningkatan perlindungan banjir. Indikator ini menunjukan kawasan rawan banjir yang lingkungannya akan diperbaiki dengan infrastruktur pengendali banjir, diharapkan dengan infrastruktur yang dipelihara dan dibangun tersebut banjir dapat diminimalisasi atau bahkan tidak terjadi lagi.

Pengukuran indikator persentase peningkatan perlindungan banjir dihitung berdasarkan panjang sungai yang ditangani dengan infrastruktur pengendali banjir pada tahun ke-n dibagi dengan total panjang sungai yang akan ditangani sampai akhir 2026, kemudian dikali 100.

**Tabel 3.103.**  
**Target dan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan**  
**Perlindungan Banjir, 2022**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase peningkatan perlindungan banjir	%	35,24	39,11	110,98

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Capaian Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan indikator Persentase peningkatan perlindungan banjir berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 35,24%, telah terealisasi yaitu 39,11%.

**Program 1 Indikator 2 : “Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi”**

Indikator kinerja adalah persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi. Indikator ini menunjukkan luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi, diharapkan dengan infrastruktur yang dibangun tersebut dapat meningkatkan produksi di sektor pertanian.

**Tabel 3.104.**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi, 2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	69,35	69,35	100

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Capaian Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan indikator Persentase peningkatan perlindungan banjir berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 69,35%, telah terealisasi yaitu 69,35%.

**b. Program Penyelenggaraan Jalan**

**Tabel 3.105.**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kota, 2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat kemantapan jalan kota	%	81,32	81,33	101,64

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Capaian Program Penyelenggaraan Jalan Kota dengan indikator Tingkat kemantapan jalan kota berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 81,32%, telah terealisasi yaitu 81,33%.

**c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**

**Tabel 3.12.**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Saluran Drainase yang Berfungsi Baik, 2022**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	%	59,85	60,45	101

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Capaian Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dengan indikator Persentase saluran drainase yang berfungsi baik berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 59,85%, telah terealisasi yaitu 60,45%.

**d. Program Pengembangan Permukiman**

**Tabel 3.13.**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Infrastruktur Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kota dalam Kondisi Baik, 2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	%	87,06	87,06	100

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Capaian Program Pengembangan Permukiman dengan indikator Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 87,06%, telah terealisasi yaitu 87,06%.

**e. Program Penataan Bangunan Gedung**

**Tabel 3.14.**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Gedung Negara Milik Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik, 2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	%	100	100	100

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Capaian Program Penataan Bangunan Gedung dengan indikator Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 100%, telah terealisasi yaitu 100%.

**f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**

**Tabel 3.109.**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan, 2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	%	100	100	100

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Capaian Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan indikator Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 100%, telah terealisasi yaitu 100%.

**2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir**

**a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**

**Tabel 3.110**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Perlindungan Banjir, 2021-2022**

No	Indikator Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian
1.	Persentase peningkatan perlindungan banjir	24,65 101,27	39,11 110,98

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 meningkat sebesar 14,46 %.

**Tabel 3.15.**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi, 2021-2022**

No	Indikator Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian
1.	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	64,05 99,94	69,35 100

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 tetap yaitu sebesar 100%.

**b. Program Penyelenggaraan Jalan**

**Tabel 3.112.**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Tingkat Kemantapan**  
**Jalan Kota, 2021-2022**

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi / Capaian	Realisasi / Capaian
1.	Tingkat kemantapan jalan kota	81,27 100,07	82,66 101,64

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 meningkat sebesar 1,39%.

**c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**

**Tabel 3.113.**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Saluran Drainase**  
**yang Berfungsi Baik, 2021-2022**

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi / Capaian	Realisasi / Capaian
1.	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	58,56 101,20	60,45 101

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 meningkat 1,89%.

**d. Program Pengembangan Permukiman**

**Tabel 3.114.**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Infrastruktur Jalan**  
**Lingkungan Kawasan Permukiman, 2021-2022**

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi / Capaian	Realisasi / Capaian
1.	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	85,56 100	87,06 100

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 tetap yaitu 100%.

**e. Program Penataan Bangunan Gedung**

**Tabel 3.115.**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Gedung Negara**  
**Milik Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik, 2021-2022**

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi / Capaian	Realisasi / Capaian
1.	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	100	100
		100	100

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 tetap yaitu 100%.

**f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**

**Tabel 3.116.**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Penataan**  
**Bangunan dan Lingkungan, 2021-2022**

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi / Capaian	Realisasi / Capaian
1.	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	100	100
		100	100

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 tetap yaitu 100%.

**3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan 2 Tahun Sebelumnya**

Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan 2 tahun sebelumnya dimana tahun 2020 tercapai 78,69, untuk tahun 2021 indeksinya 75,00 dan tahun 2022 naik menjadi 76,51.

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

Realisasi Indeks Infrastruktur Wilayah Pemerintah Kota Banjarbaru dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 tercapai 92,88% dan target Nasional tidak ada.

##### a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

**Tabel 3.117.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Perlindungan Banjir dengan Target RPJMD**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target RPJMD	Target Nasional
1.	Persentase peningkatan perlindungan banjir	39,11	70,07	-

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Realisasi Persentase peningkatan perlindungan banjir tahun 2022 sebesar 39,11% belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 53,19% dan tidak ada target nasional.

**Tabel 3.16.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota dengan Target RPJMD**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target RPJMD	Target Nasional
1.	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	69,35	90,40	-

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Realisasi indikator Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi tahun 2022 sebesar 69,35% belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 79,88% dan tidak ada target nasional.

**b. Program Penyelenggaraan Jalan**

**Tabel 3.119.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kota dengan Target RPJMD**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target RPJMD	Target Nasional
1.	Tingkat kemantapan jalan kota	82,66	81,87	-

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Realisasi indikator Tingkat kemantapan jalan kota tahun 2022 sebesar 82,66% melebihi mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 81,87% dan tidak ada target nasional.

**c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**

**Tabel 3.120.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Saluran Drainase dengan Target RPJMD**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target RPJMD	Target Nasional
1.	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik irigasi	60,45	67,94	-

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Realisasi indikator Persentase saluran drainase yang berfungsi baik tahun 2022 sebesar 60,45% belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 67,94% dan tidak ada target nasional.

**d. Program Pengembangan Permukiman**

**Tabel 3.121.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Infrastruktur Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman dengan Target RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target RPJMD	Target Nasional
1.	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	87,06	93,06	-

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru



Realisasi indikator Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik tahun 2022 sebesar 87,06% belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 93,06% dan tidak ada target nasional.

**e. Program Penataan Bangunan Gedung**

**Tabel 3.122.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Gedung Negara Milik Pemerintah Daerah dengan Target RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target RPJMD	Target Nasional
1.	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	100	100	-

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Realisasi Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik tahun 2022 sebesar 100% dan mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100% dan tidak ada target nasional.

**f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**

**Tabel 3.123.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan Target RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target RPJMD	Target Nasional
1.	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	100	100	-

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Realisasi Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik tahun 2022 sebesar 100% dan mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100% dan tidak ada target nasional.

## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

### Upaya yang telah dilakukan:

#### a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Persentase peningkatan perlindungan banjir, yaitu:

- 1) Melakukan perencanaan dan penganggaran secara efektif dan efisien dengan tidak mengurangi target yang akan dicapai.
- 2) Mensosialisasikan kepada masyarakat PP No 38 tahun 2011 tentang sungai dan Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Sempadan Danau agar masyarakat tidak mendirikan bangunan permanen di atas sempadan sungai.
- 3) Melakukan Kajian Sempadan Sungai sebagai dasar rencana pembuatan PERDA tentang sempadan sungai.
- 4) Mensosialisasikan kebijakan pemerintah Kota Banjarbaru terhadap masyarakat secara umum dan khususnya terhadap masyarakat yang terkena dampak terkait pekerjaan Sungai Kota Banjarbaru untuk pekerjaan pembangunan atau peningkatan atau pelebaran Sungai diutamakan sistem hibah lahan dari masyarakat, bukan membeli lahan.

Sedangkan upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi, yaitu:

- 1) Melakukan perencanaan dan penganggaran secara efektif dan efisien dengan tidak mengurangi target yang akan dicapai.
- 2) Mensosialisasikan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada masyarakat setempat dan yang terkena dampak langsung terhadap kegiatan.

- 3) Melakukan pengawasan dari pihak pengawas lapangan didampingi konsultan pengawas secara berkala kepada pihak pelaksana berkaitan dengan proses pekerjaan.

**b. Program Penyelenggaraan Jalan**

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Tingkat kemantapan jalan kota, yaitu:

- 1) Melakukan perencanaan dan penganggaran secara efektif dan efisien dengan tidak mengurangi target yang akan dicapai.
- 2) Mensosialisasikan kebijakan pemerintah Kota Banjarbaru terhadap masyarakat secara umum dan khususnya terhadap masyarakat yang terkena dampak terkait pekerjaan Bidang Bina Marga Kota Banjarbaru untuk pekerjaan pembangunan atau peningkatan atau pelebaran jalan diutamakan sistem hibah lahan dari masyarakat, bukan membeli lahan untuk pembebasan jalan.
- 3) Melakukan pemantauan secara berkala kepada pihak penyedia/supplier material berkaitan dengan proses pengolahan dan material yang diperlukan.

**c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Persentase saluran drainase yang berfungsi baik, yaitu:

- 1) Melakukan updating atau menginventarisasi saluran-saluran drainase yang kondisinya rusak ringan atau berat dengan melakukan rehabilitasi atau pemeliharaan melalui sub kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem drainase.
- 2) Mengharapkan adanya partisipasi masyarakat untuk melakukan pemeliharaan saluran drainase dilingkungan mereka dengan melakukan pembersihan dari tanah endapan dan sampah-sampah agar aliran airnya bisa lancar sehingga saluran drainase bisa berfungsi baik.

- 3) Membuat sumur-sumur resapan di beberapa titik yang ditengarai memiliki andil dalam menciptakan volume debit air hujan yang relatif cukup besar. Air yang masuk ke dalam sumur resapan diharapkan dapat mengurangi genangan yang terjadi di sekitar daerah tersebut dan dapat menjadi cadangan air tanah bagi lingkungan sekitar.
- 4) Selain itu, Bidang Cipta Karya sebagai pelaksana kewenangan pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan drainase lingkungan di perumahan, berupaya mengkoneksikan baik drainase yang sudah terbangun maupun yang akan terbangun, dengan drainase sekunder ataupun drainase primer dengan tetap mengacu kepada pembangunan drainase yang berwawasan lingkungan (*eco-drainage*), yaitu drainase yang dilengkapi dengan sumur resapan ataupun kolam detensi/retensi mini.

**d. Program Pengembangan Permukiman**

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik adalah meningkatkan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis, berupaya melalui peningkatan jalan lingkungan di komplek perumahan. Sebagaimana arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK, peningkatan jalan lingkungan dilaksanakan pada aset-aset fasilitas PSU perumahan yang keberadaan asetnya telah melalui proses serah terima aset dari pihak pengembang kepada Pemerintah Kota Banjarbaru. Bidang Cipta Karya berupaya agar seluruh jalan lingkungan yang telah dilaksanakan peningkatannya, dimasukkan dalam database rencana inventarisasi jalan lingkungan yang akan diperbarui melalui Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru di tahun 2023 nanti.

**e. Program Penataan Bangunan Gedung**

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik adalah berupaya membangun dan merencanakan pembangunan kantor-kantor pemerintah Pemerintah Kota Banjarbaru yang sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta aturan turunannya. Sejak kuartal kedua 2022, Bidang Cipta Karya tidak lagi melaksanakan rehabilitasi atau pemeliharaan kantor-kantor di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru. Hal ini merupakan hasil dari saran tindak/temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) terhadap hal ini. Menurut BPK, kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan kantor merupakan tanggung jawab dari SKPD masing-masing, karena terkait dengan aset kepemilikan dari gedung tersebut yang tidak dapat dicatatkan pada Dinas PUPR terhadap belanja modal yang telah dilaksanakan oleh Dinas PUPR dari kegiatan tersebut.

**f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik, yaitu:

- 1) Dalam upaya mencapai Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi, Bidang Cipta Karya berupaya melakukan rehabilitasi pada fasilitas - fasilitas umum berupa rehabilitasi gedung mess L dan gedung PKK yang ada di Kota Banjarbaru yang sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku.
- 2) Dan juga melakukan perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pengerjaan konstruksi selesai tepat waktu.

## **Hambatan:**

### **a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**

Hambatan yang dihadapi dalam Persentase peningkatan perlindungan banjir, yaitu:

- 1) Kondisi akses mobilisasi material pekerjaan peningkatan sungai yang jauh dan sempit
- 2) Kondisi iklim dan Cuaca di musim penghujan yang mengakibatkan naiknya muka air sungai yang mempengaruhi waktu pelaksanaan pekerjaan.

Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yaitu:

- 1) Mobilisasi material yang tidak bisa langsung ke lokasi kegiatan.
- 2) Iklim dan cuaca di musim penghujan yang mengakibatkan naiknya muka air.
- 3) Pada saat musim panen kegiatan mengalami hambatan dikarenakan mobilisasi hasil panen.

### **b. Program Penyelenggaraan Jalan**

Hambatan yang dihadapi dalam Tingkat kemantapan jalan kota, yaitu:

- 1) Pekerjaan yang menggunakan precast memerlukan waktu pelaksanaan yang lebih lama karena harus menunggu produksi pabrik, sehingga harus dipastikan dulu ketersediaan precast tersebut sebelum melaksanakan galian saluran drainase.
- 2) Pekerjaan konstruksi jembatan memerlukan waktu pelaksanaan yang lebih lama karena urutan pekerjaan harus dikerjakan secara berurutan.
- 3) Keterbatasan anggaran untuk pekerjaan pembangunan jalan sehingga untuk pencapaian target panjang jalan yang dibangun belum optimal.
- 4) Kurangnya dukungan masyarakat terhadap pekerjaan bidang Bina Marga.

- 5) Pekerjaan yang menggunakan material dari penyedia/suplier memerlukan waktu pelaksanaan yang lebih lama karena harus menunggu produksi pabrik tersedia.

**c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**

Hambatan yang dihadapi dalam Persentase saluran drainase yang berfungsi baik, yaitu:

- 1) Masih banyaknya saluran-saluran drainase yang kondisinya rusak ringan atau berat yang belum maksimal ditangani karena keterbatasan anggaran.
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara saluran drainase karena sebagian besar kondisi saluran yang tidak lancar disebabkan banyaknya endapan yang tidak dibersihkan.
- 3) Adanya saluran-saluran yang masih belum tuntas penanganannya karena masih adanya penolakan warga terhadap penanganan drainase ke pembuangan akhir yang mengalir ke tanah warga.
- 4) Kurangnya tanggung jawab pengembang perumahan terhadap pembangunan jalan dan drainase lingkungan pada PSU yang diserahkan mereka pada Pemerintah Kota Banjarbaru, menyebabkan porsi pembangunan infrastruktur yang seharusnya dikerjakan mereka menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Banjarbaru, dalam hal ini Dinas PUPR Kota Banjarbaru. Sehingga akibatnya wilayah-wilayah genangan air bertambah, karena beberapa perumahan membangun di daerah tangkapan maupun resapan air.

**d. Program Pengembangan Permukiman**

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik adalah ada saat pelaksanaan peningkatan jalan lingkungan, masih dijumpai tantangan berupa variasi ketebalan Lapis Pondasi Bawah (LPB) dan Lapis Pondasi Atas (LPA) yang tidak konsisten di lapangan.

Selain itu, karena peningkatan pembangunan perumahan yang masif oleh pengembang perumahan yang tidak dibarengi dengan pembangunan jalan lingkungan yang langsung dibangun oleh mereka mengakibatkan banyaknya jalan lingkungan yang masih dalam kondisi hanya memiliki LPB dan LPA saja tanpa lapisan aspal, mengakibatkan kondisi jalan-jalan ini banyak yang sudah tergerus lapisan atasnya akibat air hujan. Sehingga tidak tercapai kondisi pemadatan yang ideal pada saat rencana pekerjaan pengasapalan jalan, setelah beberapa tahun menunggu pendanaan mencukupi untuk pekerjaan aspal di wilayah tersebut.

**e. Program Penataan Bangunan Gedung**

Hambatan yang dihadapi dalam Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik adalah Banyaknya bangunan gedung baik milik Pemerintah Kota Banjarbaru maupun instansi pusat/vertikal dan milik perseorangan yang sudah berusia tua, dan ditengarai dapat dicanangkan sebagai bangunan cagar budaya, selama ini sedikit sekali informasi teknis mengenai keberadaan dan struktur bangunan tersebut. Sehingga kadang dijumpai kekhawatiran akan kekokohan bangunan tersebut, mengingat pada saat sekarang ini meskipun terjadi pada daerah lain di luar wilayah Kota Banjarbaru semakin kerap terjadinya kegagalan bangunan berupa kolaps/ambruknya bangunan.

**f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**

Hambatan yang dihadapi dalam Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik adalah banyaknya bangunan gedung atau pun fasilitas umum milik Pemerintah Kota Banjarbaru yang harus dilakukan rehabilitasi, selama ini sedikit sekali informasi teknis mengenai keberadaan dan struktur bangunan tersebut. Sehingga kadang dijumpai kekhawatiran akan kekokohan bangunan tersebut, mengingat pada saat sekarang ini meskipun terjadi pada daerah lain di luar wilayah



Kota Banjarbaru semakin kerap terjadinya kegagalan bangunan berupa kolaps/ambruknya bangunan.

### **Rencana Tindak Lanjut:**

#### **a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**

Rencana tindak lanjut kedepan yang akan dijadikan langkah perbaikan dari hambatan-hambatan yang terjadi di tahun berjalan, yaitu:

- 1) Mempercepat pelaksanaan lelang sehingga proses pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan sesuai target waktu pelaksanaan.
- 2) Menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan sesuai keperluan berdasarkan dokumen perencanaan.
- 3) Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat secara umum dan khususnya terhadap masyarakat yang terkena dampak terkait pekerjaan peningkatan sungai Kota Banjarbaru.
- 4) Berkoordinasi dengan pihak kelurahan, kelompok tani dan tokoh setempat untuk kegiatan selanjutnya.
- 5) Lelang dipercepat untuk menghindari musim hujan yang tidak menentu.

#### **b. Program Penyelenggaraan Jalan**

Rencana tindak lanjut kedepan yang akan dijadikan langkah perbaikan dari hambatan-hambatan yang terjadi di tahun berjalan, yaitu:

- 1) Mempercepat pelaksanaan lelang sehingga proses pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan sesuai target waktu pelaksanaan.
- 2) Menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan sesuai keperluan berdasarkan dokumen perencanaan.
- 3) Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat secara umum dan khususnya terhadap masyarakat yang terkena dampak terkait pekerjaan Bidang Bina Marga Kota Banjarbaru.

- 4) Membuat perjanjian yang mengikat antara kontraktor dan penyedia/suplier dalam hal penyediaan material.

**c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**

Rencana tindak lanjut kedepan yang akan dijadikan langkah perbaikan dari hambatan-hambatan yang terjadi di tahun berjalan, yaitu:

- 1) Melakukan inventaris data usulan masyarakat terkait permasalahan dan penanganan drainase baik melalui usulan musrenbang atau laporan masyarakat agar bisa ditangani setiap tahunnya melalui sub kegiatan pembangan sistem drainase perkotaan, sub kegiatan peningkatan saluran drainase perkotaan dan sub kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem drainase.
- 2) Memberikan penjelasan dan pendekatan kepada warga yang terdampak sebagian tanahnya untuk dihibahkan untuk penanganan saluran drainase supaya bisa tuntas ke saluran pembuangan akhirnya agar hasilnya saluran drainase bisa berfungsi baik.
- 3) Untuk tindak lanjut masalah banjir dan genangan, perlu adanya komitmen bersama yang dituangkan melalui rapat/ sosialisasi/ pendekatan, Focus Group Discussion (FGD) bersama pengembang ataupun penandatanganan Pakta Integritas agar pihak swasta/pengembang turut bertanggung jawab membangun dari awal jalan maupun drainase lingkungan di area yang akan dikembangkan mereka.
- 4) Selain itu, perlu adanya pembangunan drainase yang berwawasan lingkungan secara masif, tuntas dan komprehensif pada tahun yang bersamaan, melalui kolaborasi dan integrasi pembangunan bersama/ develop bundling pada bidang Sumber Daya Air, Bina Marga dan Cipta Karya berdasarkan kewenangan masing-masing bidang. Pembangunan /pemeliharaan/rehabilitasi dilakukan dengan membagi beberapa area berdasarkan catchment area dan berdasarkan

studi/kajian/masterplan yang telah dilakukan. Sehingga penanganan dapat tuntas tanpa meninggalkan masalah dikemudian hari.

**d. Program Pengembangan Permukiman**

Rencana tindak lanjut kedepan yang akan dijadikan langkah perbaikan dari hambatan-hambatan yang terjadi di tahun berjalan, yaitu:

- 1) Perlunya pengawasan berkala secara detail oleh Konsultan Pengawas bersama-sama Bidang Cipta Karya terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana Peningkatan Jalan Lingkungan, sehingga potensi temuan kurangnya ketebalan LPA dan LPB oleh BPK dapat diminimalisir. Serta perlunya perencanaan teknis yang lebih berkualitas dan terperinci sehingga tantangan-tantangan teknis di lapangan dapat diantisipasi sedini mungkin.
- 2) Bidang Cipta Karya pada tahun 2023 akan melaksanakan *updating* inventarisasi jalan lingkungan. Untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, di tahun 2023 direncanakan akan disinergikan aplikasi jalan dan drainase lingkungan, agar kondisi eksisting kedua jenis infratraktur yang tersebar di Kota Banjarbaru ini dapat terpantau secara berkala.

**e. Program Penataan Bangunan Gedung**

Rencana tindak lanjut kedepan yang akan dijadikan langkah perbaikan dari hambatan-hambatan yang terjadi di tahun berjalan adalah pada tahun 2023, Bidang Cipta Karya akan mulai menginventarisasi bangunan-bangunan yang akan dicanangkan menjadi bangunan cagar budaya. Selain itu di tahun 2023 akan dibuat aplikasi informasi bangunan gedung negara yang berisi informasi mengenai teknis bangunan dan tahun pembangunannya, agar kedepannya dapat dilaksanakan perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan renovasi bangunan gedung negara yang lebih baik dan tetap mematuhi aturan bangunan yang berlaku serta kaidah estetika/arsitektural bertema tertentu.

**f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**

Rencana tindak lanjut kedepan yang akan dijadikan langkah perbaikan dari hambatan-hambatan yang terjadi di tahun berjalan adalah pada tahun 2023, Bidang Cipta Karya akan mulai menginventarisasi bangunan-bangunan dan fasilitas - fasilitas umum yang akan dipergunakan untuk masyarakat banyak. Selain itu di tahun 2023 akan dibuat aplikasi informasi bangunan gedung negara yang berisi informasi mengenai teknis bangunan dan tahun pembangunannya, agar kedepannya dapat dilaksanakan perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan renovasi bangunan gedung negara yang lebih baik dan tetap mematuhi aturan bangunan yang berlaku serta kaidah estetika/arsitektural bertema tertentu.

**6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**Tabel 3.124.**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indeks**  
**Infrastruktur Wilayah, 2022**

No.	Program	Indikator	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase peningkatan perlindungan banjir	110,98	70,72	40,26
2.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	100	95,45	4,55
3.	Program penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan kota	101,64	95,42	6,22
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	101	93,43	7,57
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	100	85,07	14,93
6.	Program	Persentase penataan	100	89,88	10,12

No.	Program	Indikator	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	bangunan dan lingkungan			

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

## B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan pagu anggaran awal program yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya IKU Indeks Infrastruktur Wilayah tahun 2022 sebesar **Rp. 148.020.501.164** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 134.049.227.963** atau sebesar **90,56%** dengan rincian per program sebagai berikut:

**Tabel 3.125.**  
**Realisasi Anggaran Program Pendukung Indeks**  
**Infrastruktur Wilayah, 2022**

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	%
1	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.375.460.500	17.946.200.866	70,72
2.	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.783.577.100	4.566.052.100	95,45
3.	Program Penyelenggaraan Jalan	57.964.068.314	55.310.759.997	95,42
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	29.697.430.500	27.747.262.500	93,43
5.	Program Pengembangan Permukiman	24.293.402.000	23.441.239.500	96,49
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	5.631.282.750	4.790.302.000	85,07
7.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	275.280.000	247.411.000	89,88
	Jumlah	148.020.501.164	134.049.227.963	90,56

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

## **MISI 2**

:

Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

## **SASARAN STRATEGIS 11 :**

Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup

## **INDIKATOR KINERJA 16 :**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

---

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan Lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep IKL dan Konsep EPI. IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup, dan juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dikembangkan sejak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

IKLH adalah Metode Untuk menyimpulkan dengan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada periode tertentu. Indeks ini diterjemahkan dalam angka yang menerangkan apakah kualitas lingkungan berada pada kondisi baik, atau sebaliknya.

Penyusunan indeks kualitas lingkungan ini terkait erat dengan kebutuhan sasaran pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam RPJMD yang memuat sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas lingkungan. Kerangka indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) adalah pengembangan dari konsep yang dikembangkan oleh Virginia Commonwealth University (VCU) dan BPS

---

dengan menggunakan kualitas sungai, kualitas udara, tutupan lahan sebagai indikator Cara menentukan realisasi indikator menggunakan hasil perhitungan nilai indeks kualitas air dan indeks kualitas udara yang mengacu pada baku mutu atau standar yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (Baku Mutu Air dan Baku Mutu Udara Ambien).

Rumus yang digunakan untuk menghitung IKLH berdasarkan surat dirjen pencemaran dan kerusakan lingkungan kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan nomor S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional	$IKLH = (0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKL) + (0.099 \times IKAL)$
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	$IKLH = (0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKL) + (0.099 \times IKAL)$
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$

Kategori	Rentang Nilai
Sangat Baik	$IKLH > 80$
Baik	$70 < IKLH \leq 80$
Cukup Baik	$60 < IKLH \leq 70$
Kurang Baik	$50 \leq IKLH \leq 60$
Sangat Kurang Baik	$40 \leq IKLH < 50$
Waspada	$30 \leq IKLH < 40$

1. Perhitungan indeks kualitas air (IKA) dilakukan sebagai berikut

#### TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS AIR

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Air (IKA)	pH; BOD; COD; TSS; DO; NO <sub>3</sub> -N; Total Phosphat; Fecal Coliform.	<p>IP<sub>j</sub> = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j            C<sub>i</sub> = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran)            L<sub>ij</sub> = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j            M = maksimum, A = average (rata-rata)</p> $IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$

2. Indeks kualitas udara (IKU) model EV dikonversikan menjadi indeks kualitas udara melalui persamaan :

**TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS UDARA**

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Udara (IKU)	NO <sub>2</sub> dan SO <sub>2</sub>	$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$ $I_{eu} = 50\% \text{ Indeks SO}_2 + 50\% \text{ Indeks NO}_2$

3. Skema Indeks kualitas Lahan (IKL) melalui persamaan:

$$IKL = 100 - \left( \left( 84,3 - \left( \left( \frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

$$DKK = \sum_{\text{Rumus W di Tutupan Hutan}} \text{Rumus W di Tutupan Hutan} + \sum_{\text{Rumus W di Tutupan Belukar}} \text{Rumus W di Tutupan Belukar}$$

**DKK = Dampak Kebakaran dan Kanal**

**Rumus di Tutupan Hutan di Lahan Gambut;**

$$\begin{aligned}
 W_{\text{kanal di Lindung}} &: 0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{TH\_FLG\_Kanal}{Luas FLEG} \\
 W_{\text{kanal di Budidaya}} &: 0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{TH\_FBG\_Kanal}{Luas FBEG} \\
 W_{\text{terbakar di Lindung}} &: 0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{TH\_FLG\_Bakar}{Luas FLEG} \\
 W_{\text{terbakar di Budidaya}} &: 0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{TH\_FBG\_Bakar}{Luas FBEG}
 \end{aligned}$$

**Rumus di Belukar di Kawasan Hutan dan Fungsi Lindung di Lahan Gambut;**

$$\begin{aligned}
 W_{\text{kanal di Lindung}} &: 0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{(BH\_FLG\_Kanal + BL\_FLG\_Kanal) \times 0,6}{Luas FLEG} \\
 W_{\text{kanal di Budidaya}} &: 0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{(BH\_FBG\_Kanal + BL\_FBG\_Kanal) \times 0,6}{Luas FBEG} \\
 W_{\text{terbakar di Lindung}} &: 0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{(BH\_FLB\_Bakar + BL\_FLG\_Bakar) \times 0,6}{Luas FLEG} \\
 W_{\text{terbakar di Budidaya}} &: 0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{(BH\_FBG\_Bakar + BL\_FBG\_Bakar) \times 0,6}{Luas FBEG}
 \end{aligned}$$

Program pendukung yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran kinerja Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup antara lain:

- Program pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Program Pengelolaan Keaneka ragaman hayati (KEHATI).



## **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dikembangkan sejak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

IKLH adalah Metode Untuk menyimpulkan dengan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada periode tertentu. Indeks ini diterjemahkan dalam angka yang menerangkan apakah kualitas lingkungan berada pada kondisi baik, atau sebaliknya.

Penyusunan indeks kualitas lingkungan ini terkait erat dengan kebutuhan sasaran pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam RPJMD yang memuat sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas lingkungan. Kerangka indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) adalah pengembangan dari konsep yang dikembangkan oleh Virginia Commonwealth University (VCU) dan BPS dengan menggunakan kualitas sungai, kualitas udara, tutupan lahan sebagai indikator Cara menentukan realisasi indikator menggunakan hasil perhitungan nilai indeks kualitas air dan indeks kualitas udara yang mengacu pada baku mutu atau standar yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (Baku Mutu Air dan Baku Mutu Udara Ambien).

Pada tahun 2020 mengacu pada surat dirjen pencemaran dan kerusakan lingkungan kementrian Lingkungan Hidup dan kehutanan nomor S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 bahwa perhitungan untuk IKLH 2020 untuk kabupaten kota adalah sebagai berikut:

Lampiran Surat

Nomor : S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020  
Tanggal : 4 Desember 2020

**RUMUS PERHITUNGAN IKLH**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional	$IKLH = (0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKL) + (0.099 \times IKAL)$
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	$IKLH = (0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKL) + (0.099 \times IKAL)$
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$

Untuk kota Banjarbaru, sebagaimana disebutkan pada keterangan di muka bahwa nilai indeks kualitas air dan udara serta indeks tutupan lahan yang menjadi indikator penghitungan IKLH, dengan data sebagai berikut:

**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)  
Tahun 2022 Kota Banjarbaru**

IKA	55.26	<b>IKLH Kota Banjarbaru Tahun 2022 61.83</b>
IKU	87.64	
IKTL	25.37	

IKLH Provinsi = indeks kualitas lingkungan hidup tingkat Kab/Kota

$IKLH \text{ Kab/Kota} = (IKA \times 37,6\%) + (IKU \times 40,5\%) + (IKTL \times 21,9\%)$

$IKLH \text{ Kab/Kota} = (55.26 \times 37,6\%) + (87.64 \times 40,5\%) + (23.70 \times 21,9\%)$

$IKA \ 20,78 + IKU \ 35,49 + IKTL \ 5,56 = IKLH \ 61,83$

**Tabel 3.126.  
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, 2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kualitas lingkungan Hidup	Indeks	62.67	61.83	98.66%

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

**Tabel 3.127.**  
**Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup, 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air memenuhi baku mutu	57.67	55.26	92.82
		Indeks kualitas udara memenuhi baku mutu	87.91	87.64	99.69

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Banjarbaru masih dalam kategori Sedang (61,83) semoga ditahun mendatang akan terjadi peningkatan indeks di ikuti dengan peningkatan indeks bawaannya seperti Indeks kualitas air (IKA) yang sekarang masih ada sungai yang cemar sedang, dan lebih meningkatkan Indeks Kualitas udara (IKU).

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

**Tabel 3.128.**  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja**  
**IKLH 2 Tahun Terakhir**

No	Indikator Sasaran	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61.67	61.67	61.83
		110.44%	110.44%	98.66%

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (2 tahun terakhir) terlihat turun naik hal ini disebabkan berubahnya rumus perhitungan IKLH yang ditetapkan oleh kementrian LHK sejak tahun 2020.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/ Kota/Provinsi

**Tabel 3.129.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja IKLH**  
**dengan Kab/ Kota/Provinsi, 2022**

No.	Indikator kinerja	Kota Banjarbaru	Kab. Banjar	Kab. Tanah Laut	Kota Banjarmasin	Prov. Kal-Sel
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61.83	61.93	68.37	57.98	71.97

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru dibandingkan dengan kabupaten / kota / propinsi sekitar. Kota Banjarbaru lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut serta Propinsi Kalimantan Selatan hal ini dikarenakan Kota Banjarbaru tidak memiliki Hutan yang menjadi salah satu dasar untuk perhitungan indeks tutupan Lahan namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Banjarmasin.

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Dengan Target RPJMD dan Nasional

**Tabel 3.130.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja IKLH**  
**dengan Target RPJMD dan Target Nasional**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target RPJMD	Target Nasional
1.	Indeks kualitas lingkungan Hidup	61.83	66.67	69.22

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru tahun 2022 sebesar 61,83 belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 63,67 dan target nasional sebesar 69,22.

## **5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

### **Upaya yang telah dilakukan:**

Komitmen Walikota Banjarbaru untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik di Kota Banjarbaru sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program, adapun upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan mutu air seperti patrol sungai, dan lain-lain.
- b. Peningkatan koordinasi antar pusat, provinsi, dan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan mutu air.
- c. Peningkatan peran dunia usaha untuk pelaksanaan pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan.
- d. Pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air limbah terutama IPAL domestik dan USK.

### **Hambatan:**

- a. Beralih fungsinya kawasan hutan menjadi perumahan dan adanya proyek pemanfaatan material pematangan Lahan
- b. Adanya Kotoran ternak (sapi, ayam, kambing) yang dibuang ke sungai
- c. Masih adanya sampah organik dan an organik yang dibuang ke sungai
- d. Industri kecil (pabrik tahu) dan Rumah Makan yang tidak memiliki IPAL

### **Rencana Tindak Lanjut:**

- a. Menerapkan Perda IMB bagi pengembang menyediakan RTH seluas 30% di perumahan dan membuat sumur resapan dengan memperketat izin SPPL.
- b. Melaksanakan penanaman dan penghijauan di hulu sungai.
- c. Konservasi pada bagian hulu sungai (sumber air) dengan menjadikan RTH dan membebaskan daerah hulu.

- d. Memperhatikan dampak Lingkungan dalam pelaksanaan proyek.
- e. Menanam pohon satu rumah satu pohon.
- f. Memasayaratkan Pembuatan Biogas dan pupuk kandang.
- g. Membentuk Bank sampah dan Pembangunan TPS 3R.
- h. Meningkatkan Pengawasan terhadap Industri kecil dan rumah makan terhadap pembuangan limbah cairnya.
- i. Meningkatkan penegakan hukum pabrik dan rumah makan tidak ada IPAL.
- j. Melaksanakan penanaman pohon di jalan raya terutama di jalan yang masih gersang seperti trikora dan pelaksanaan penanaman pohon pada setiap rumah minimal 1 pohon sehingga meningkatkan nilai ITL serta mengurangi polusi.
- k. Menindak tegas oknum penebangan pohon illegal.

## 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.131.**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKLH, 2022**

Program	Indikator Sasaran Program	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Efisiensi
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indek kualitas air dan indeks kualitas udara yang memenuhi baku mutu	161	92,42	68,58
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	65,22	93,39	-28,17
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota	115	98,24	16,76

Program	Indikator Sasaran Program	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Efisiensi
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase sekolah yang melaksanakan program Adiwiyata/berwawasan lingkungan	100	100	0
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100	98,78	1,22
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diselesaikan	200	99,22	100,78
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang ditangani oleh Pemerintah Kota	100.08	97,65	2,43
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase taman keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan, kebun raya, RTH, dan taman kehati lainnya yang terpelihara dengan baik	100	97,55	2,45

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

## B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan pagu anggaran awal program yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya sasaran Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup tahun 2022 sebesar **Rp. 2.673.153.500** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 2.555.919.982** sebesar atau **95,61%** dengan rincian per program sebagai berikut:

**Tabel 3.132.**  
**Realisasi Anggaran Program Pendukung IKLH, 2022**

Program / Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Serapan anggaran (%)
Program pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
1	Kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/kota Sub kegiatan: Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	834.486.000	757.288.000	90,75
2.	Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi Gas Rumah kaca, mitigasi dan Adaptasi perubahan Iklim	65.000.000	64.989.900	99,98
Program Pengelolaan Keaneka ragaman hayati (KEHATI)				
3.	Pengelolaan Taman Keanekaragaman hayati diluar Kawasan hutan	228.510.000	224.046.400	98,04
4.	Pengelolaan Ruang Terbuka hijau	1.445.157.500	1.412.208.659	96,44
5.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneka ragaman hayati	100.000.000	97.387.023	97,39
Jumlah		2.673.153.500	2.555.919.982	95,61

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

### **MISI 3 :**

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah

### **SASARAN STRATEGIS 12 :**

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah

### **INDIKATOR KINERJA 17 :**

Nilai SAKIP

---

Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah menggambarkan penilaian kinerja berkenaan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang dapat dipertanggung-

---



jawabkan baik keberhasilan atau kegagalan, atas pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan guna mencapai visi misi secara terukur dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) serta dilaksanakan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah diukur berdasarkan Nilai SAKIP, hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah dengan Indikator nilai SAKIP berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu kategori tingkat BB dengan nilai 70,01, telah terealisasi yaitu katagori tingkat B dengan nilai 66,74. Capaian kinerjanya/kategori indikator ini sebesar 95,32% (Baik).

Pengukuran realisasi indikator Nilai SAKIP diperoleh berdasarkan Hasil Evaluasi dari Kementrian PANRB dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.133.**  
**Pengukuran Realisasi Indikator Nilai SAKIP Berdasarkan Hasil Evaluasi Kementrian PANRB, 2022**

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2022
1	Perencanaan Kinerja	30	21,56
2	Pengukuran Kinerja	30	19,65
3	Pelaporan Kinerja	15	11,03
4	Evaluasi Internal	25	14,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	66,74
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2022

Adapun program penunjang yang mendukung dalam pencapaian IKU nilai SAKIP, antara lain: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota; Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi 2 tahun sebelumnya dimana IKU nilai SAKIP mengalami peningkatan, pada tahun 2020 sebesar **64,43** tahun 2021 sebesar **65,76** dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan nilai sebesar **66,74**.

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi.

Nilai SAKIP yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dibandingkan dengan Kabupaten/Kota/Provinsi sebagai berikut:

**Tabel 3.134.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP**  
**Kab/Kota/Provinsi, 2022**

No.	Indikator kinerja	Kota Banjarbaru	Kab. Tapin	Kab. Banjar	Kota Banjarmasin	Prov. Kalsel
1.	Nilai SAKIP	B	B	B	BB	A

Sumber: Data Bagian Organisasi Setda Kota Banjarbaru

## 4. Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional.

Realisasi nilai SAKIP Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2022 adalah **66,74** dan target akhir nilai SAKIP pada RPJMD tahun 2026 adalah **80,01** sedangkan **target Nasional tidak ada**.

## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

**Upaya yang telah dilakukan:**

- a. Menindaklanjuti rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP

- b. Melakukan pembinaan pengelolaan SAKIP SKPD.

**Hambatan:**

- a. Belum melakukan reviu terhadap program dan kegiatan serta komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran
- b. Kualitas pengukuran terhadap outcome dan output secara berkala belum dilaksanakan
- c. Pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi belum dilaksanakan.
- d. Pemahaman dan keterlibatan Pimpinan SKPD masih kurang.
- e. Pemberian Reward and Punishment belum dilakukan.

**Rencana Tindak Lanjut:**

- a. Melakukan reviu terhadap program dan kegiatan serta komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran;
- b. Melakukan pengukuran terhadap outcome dan output secara berkala;
- c. Melaksanakan pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi;
- d. Memberikan pemahaman dan keterlibatan Pimpinan SKPD;
- e. Memberikan Pemberian *Reward and Punishment*.

**6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Berdasarkan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Penelitian dan pengembangan daerah yang mendukung indikator kinerja utama Nilai SAKIP Tahun 2022, diperoleh tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.135.**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Nilai SAKIP, 2022**

No.	Program	Indikator	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Efisiensi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP/RB yang selesai ditindak lanjuti	100	93,12	6,88
		Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindak lanjuti	98	96,87	1,13
2.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi perencanaan pembangunan daerah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	96,30	3,7
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan Renstra SKPD dengan Sasaran dan Program di RPJMD	100	93,10	6,9
4.	Penelitian dan pengembangan daerah	Persentase kajian/penelitian dan pengembangan yang dijadikan bahan dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	100	93,24	6,76

Sumber: Data Bagian Organisasi Setda Kota Banjarbaru

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Pagu anggaran program untuk mendukung terealisasinya IKU Nilai SAKIP tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 4.033.040.435** dengan relisasi anggaran sebesar **Rp. 3.811.057.667** atau **94,49%**.

**Tabel 3.136.**  
**Realisasi Anggaran Program Pendukung Nilai SAKIP, 2022**

No	Program	Pagu (Rp)	Keuangan	
			REALISASI (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota	908.514.000	868.159.000	95,56
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.034.821.500	996.483.232	96,30
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.463.222.685	1.362.300.685	93,10
4.	Program Penelitian dan pengembangan daerah	626.482.250	584.114.750	93,24
Jumlah		4.033.040.435	3.811.057.667	94,49

Sumber: Data Bagian Organisasi Setda Kota Banjarbaru

**MISI 3 :**

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah

**SASARAN STRATEGIS 12 :**

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah

**INDIKATOR KINERJA 18 :**

Nilai LPPD

LPPD merupakan Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan atas kewenangan urusan yang dilaksanakan oleh daerah. LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut.

Pengukuran capaian kinerja indikator nilai LPPD diperoleh dari hasil pelaksanaan penilaian LPPD Pemerintah Kota Banjarbaru yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam pelaksanaannya sering kali terhambat pada kurangnya pemahaman dalam mengartikan Indikator Kinerja Kunci sehingga

data indikator tidak sesuai dengan yang dimaksud. Upaya yang telah dilakukan untuk merealisasikan target nilai LPPD adalah dengan:

- a. Melaksanakan sosialisasi tentang tata cara pelaksanaan Indikator Kinerja Kunci LPPD dan melakukan evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan kepada seluruh SKPD
- b. Lebih intensif berkoordinasi dengan SKPD terkait progress pelaksanaan indikator yang akan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan LPPD Kota Banjarbaru.

## **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah dengan Indikator nilai LPPD berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu nilai sangat tinggi (3,05) telah terealisasi yaitu dengan nilai sangat tinggi (3,2921). Capaian kinerjanya/kategori indikator ini sebesar 107,9% dengan kategori sangat baik. (Realisasi menggunakan hasil pengukuran tahun 2020).

Pemerintah Kota Banjarbaru dalam penyelenggaraan pemerintahan terus berkomitmen untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Program penunjang yang mendukung dalam pencapaian IKU Nilai LPPD, antara lain:

- a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Sub Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah);
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota.

## **2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan 2 Tahun Terakhir**

Penilaian LPPD terakhir dilaksanakan pada tahun 2019 dengan nilai 3,2921. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, nilai yang menjadi acuan pada indikator ini adalah nilai yang dihasilkan pada tahun 2019.

## **3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional.**

Realisasi nilai LPPD Pemerintah Kota Banjarbaru dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 telah terealisasi sebesar 3,05% dengan capaian 107,9% dan **target Nasional tidak ada.**

## **4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

### **Upaya yang telah dilakukan:**

Menyusun dan mengirimkan hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebelum batas akhir pengiriman pada tanggal 31 Maret 2022.

### **Hambatan:**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah selesai dilaksanakan dan laporan telah dikirimkan tepat waktu namun, dalam proses pengumpulan data dukung terdapat sedikit kendala karena beberapa data dukung IKK yang tidak sesuai dalam hasil review Inspektorat sehingga memerlukan waktu untuk mengumpulkan kembali data yang sesuai.

### **Rencana Tindak Lanjut:**

Langkah yang akan dilakukan dalam rangka menanggulangi hambatan yang dijabarkan sebelumnya adalah melaksanakan peningkatan koordinasi dengan Tim Reviu, Tim APIP dan seluruh SKPD terkait keakuratan data dukung IKK.

## 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian target terutama dari segi anggaran telah dilakukan. Efisiensi atas penggunaan anggaran tersebut adalah sebesar 5,5% melalui program administrasi tata pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

## B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran program untuk mendukung terealisasinya nilai LPPD tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 132.513.200,00** dengan relisasi anggaran sebesar **Rp. 125.313.200,00** atau **94,5%**.

**Tabel 3.137.**  
**Realisasi Anggaran Program Pendukung Nilai LPPD, 2022**

No	Program	Pagu (Rp)	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	%
1.	Program administrasi tata pemerintahan (Sub Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah)	132.513.200	125.313.200	94,5
	Jumlah	132.513.200	125.313.200	94,5

Sumber: Data Bagian Pemerintahan Setda Kota Banjarbaru

**MISI 3 :**

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah

**SASARAN STRATEGIS 12 :**

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah

**INDIKATOR KINERJA 19 :**

Opini BPK

---

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah menggambarkan penilaian kinerjanya dalam tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang dapat dipertanggung-jawabkan baik keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan guna

---



menpcai visi misi secara terukur, terselenggaranya pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) dan dilaksanakan secara efesien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Indikator Kinerja adalah opini BPK, indikator ini dipilih dengan maksud sebagai upaya konkrit dan niat baik pemerintah daerah dalam mewujudkan tranparansi dan akuntabelitas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan dalam mengalokasikan anggaran daerah agar efektif, efesien dan bertanggungjawab dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Banjarbaru pada periode RPJMD Tahun 2016-2021. Pengukuran capaian kinerja indikator ini berdasarkan hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan.

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan sistem pengendalian internal pemerintah dengan indikator Opini BPK adalah:

**Tabel 3.138.**  
**Realisasi Kinerja Opini BPK, 2022**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%

Sumber: Data BPKAD Kota Banjarbaru

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas, menunjukan bahwa realisasi kinerja indikator Opini BPK pada tahun 2022 ditargetkan **WTP** dan terealisasi **WTP** dengan capaian kinerja 100% (kategori capaian kinerja **Baik**).

Pemerintah Kota Banjarbaru dalam penyelenggaraan pemerintah terus berkomitmen untuk mendapatkan opini BPK dengan terbaik. Opini BPK

merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni kesesuaian dengan Standart Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemerintah Kota Banjarbaru berarti laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya tidak material dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Program penunjang yang mendukung dalam pencapaian IKU Opini BPK, antara lain:

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

**Tabel 3.139.**  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Opini BPK**  
**2 Tahun Terakhir**

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian
1.	Opini BPK	WTP 100%	WTP 100%	WTP 100%

Sumber: Data BPKAD Kota Banjarbaru

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya, pada indikator sasaran opini BPK yaitu tahun 2022 dilihat dari realisasi adalah WTP (Wajar Tanpa

Pengecualian). Opini WTP ini merupakan tingkatan paling tinggi yang menggambarkan konsistensi kualitas laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru yang baik.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/ Kota/ Provinsi

Opini BPK merupakan indikator yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis. Hasil penilaian pada kabupaten/ kota/ provinsi dibandingkan dengan Kota Banjarbaru sebagai berikut:

**Tabel 3.140.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Opini BPK**  
**dengan Kab/Kota/Provinsi, 2022**

No	Indikator Kinerja	Kota Banjarbaru	Kab. Banjar	Kab. Tanah Laut	Kota Banjarmasin	Prov. Kal-Sel
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Data BPKAD Kota Banjarbaru

Perbandingan dengan Kabupaten/ Kota/ Propinsi adalah WTP. Semua pemerintah daerah Se-Kalimantan Selatan sudah membuat laporan keuangan daerahnya dengan baik.

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

Realisasi kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 target Nasional tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 3.141.**  
**Perbandingan Realisasi Opini BPK dengan**  
**Target RPJMD dan Target Nasional**

No.	Indikator Kinerja	Pemko Banjarbaru Tahun 2022	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Opini BPK	WTP	WTP	-

Sumber: Data BPKAD Kota Banjarbaru, 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 yaitu WTP jika dibandingkan dengan target jangka menengah (RPJMD) tahun 2026 yaitu WTP maka sejak

tahun 2018 target RPJMD sudah mencapai target, namun kinerja ini tetap harus dipertahankan ditahun berikutnya karena penilaiannya dilaksanakan setiap tahun. Sedangkan untuk **target Nasional tidak ada**.

## **5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

### **Upaya yang telah dilakukan:**

- a. Berkoordinasi dengan pihak Kemendagri selaku penyedia aplikasi.
- b. Pembuatan BKU secara manual.
- c. Penggunaan Aplikasi pendamping yaitu FMIS.
- d. Rekonsiliasi per triwulan.
- e. Penundaan TPP.

### **Hambatan:**

- a. Penatausahaan pada SKPD dengan KPA terdapat banyak error.
- b. Koreksi atas kesalahan tidak dapat di akomodasi pada SIPD.
- c. Data pendapatan tidak tersinkronisasi pada SIPD.
- d. Pembuatan BKU BUD tidak dapat otomatis.
- e. Keterlambatan dalam menyampaikan data.
- f. Data yang diinput tidak/kurang didukung data pendukung.
- g. SDM kurang memahami aset tetap dan asset lancar.
- h. SDM kurang memahami aplikasi.

### **Rencana Tindak Lanjut:**

- a. Pembimbingan teknis kepada SKPD.
- b. Memaksimalkan pembimbingan saat inputan per triwulan.
- c. Melakukan pendekatan kepada SKPD terkait data pendukung aset tetap dan aset lancar.

## 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian target terutama dari segi anggaran telah dilakukan. Efisiensi atas penggunaan anggaran tersebut adalah sebesar 22,85% melalui program pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh BPKAD Kota Banjarbaru.

## B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran program untuk mendukung terealisasinya Opini BPK tahun 2021 adalah sebesar Rp. 15.539.422.505,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.710.832.791,00 atau 69%.

**Tabel 3.142.**  
**Realisasi Anggaran Program Pendukung Opini BPK, 2022**

No	Program	Pagu (Rp)	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	%
1.	Program pengelolaan keuangan daerah	10.689.967.505	7.114.082.640	67
2.	Program pengelolaan barang milik daerah	4.849.455.000	3.596.750.151	74
Jumlah		15.539.422.505	10.710.832.791	69

Sumber: Data BPKAD Kota Banjarbaru

### MISI 3

:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah

### SASARAN STRATEGIS 2 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah

### INDIKATOR KINERJA 12 :

Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)

Pelayanan publik yang transparan dan akuntabel akan diwujudkan dengan smart government, dimana pelayanan dilaksanakan memanfaatkan TIK dan Pelayanan publik yang partisipatif dengan pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan dengan berbagai media serta pelayanan publik yang inovatif melalui penataan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional.

Sebagai tindaklanjut RPJMN 2020-2024 melalui Perpres No.18 th 2020 yg menetapkan Manajemen Risiko Indeks level 3 sebagai salah satu indikator keberhasilan Proyek Prioritas “Penguatan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi”.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah di ukur berdasarkan Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) yang hasil penilaian tersebut Laporan Hasil *Quality Assurance* (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP.

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.143.  
Realisasi Kinerja Indeks Penerapan Manajemen Resiko, 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Penerapan Manajemen	Level	3	2	98.33

Resiko (MRI)	(3.00)	(2.95)	(Baik)
--------------	--------	--------	--------

Sumber: Data Inspektorat Kota Banjarbaru

Indikator Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu level 3 dengan nilai 3.00 telah terealisasi yaitu level 2 dengan nilai 2.95. capaian kinerjanya / katagori indicator ini sebesar 98.33 (baik).

Program penunjang yang mendukung dalam pencapaian IKU Indeks Penerapan Manajemen Resiko, antara lain:

- Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Pengukuran realisasi indikator Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) diperoleh berdasarkan hasil Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2022 pada Pemerintah Kota Banjarbaru Nomor: PE.09.03/LHP-446/PW16/3/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh BPKP dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.144.**  
**Hasil Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, 2022**

Komponen Penilaian	Bobot	Skor
Penetapan Tujuan	40%	1,400
Struktur dan Proses	30%	0,812
Pencapaian Tujuan	30%	0,795
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		3,007
Nilai MRI		2,95
Nilai IEPK		2,87

Sumber: Data Inspektorat Kota Banjarbaru

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

**Tabel 3.145.**  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Penerapan Manajemen Resiko 2 Tahun Terakhir**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi	Realisasi	Realisasi
1.	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)	Level 1 (1,91)	Level 2 (2,77)	Level 2 (2,95)

Sumber: Data Inspektorat Kota Banjarbaru

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja sebelumnya mengalami peningkatan walaupun peningkatannya belum mencapai target.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD dan Target Nasional

**Tabel 3.146.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Penerapan Manajemen Resiko dengan Target RPJMD dan Target Nasional**

No.	Indikator Kinerja	Kota Banjarbaru	Target RPJMD Tahun 2022	Target Nasional
1.	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)	Level 2	Level 3	Level 3

Sumber: Data Inspektorat Kota Banjarbaru

Realisasi nilai Indeks Manajemen Risiko (MRI) Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2022 sebesar 2.95 yaitu berada di level 2 belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target RPJMD dan target Nasional yaitu level 3.

### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

#### Upaya yang telah dilakukan:

Upaya yang telah dilakukan untuk merealisasikan target adalah dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2022. Adapun hasil rekomendasikan, yaitu:

- Proses manajemen risiko (identifikasi, analisis, kegiatan pengendalian, dan pemantauan RTP dan kejadian risiko) belum dilakukan dengan baik pada seluruh OPD.
- Pengawasan/reviu terhadap proses manajemen risiko belum dilakukan secara menyeluruh, hanya beberapa sampel pada OPD.



- c. Terkait dengan contoh implementasi manajemen risiko, terdapat risiko kemitraan yaitu tidak ada usaha perseorangan yang memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Perseorangan) dengan rencana tindak pengendalian sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan jasa konstruksi yang tidak selaras dengan sasaran peningkatan infrastruktur kota yang berkualitas;
- d. Rendahnya skor sub unsur yang terkait dengan pencapaian tujuan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (1.1, 1.3, 2.2, dan 4.1), disebabkan hasil veto yang dilakukan pada tahap evaluasi karena terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pejabat eselon dua.

Kegagalan yang terjadi dalam proses Penerapan Manajemen Risiko, antara lain:

- a. Proses manajemen risiko (identifikasi, analisis, kegiatan pengendalian, dan pemantauan RTP dan kejadian risiko) belum dilakukan dengan baik pada seluruh OPD;
- b. Pengawasan/reviu terhadap proses manajemen risiko belum dilakukan secara menyeluruh, hanya beberapa sampel pada OPD;
- c. Terkait dengan contoh implementasi manajemen risiko, terdapat risiko kemitraan yaitu tidak ada usaha perseorangan yang memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Perseorangan) dengan rencana tindak pengendalian sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan jasa konstruksi yang tidak selaras dengan sasaran peningkatan infrastruktur kota yang berkualitas;
- d. Rendahnya skor sub unsur yang terkait dengan pencapaian tujuan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (1.1, 1.3, 2.2, dan 4.1), disebabkan hasil veto yang dilakukan pada tahap evaluasi karena terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pejabat eselon dua.

### **Rencana Tindak Lanjut:**

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan level Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI), adalah sebagai berikut:

1. Melakukan percepatan implementasi manajemen risiko dengan:
  - a) Penyediaan sumber daya yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan penggunaan dokumen risiko sebagai dasar pengambilan keputusan;
  - b) Peningkatan kompetensi pegawai pengelola risiko baik pada tingkat pemda maupun OPD;
  - c) Pemutakhiran daftar risiko secara berkala mulai dari risiko strategis Pemda, risiko strategis OPD sampai dengan risiko operasional OPD;
  - d) Penyusunan register risiko *fraud* untuk meminimalisir terjadinya risiko korupsi;
  - e) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RTP.
2. Melakukan evaluasi dan menyempurnakan penjenjangan kinerja (*cascading*) serta atribut kinerja/sasaran (target dan indikator) tingkat Pemda dan OPD:
  - a) Melakukan pembinaan manajemen risiko, termasuk manajemen risiko *fraud*;
  - b) Mensosialisasikan dan mengimplementasikan kebijakan manajemen risiko secara menyeluruh;
  - c) Melakukan pengawasan dan reviu proses manajemen risiko secara menyeluruh dan
  - d) Mensosialisasikan dan mengoptimalkan penerapan WBS.

### **5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Berdasarkan Program penyelenggaraan pengawasan dan Program perumusan kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang mendukung indikator kinerja utama Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Tahun

2022, diperoleh tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.147.**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indeks**  
**Penerapan Manajemen Resiko, 2022**

No.	Program	Indikator	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	100	83,56	16,44
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	100	94,39	5,61
Jumlah			100	88,97	11,02

Sumber: Data Inspektorat Kota Banjarbaru

## B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran yang tersedia pada Program penunjang IKU Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) dengan pagu **Rp. 3,633,682,750** terealisasi **Rp. 3,174,794,202** dengan persentase **87,37%**. dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.148.**  
**Realisasi Anggaran Program Pendukung Indeks**  
**Penerapan Manajemen Resiko, 2022**

No.	Program	Pagu (Rp)	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2,355,164,750	1,967,946,500	8,56%
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1,278,518,000	1,206,847,702	94,39%
Jumlah		3,633,682,750	3,174,794,202	87,37%

Sumber: Data Inspektorat Kota Banjarbaru

### **MISI 3**

:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah

### **SASARAN STRATEGIS 12 :**

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah

### **INDIKATOR KINERJA 21 :**

Indeks Profesionalitas ASN

---

Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN. Serta untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi sesuai Peraturan presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang tentang manajemen ASN, dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran IP ASN serta Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengukuran IP ASN menyebutkan bahwa profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa, untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN guna melihat kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan selain itu Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) juga merupakan salah satu indikator dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Selain itu IP-ASN merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme, sehingga Instansi Pemerintah baik Pusat/Daerah diwajibkan untuk melakukan pengukuran IP ASN secara berkala pada setiap tahunnya.

---

Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN mencakup:

a. Dimensi kualifikasi.

Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS, meliputi :

- 1) Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
- 2) Pendidikan S-2 (Strata Dua);
- 3) Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
- 4) Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
- 5) Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas(SLTA)/sederajat;
- 6) Di bawah SLTA.Instrumen Pengukuran pada dimensi kualifikasi bobot penilaiannya sebagai berikut:
  - 1) Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-3(Strata Tiga);
  - 2) Bobot nilai sebesar 20 (dua puluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-2 (StrataDua);
  - 3) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-1 (Strata Satu) /D-IV (Diploma Empat);
  - 4) Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-III (DiplomaTiga);
  - 5) Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat;
  - 6) Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan di bawah.

b. Dimensi kompetensi.

Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas:

1) Diklat Kepemimpinan

Instrumen Pengukuran pada diklat kepemimpinan bobot penilaiannya sebagai berikut :

- a) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki;
- b) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki.

2) Diklat Fungsional.

Instrumen Pengukuran pada diklat fungsional bobot penilaiannya sebagai berikut :

- a) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki;
- b) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki.

3) Diklat Teknis.

Instrumen Pengukuran pada diklat teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP dengan bobot penilaian sebagai berikut :

- a) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;
  - b) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;
  - c) Bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - d) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 4) Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya.
- Instrumen Pengukuran pada seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya dengan bobot penilaian sebagai berikut:
- a) Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - b) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang belum mengikuti seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun

terakhir;

- c) Bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Keikutsertaan dalam seminar / workshop / kursus/magang/sejenisnya tersebut dibuktikan dengan sertifikat/ surat tugas dan sejenisnya.

c. Dimensi Kinerja.

Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup sebagai berikut :

- 1) Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 2) Perilaku Kerja Pegawai (PKP).

Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut :

- a) Bobot nilai sebesar 30 (tiga puluh) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- b) Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan kriteria baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- c) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh



- lima) dengan kriteria cukup dalam 1(satu) tahun terakhir;
- d) Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) dengan kriteria sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - e) Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja 50 (lima puluh) ke bawah dengan kriteria kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.

d. Dimensi disiplin.

Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima yang mencakup:

- 1) Hukuman disiplin ringan;
- 2) Hukuman disiplin sedang;
- 3) Hukuman disiplin berat.

Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:

- a) Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- b) Bobot nilai sebesar 3 (tiga) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
- c) Bobot nilai sebesar 2 (dua) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplintingkat sedang;
- d) Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplintingkat berat.

Hukuman disiplin yang diatas yaitu yang telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

e. Kategori tingkat Profesionalitas ASN.

Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:

- 1) 91 – 100;
- 2) 81 – 90;
- 3) 71 – 80;
- 4) 61 – 70; dan
- 5) 60 ke bawah.

Sebutan tingkat Profesionalitas ASN diatas adalah :

- 1) Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91– 100;
- 2) Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81–90;
- 3) Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71–80;
- 4) Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61–70;
- 5) Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah.

### FORMULA PERHITUNGAN IP ASN

Jumlah Total Hasil Perkalian :

(Bobot Dimensi/Indikator) x Skor (masing-masing jawaban Dimensi/Indikator)

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

IP <sub>1</sub>	=	W <sub>1j</sub> * R <sub>1j</sub>
IP <sub>2</sub>	=	W <sub>2k</sub> * R <sub>2k</sub>
IP <sub>3</sub>	=	W <sub>3l</sub> * R <sub>3l</sub>
IP <sub>4</sub>	=	W <sub>4m</sub> * R <sub>4m</sub>

Dimana:

- IP = Indeks Profesionalitas ASN
- IP<sub>i</sub> = Indeks Profesionalitas ke-i
- IP<sub>1</sub> = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi
- IP<sub>2</sub> = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi
- IP<sub>3</sub> = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja
- IP<sub>4</sub> = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin
- W<sub>1j</sub> = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j, Rating Jawaban Indikator

Kualifikasi ke-j

W2k = Bobot Indikator Kompetensi ke-k, Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k

W3l = Bobot Indikator Kinerja ke-l, Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l

W4m = Bobot Indikator Disiplin ke-m, Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah dengan Indikator Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) adalah:

**Tabel 3.149.**  
**Realisasi Kinerja IP ASN, 2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian/ Kategori
1.	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)	Indeks	73	54,68 (Rendah/ Nilai Sementara)	74,90%

Sumber: Data BKPP Kota Banjarbaru

Indikator Indeks Profesionalitas ASN berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu kategori tingkat penilaian *SEDANG* dengan Indeks 73, dan telah terealisasi dengan kategori tingkat penilaian *SANGAT RENDAH* dengan Indeks 54,68. Capaian Kinerjanya / Kategori Indikator ini adalah sebesar 74,90% (sedang). Pengukuran indikator Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) diperoleh berdasarkan hasil penilaian sementara IP ASN Pemerintah Kota Banjarbaru yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN Pusat) per Januari 2023 yang dapat dilihat pada *aplikasi DJASN* yang terintegrasi dengan *aplikasi SAPK* ( Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian ) yang data nya bersumber pada hasil inputan yang dilaksanakan BKPP Kota Banjarbaru melalui Aplikasi SAPK dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.150.**  
**Realisasi IP ASN per Dimensi**

No	Komponen Yang Di Nilai	Bobot	Nilai 2021
1	Dimensi Kualifikasi	25	13,67
2	Dimensi Kompetensi	40	11,94
3	Dimensi Kinerja	30	24,11
4	Dimensi Disiplin	5	4,96
	Nilai Hasil Evaluasi	100	54,68
	Indeks Profesionalitas ASN		Sangat Rendah

Sumber: Data BKPP Kota Banjarbaru

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil penilaian sementara dapat dilihat bahwa nilai/Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Pemerintah Kota Banjarbaru ada pada Kategori *Sangat Rendah dengan nilai 54,68*. Pemerintah Kota Banjarbaru masih dapat meningkatkan realisasi nilai / indeks tersebut sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu akhir bulan maret tahun 2023, penilaian atas IP ASN secara final akan dilaksanakan pada bulan April 2023 dan nilai sesungguhnya akan di dapatkan.

Adapun program penunjang yang mendukung dalam pencapaian IKU Indeks Profesional ASN, antara lain:

- a. Program Kepegawaian Daerah;
- b. Program Pengembangan SDM;
- c. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

**Tabel 3.151.**  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IP ASN**  
**2 Tahun Terakhir**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		Target/ Realisasi/ Capaian	Target/ Realisasi/ Capaian	Target/ Realisasi/ Capaian
1	IP ASN	71,67	72	73
		38,59	39,23	54,68
		53,8	54,49%	74,90%

Sumber: Data BKPP Kota Banjarbaru

Dari tabel diatas dapat dilihat terjadi peningkatan dalam realisasi dan capaian Indeks Profesionalitas ASN, dimana pada tahun 2021 target 72 realisasi 39,23 dengan capaian sebesar 54,49%, sedangkan tahun 2022 dengan target 73 realisasi adanya 54,68 dengan capaian sebesar 74,90%. Dapat dilihat terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 20,41.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

**Tabel 3.152.**  
Perbandingan Realisasi Kinerja IP ASN  
dengan Kab/Kota/Provinsi, 2022

No.	Indikator Kinerja	Kota Banjarbaru	Kab. Banjar	KotaBjm	Kab. Tanah Laut	Provinsi Kalsel
1	IP ASN	54,68	38,37	30,21	56,80	30,54

Sumber: Data BKPP Kota Banjarbaru

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD

**Tabel 3.153.**  
Perbandingan Realisasi Kinerja IP ASN  
dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kota Banjarbaru	Target RPJMD
1	IP ASN	54,68 (Nilai Sementara)	77

Sumber: Data BKPP Kota Banjarbaru

Dengan melihat hasil penilaian sementara Indeks Profesionalitas ASN sebesar 54,68 belum dapat mencapai target yang diinginkan apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 RPJMD sebesar 77. Sedangkan untuk **target nasional tidak ada**.

### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

#### Upaya yang telah dilakukan:

- Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru pada tahun 2022 telah melaksanakan update data pegawai secara keseluruhan

- pada *aplikasi SAPK*, terkait Pengembangan Kompetensi, Capaian Kinerja.
- Membuat surat edaran berupa pemberitahuan bagi SKPD yang melaksanakan Pengembangan Kompetensi (Diklat Teknis/ Fungsional/ Bimtek/ Workshop) agar membuat sertifikat tanda mengikuti dan diserahkan kepada BKPP.
  - Membuat surat edaran terkait penyusunan penilaian Dokumen Prestasi Kerja.
  - Menyusun Rencana Aksi Pengembangan Kompetensi yang berisi tentang daftar diklat yang diperlukan SKPD.

#### **Hambatan:**

- BKPP Kota Banjarbaru masih belum dapat merealisasikan setiap PNS harus mengikuti pengembangan kompetensi/Diklat 20 JPL setiap tahunnya, dikarenakan keterbatasan anggaran.
- Pelaksanaan Pendidikan Pelatihan tidak satu pintu di BKPP, masih terdapat beberapa SKPD yang menyelenggarakan pengembangan kompetensi/Diklat sendiri tetapi tidak melaporkan hasil pelaksanaannya kepada BKPP.
- Kualitas SDM masih rendah, menurut data PNS berdasarkan kualitas Pendidikan secara terperinci sebagai berikut:

SD	SLTP	SLTA	DI	DII	DIII	DIV	S1	S2	S3
6	14	335	23	42	640	77	2129	402	4

Dari data tersebut masih banyak PNS Kota Banjarbaru yang belum sarjana (S1), berdasarkan rumus perhitungan Indeks Profesionalisme ASN makin tinggi tingkat pendidikan akan mempengaruhi capaian Indeks Profesionalisme ASN.

- Partisipan atau jumlah pegawai yang aktif memberikan data terkait Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) masih sangat sedikit, dikarenakan masih banyak PNS yang tidak mengetahui serta memahami tentang IP

ASN.

- b. Terbatasnya admin pengukuran Indeks Profesionalitas (IP ASN) untuk melakukan update data secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
- c. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman PNS dalam melaksanakan penyusunan Dokumen Penilaian Kinerja masing-masing.
- d. Masih terdapat PNS yang mendapatkan hukuman disiplin.

**Rencana Tindak Lanjut:**

- a. Merencanakan setiap PNS dapat mengikuti pengembangan kompetensi/Diklat 20 JPL selama setahun dengan dukungan anggaran yang sesuai.
- b. Melaksanakan Update data secara menyeluruh salah satu nya dengan cara jemput bola secara langsung ke SKPD - SKPD terkait pemenuhan data dukung Indeks Profesionalitas ASN pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
- c. Memberikan peluang dan informasi bagi ASN untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut:
  - 1) Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas
  - 2) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Teknis dan Fungsional
  - 3) Percepatan Pemrosesan pemberian rekomendasi Ijin belajar bagi ASN sesuai persyaratanyang berlaku
- d. Melaksanakan Sosialisasi tentang penyusunan Dokumen Sasaran dan Penilaian Kinerja dengandatang langsung ke SKPD.
- e. Melaksanakan pembinaan disiplin secara berkala dengan melakukan monitoring dan evaluasi ke SKPD agar dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran disiplin.

## 6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebesar 77 yang didapat dari hasil tingkat capaian kinerja IKU IP ASN sebesar 74,90% dikurangi tingkat capaian serapan anggaran sebesar 82,67% sebagai berikut:

**Tabel 3.154.**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IP ASN, 2022**

No	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	Indeks Profesionalitas ASN	82,67%	74,90%	(7,77)

Sumber: Data BKPP Kota Banjarbaru

## B. REALISASI ANGGARAN

Indikator Indeks Profesionalitas ASN tahun 2022 tentu saja tidak lepas dari dukungan anggaran dari APBD Kota Banjarbaru yang termuat dalam 2 Program yaitu Kepegawaian Daerah sebesar Rp. 6.455.869.500,- yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.980.995.419,- tingkat capaian sebesar 77,15%. Program selanjutnya adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.002.211.000,- realisasi sebesar Rp. 2.838.054.194,- dan tingkat capaian sebesar 94,53%, jika digabungkan untuk tingkat capaian dari serapan anggaran 2 (dua) Program tersebut adalah 83%.

**Tabel 3.155.**  
**Realisasi Anggaran Program Pendukung IP ASN, 2022**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian
	9.458.080.500	7.819.049.613	1.639.030.887	82,67
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	6.455.869.500	4.980.995.419	1.474.874.081	77,15
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.704.078.250	1.447.273.250	256.805.000	84,93
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk	87.744.250	87.744.250		100



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian
Pelaksanaan Pengadaan ASN			-	
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	508.870.000	459.495.000	49.375.000	90,30
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	732.820.500	539.630.500	193.190.000	73,64
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	122.253.500	122.253.500	-	100,00
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	252.390.000	238.150.000	14.240.000	94,36
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	1.019.562.750	995.904.250	23.658.500	97,68
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	151.200.000	150.200.000	1.000.000	99,34
Pengelolaan Promosi ASN	868.362.750	845.704.250	22.658.500	97,39
Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	1.670.270.000	740.378.000	929.892.000	44,33
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	60.600.000	53.200.000	7.400.000	87,79
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	44.700.000	44.215.000	485.000	98,91
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.360.070.000	468.150.000	891.920.000	34,42
Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	204.900.000	174.813.000	30.087.000	85,32
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.061.958.500	1.797.439.919	264.518.581	87,17
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	344.164.000	308.372.000	35.792.000	89,60
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1.506.014.500	1.278.237.919	227.776.581	84,88
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	12.880.000	12.880.000	-	100,00
Pembinaan Disiplin ASN	90.480.000	90.480.000	-	100,00
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	60.000.000	59.800.000	200.000	99,67

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	48.420.000	47.670.000	750.000	98,45
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>3.002.211.000</b>	<b>2.838.054.194</b>	<b>164.156.806</b>	<b>94,53</b>
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	1.251.749.000	1.132.592.194	119.156.806	90,48
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.251.749.000	1.132.592.194	119.156.806	90,48
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.750.462.000	1.705.462.000	45.000.000	97,43
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.750.462.000	1.705.462.000	45.000.000	97,43
Sumber: Data BKPP Kota Banjarbaru				

**MISI 3 :**

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah

**SASARAN STRATEGIS 13 :**

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

**INDIKATOR KINERJA 22 :**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah dan Indeks Kepatuhan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik menggambarkan mutu pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru kepada masyarakat dimana hasilnya nanti sebagai bahan evaluasi terhadap perbaikan mutu pelayanan serta

pengambilan kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan

Indikator sasaran tersebut adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indikator ini digunakan untuk menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran capaian kinerja indikator dihitung berdasarkan nilai indeks komposit kepuasan masyarakat yang didapat melalui survei kepuasan masyarakat.

## **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pemerintah daerah dan indeks kepatuhan berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 90,00 kategori baik dan telah terealisasi sebesar 100,00 kategori baik. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerjanya sebesar 94,64%.

Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menyelenggarakan pelayanan publik terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Untuk mendapatkan masukan atau persepsi terhadap pelayanan yang diberikan maka perlu survei langsung berkenaan tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari pendapat masyarakat ketika atau setelah memperoleh pelayanan dari unit penyelenggara pelayanan publik. Persepsi ini dapat menginterpretasikan mengenai hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh *stakeholder* pengguna layanan dalam pemenuhan kebutuhan informasi mereka. Harapannya adalah agar seluruh unit penyelenggara pelayanan dapat lebih maju dalam melayani dan lebih respon terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat digunakan alat bantu berupa kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat pengguna layanan sebagai responden secara langsung, pertanyaan kuesioner meliputi 9 unsur, yaitu:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan prasarana

Nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan yang digunakan adalah:

**Tabel 3.156.**  
**Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: Data Bagian Organisasi Setda Kota Banjarbaru

## **2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir**

Perbandingan realisasi 2 tahun sebelumnya dimana realisasi tahun 2019 berada pada indeks 84,47 dan ditahun 2020 realisasi indeks tersebut naik sedikit menjadi 85,18 Selanjutnya di tahun 2021 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pemerintah daerah dan indeks kepatuhan mengalami kenaikan signifikan yaitu berada pada indeks 100.

### **3. Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional.**

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah dan Indeks Kepatuhan Pemerintah Kota Banjarbaru dibandingkan dengan realisasi IKM Kota Banjarbaru sebesar 100% dan target RPJMD sebesar 76,61 dengan capaian 130,53%.

### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

**Upaya yang telah dilakukan:**

- a. Memberikan konsultasi terkait pelaksanaan pelayanan publik.
- b. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat.

**Hambatan:**

Masih ada 2 unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang belum melaksanakan penilaian survey kepuasan masyarakat.

**Rencana Tindak Lanjut:**

Mendorong seluruh unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang untuk melaksanakan penilaian survey kepuasan masyarakat minimal 2 kali setahun dan memberikan penghargaan sebagai motivasi pendukung.

### **5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang**

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian target terutama dari segi anggaran telah dilakukan. Efisiensi atas penggunaan anggaran tersebut adalah sebesar 3,13% melalui Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota khususnya Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

## B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran program untuk mendukung terealisasinya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah dan Indeks Kepatuhan tahun 2022 adalah sebesar Rp.386.262.750,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.374.182.750,00 atau 96,87%.

**Tabel 3.157.**  
**Realisasi Anggaran Program Pendukung IKM, 2022**

No	Program	Pagu (Rp)	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	%
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota (Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana)	386.262.750	374.182.750	96,87
	Jumlah	386.262.750	374.182.750	96,87

Sumber: Data Bagian Organisasi Setda Kota Banjarbaru

### MISI 3

:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah

### SASARAN STRATEGIS 14 :

Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah

### INDIKATOR KINERJA 23 :

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

---

Meningkatnya kualitas layanan informasi publik dengan teknologi informasi dan komunikasi menggambarkan penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, guna mensinergikan penyelenggaraan pemerintahan dengan teknologi informasi dan menjadi alternatif solusi sebagai upaya pembenahan administrasi pemerintahan menuju terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan

---

komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Pada tahun 2022, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung.

Program Diskominfo Kota Banjarbaru yang mendukung dalam pencapaian kinerja sasaran terwujudnya tata kelola pemerintah, akses dan kualitas layanan

informasi publik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu:

- a. Program Aplikasi Informatika;
- b. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor;
- d. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja sasaran terwujudnya tata kelola pemerintah, akses dan kualitas layanan informasi publik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, dengan indikator kinerja indeks SPBE adalah:

**Tabel 3.158.**  
**Realisasi Kinerja Indeks SPBE, 2022**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian/ Kategori
1.	Indeks SPBE	Indeks	2,63	2,26	85,93%

Sumber: Data Diskominfo Kota Banjarbaru

Berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan pencapaian indikator Indeks SPBE dari target indeks SPBE sebesar 2,63 dan telah terealisasi yaitu sebesar 2,26 dengan predikat Cukup, sehingga capaian kinerja tahun 2022 adalah 80,53%.

Pengukuran capaian kinerja indikator Indeks SPBE diperoleh berdasarkan hasil penilaian mandiri atas pelaksanaan SPBE Tahun 2022 dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.159.**  
**Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan SPBE, 2022**

No	Komponen Yang Dinilai	Tingkat Kematangan
1	Domain Kebijakan Internal SPBE - Kebijakan Internal terkait - Tata Kelola SPBE	2,6
2	Domain Tata Kelola SPBE	1,9



No	Komponen Yang Dinilai	Tingkat Kematangan
	- Perencanaan Strategis SPBE - Teknologi Informasi dan Komunikasi - Penyelenggaraan SPBE	
3	Domain Manajemen SPBE - Penerapan Manajemen SPBE - Audit TIK	1,0
4	Domain Layanan SPBE - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik - Layanan Publik Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,82
	Indek SPBE	2,26
	Predikat SPBE	(Cukup)

Sumber: Data Diskominfo Kota Banjarbaru

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

**Tabel 3.160.**  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks SPBE**  
**2 Tahun Terakhir**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2020 Realisasi/ Capaian	Tahun 2021 Realisasi/ Capaian	Tahun 2022 Realisasi/ Capaian
1.	Indek SPBE	2,62 104,8%	2,11 80,53%	2,26

Sumber: Data Diskominfo Kota Banjarbaru

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

**Tabel 3.161.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks SPBE**  
**dengan Kab/Kota/Provinsi, 2022**

No	Indikator Kinerja	Kota Banjarbaru	Kab. Banjar	Kab. Tanah Laut	Kota Banjarmasin
1.	Indek SPBE	2,26	2,56	3,11	3,31

Sumber: Data Diskominfo Kota Banjarbaru

## 4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD dan Nasional

**Tabel 3.162.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks SPBE**  
**dengan Target RPJMD dan Target Nasional**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target RPJMD	Target Nasional
1.	Indeks SPBE	2,26 (Cukup)	2,63 (Baik)	2,6 (Baik)

Sumber: Data Diskominfo Kota Banjarbaru

Indeks SPBE Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2022 adalah 2,26 dengan predikat Cukup dan target RPJMD yang berakhir tahun 2022 adalah 2,63, kondisi ini memperlihatkan bahwa realisasi kinerja tahun ini belum mencapai target RPJMD.

## **5. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan**

### **Upaya yang telah dilakukan:**

Pemerintah Kota Banjarbaru terus berkomitmen untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan berkenaan tata kelola, akses dan kualitas layanan informasi publik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Keberhasilan penyelenggaraan itu dapat dilihat dari evaluasi SPBE yang dilakukan Kementerian PAN dan RB RI. Hal yang mendorong keberhasilan capaian kinerja adalah:

1. Adanya kebijakan yang mengatur mengenai pelaksanaan SPBE Pemerintah Kota Banjarbaru yaitu peraturan daerah Kota Banjarbaru nomor 5 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah mengatur referensi arsitektur dan domain arsitektur SPBE yang terdiri dari proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE dan layanan SPBE. Isi dari kebijakan ini disesuaikan dan berpedoman kepada Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarbaru dapat terlihat adanya penggunaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang baik dibuktikan dengan adanya penggunaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik seperti SIPD, SPSE, Simpeg, SIMAYA, aplikasi banjarbaru bagawi.

3. Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarbaru dapat terlihat adanya penggunaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang baik dibuktikan dengan adanya penggunaan layanan publik berbasis elektronik seperti LAPOR, PPID, JDIH, aplikasi satu pintu INTAN BJB, aplikasi RSD Idaman, aplikasi Dukcapil Banjarbaru.

**Hambatan:**

Kegagalan penyelenggaraan itu dapat dilihat dari evaluasi SPBE yang dilakukan Kementrian PAN dan RB RI adalah:

1. Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE masih belum dapat dipenuhi dengan baik dikarenakan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE masih dalam proses penyusunan pada saat pelaksanaan evaluasi mandiri.
2. Pelaksana penyelenggara SPBE pada Pemerintah Kota Banjarbaru masih sebatas pada surat keputusan tentang pembentukan tim koordinasi SPBE dan pembentukan tim asesor internal SPBE
3. Penerapan manajemen SPBE belum dilaksanakan secara optimal baik dari segi manajemen resiko, keamanan informasi, data, asset TIK, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan dan layanan SPBE sehingga pelaksanaan SPBE belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
4. Belum dilaksanakannya Audit TIK yang terdiri dari audit Infrastruktur, audit Aplikasi dan audit Keamanan Informasi SPBE.
5. Pedoman Manajemen SPBE pemerintah Kota Banjarbaru belum dibuat dan ditetapkan sehingga manajemen SPBE belum dilaksanakan sesuai dengan delapan manajemen yang terdapat pada peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

### Rencana Tindak Lanjut:

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya, sebagai berikut:

- a. Memproses penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE;
- b. Melakukan peningkatan dalam Pelaksanaan penyelenggaraan SPBE pada Pemerintah Kota Banjarbaru;
- c. Pada penerapan manajemen SPBE akan dilaksanakan secara optimal baik dari segi manajemen resiko, keamanan informasi, data, asset TIK, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan dan layanan SPBE sehingga pelaksanaan SPBE dapat dilaksanakan secara maksimal;
- d. Melaksanakan Audit TIK yang terdiri dari audit Infrastruktur, audit Aplikasi dan audit Keamanan Informasi SPBE;
- e. Memproses dan menetapkan penyusunan Pedoman Manajemen SPBE Pemerintah Kota Banjarbaru.

## 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.163**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indeks SPBE, 2022**

Program	Indikator Sasaran Program	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Efisiensi
Aplikasi Informatika	Nilai Aspek SPBE	147,62	89,65	57,97
Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase informasi publik pemerintah daerah	113,98	96,92	17,06
Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	123,82	98,79	25,03
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase tingkat pengamanan informasi pemerintah	177,33	98,80	78,53

Sumber: Data Diskominfo Kota Banjarbaru

## B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan pagu anggaran program untuk mendukung terealisasinya sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan, akses dan kualitas layanan informasi publik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi tahun 2022 sebesar Rp. 6.999.260.100 sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar Rp. 6.543.042.115 atau 93,48% dengan rincian perprogram sebagai berikut:

**Tabel 3.164.**  
**Realisasi Anggaran Program Pendukung Indeks SPBE, 2022**

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.049.086.000	2.955.282.164	96,92
2	Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.442.077.300	3.048.784.151	89,65
3	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	308.593.300	304.862.300	98,79
4	Penyelenggaraan Persandiaan untuk Pengamanan Informasi	199.503.500	197.113.500	98,80
Jumlah		6.999.260.100	6.543.042.115	93,48

Sumber: Data Diskominfo Kota Banjarbaru

# LAPORAN KINERJA 2022

---

**PENUTUP**

**BAB IV**

## BAB IV

# PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*. Capaian kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022 secara keseluruhan dinyatakan berhasil.

Keberhasilan yang dicapai dalam capaian sasaran strategis merupakan hasil proses kerjasama seluruh pihak yang ada di kota Banjarbaru. Dimana partisipasi semua komponen Pemerintah Daerah serta masyarakat secara luas yang ada saling bekerjasama, saling pengertian, saling memberi dukungan dan rasa memiliki atas Kota Banjarbaru untuk bersama-sama mewujudkan Kota Banjarbaru Juara.

Secara keseluruhan capaian kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya telah dilakukan seperti penerbitan kebijakan terkait pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi, koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga terwujudnya aparatur yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun

mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan seluruh SKPD akan dilakukan dengan lebih intensif mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap SKPD dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

Selanjutnya kami mengharapkan program-program yang telah berjalan dengan baik, agar dapat dilanjutkan dan ditingkatkan kembali pencapaiannya di tahun yang akan datang, sedangkan beberapa program yang mendapat kendala dalam pelaksanaannya agar dapat di evaluasi dan dicari solusinya untuk meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru. Akhirnya semoga Allah SWT, senantiasa memberikan petunjuk dan lindungan- Nya kepada kita semua.

**WALI KOTA BANJARBARU,**



**H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, SH., MH**





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H., M.H

Jabatan : Wali Kota Banjarbaru

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Banjarbaru, 18 Januari 2022  
WALI KOTA BANJARBARU,



H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H., M.H

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KOTA BANJARBARU**

**VISI**  
**“BANJARBARU MAJU, AGAMIS DAN SEJAHTERA”**

No	Misi	No	Sasaran Strategis	IKU	Target
I	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia	1.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	10,97
		2.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	72,20
				Angka prevalensi stunting	16,50
		3.	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks pembangunan gender	92,65
		4.	Terjaganya daya beli masyarakat	Angka Inflasi	<3
		5.	Meningkatnya toleransi beragama, keamanan, kenyamanan, kesadaran hukum dan ketertiban masyarakat	Persentase pembinaan keagamaan, penyelesaian potensi konflik, SARA dan Pelanggaran Perda	100
				Persentase penyelesaian kebencanaan	100
II	Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga	6.	Meningkatnya kegiatan perekonomian kota	Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	2,50
				Pertumbuhan pelaku usaha mikro, industri kecil dan ekonomi	4,50

No	Misi	No	Sasaran Strategis	IKU	Target
	Kelestarian Lingkungan Hidup			kreatif	
		7.	Meningkatnya PAD dan Nilai Investasi Daerah	Peningkatan PAD (Milyar)	251,1 Milyar
				Persentase Peningkatan Investasi	4
		8.	Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran	Angka Kemiskinan	4,50
				Angka Pengangguran	5,39
		9.	Meningkatnya stabilitas pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk ketersediaan pangan	80,21
		10.	Meningkatnya infrastruktur kota yang berkualitas	Indeks infrastruktur wilayah	74,28
		11.	Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	62,17
III	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah	12.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	B
				Nilai LPPD	Sangat Tinggi
				Opini BPK	WTP
				Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)	Level 3
				Indeks Profesionalitas ASN	72
		13.	Meningkatnya	Indeks	Baik

No	Misi	No	Sasaran Strategis	IKU	Target
			kualitas pelayanan publik	Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah dan Indeks Kepatuhan	(90)
		14.	Meningkatnya kualitas layanan informasi publik pemerintah daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,62

No	Program	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 59.904.296.850
2.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 15.772.740.000
3.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 25.044.399.792
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 369.118.000
5.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 540.200.000
6.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 224.000.000
7.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 135.000.000
8.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 85.200.000
9.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Rp. 559.054.500
10.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 115.000.000
11.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 580.000.000
12.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 1.583.998.250
13.	Program Penanganan Bencana	Rp. 173.428.000

No	Program	Anggaran
14.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 2.104.211.000
15.	Program Pencegahan, Penaggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 489.085.500
16.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 102.400.000
17.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 616.154.000
18.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 179.552.000
19.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 841.510.000
20.	Program Pengembangan UMKM	Rp. 709.600.000
21.	Program Pengendalian Pelaksanaan dan Penanaman Modal	Rp. 369.695.000
22.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 1.098.959.950
23.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 4.140.012.250
24.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 556.883.000
25.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 154.400.000
26.	Program Hubungan Industrial	Rp. 189.699.500
27.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 272.987.250
28.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 1.183.396.750
29.	Program Kawasan Permukiman	Rp. 3.998.557.150
30.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 15.075.900.000
31.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 25.653.125.500
32.	Program Pengembangan Permukiman	Rp. 23.465.682.000
33.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 5.007.521.000

No	Program	Anggaran
34.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 46.238.371.100
35.	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 900.446.000
36.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 1.582.427.500
37.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Rp. 50.000.000
38.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 19.545.570.850
39.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 23.977.864.790
40.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 5.054.561.250
41.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 2.319.164.750
42.	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 6.008.606.750
43.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 350.000.000
44.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 8.873.946.250
45.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 2.799.086.000
46.	Program Aplikasi Informatika	Rp. 3.558.077.300
47.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 516.958.878.093

Banjarbaru, 18 Januari 2022  
WALIKOTA BANJARBARU,



H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H., M.H

NO.	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	JENIS PENGHARGAAN	NARASI
1.		Penghargaan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) ke-4	Penganugerahan Penghargaan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) ke-4 diselenggarakan oleh Menteri PANRB bersama Kemendagri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI. Wali Kota Banjarbaru melalui Asisten III Setdako Banjarbaru menerima penghargaan yang diberikan oleh MenPAN-RB, di The Ritz-Cariton, Mega Kuningan Barat No. 1, Jakarta Selatan, (16/06/2022). Untuk Kota Banjarbaru sendiri mendapat piagam penghargaan 6 Peserta Terbaik Kategori Instansi Pemerintah (IP) Outstanding Achievement Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) ke-4 tahun 2022.
2.		Penghargaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP terbaik III	Kota Banjarbaru meraih penghargaan dari Pemprov Kalsel dalam ajang penghargaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di gedung Idham Khalid setda Prov Kalsel, (09/03/2023). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Sekda Provinsi Kalimantan Selatan kepada Sekda Kota Banjarbaru. Kota Banjarbaru meraih juara terbaik III (tiga) dalam kategori Reformasi Birokrasi. Ajang penghargaan ini ada sebagai apresiasi pemerintah bagi daerah yang berkomitmen dalam mengelola birokrasi pelayanan dengan baik kepada masyarakat. Dengan penilaian langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Biro Organisasi




NO.	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	JENIS PENGHARGAAN	NARASI
3.		Penghargaan Pelayanan Publik terbaik II	Sekretariat Provinsi Kalsel.  Kota Banjarbaru meraih penghargaan dari Pemprov Kalsel dalam ajang penghargaan Pelayanan Publik di gedung Idham Khalid setda Prov Kalsel, (09/03/2023). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Sekda Provinsi Kalimantan Selatan kepada Sekda Kota Banjarbaru. Kota Banjarbaru meraih juara terbaik II (dua) dalam kategori Pelayanan Publik. Ajang penghargaan ini ada sebagai apresiasi pemerintah bagi daerah yang berkomitmen dalam mengelola birokrasi pelayanan dengan baik kepada masyarakat. Dengan penilaian langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Kalsel.
4.		Penghargaan Sertifikat Kota Bebas Frambusia	Kementerian Kesehatan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Banjarbaru berupa sertifikat Kota Bebas Frambusia, di Jakarta, (21/02/2023). Penghargaan yang diberikan langsung oleh Menteri Kesehatan RI Budi G Sadikin kepada Wali Kota Banjarbaru. Hal ini merupakan bukti nyata Pemerintah menekan kemunculan penyakit Frambusia. Wali Kota Banjarbaru H. M. Aditya Mufti Ariffin sangat mengapresiasi Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, beserta jajaran Puskesmas se-Kota Banjarbaru.



NO.	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	JENIS PENGHARGAAN	NARASI
5.		Penghargaan Kontribusi Pemko Banjarbaru dalam Pendidikan Agama Islam	Wali Kota Banjarbaru H. M. Aditya Mufti Ariffin menerima piagam penghargaan dari Kementerian Agama RI, diserahkan langsung oleh Kepala Kemenag Kota Banjarbaru yang diwakili oleh Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam H. Hairani, di Ruang Tamu Utama Wali Kota Banjarbaru, (24/11/2022). Aditya menyambut baik penghargaan tersebut, dan akan terus meningkatkan kolaborasi dengan Kemenag Kota Banjarbaru dalam pengembangan Pendidikan Agama Islam di Kota Idaman.
6.		Penghargaan BKN Award 2022	Walikota Banjarbaru yang diwakili Asisten III menerima secara simbolis penghargaan BKN Awards 2022 oleh Plt. Kepala BKN di gedung Idham Khalid Provinsi Kalsel, (27/09/2022). Penghargaan BKN Awards ini merupakan sebuah apresiasi kepada setiap pemerintah daerah di bidang manajemen ASN yang kali ini diserahkan langsung oleh plt. Kepala BKN kepada kepala-kepala daerah di Kalimantan Selatan. Pemerintah Kota Banjarbaru menerima 3 Kategori Penghargaan antara lain; Implementasi Manajemen ASN, Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian, dan Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja.

NO.	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	JENIS PENGHARGAAN	NARASI
7.		Penghargaan dalam ajang Digital Innovation Award 2022	Penghargaan Digital Innovation Award 2022 diterima oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru didampingi Kabid Komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru mewakili Wali Kota Banjarbaru di MNC Conference Hall, GD Inews, Lt.4, Jakarta, (31/03/2022) malam. Digital Innovation Award merupakan ajang bergengsi untuk memperebutkan penghargaan dari MNC Portal Indonesia sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan kepada pihak-pihak yang sukses menciptakan dan mengembangkan inovasi berbasis digital untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam hal tersebut Pemerintah Kota Banjarbaru meraih penghargaan dalam kategori Digital Innovation for Public Service, melalui Aplikasi UMKMJuara.id.
8.		Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan kategori 'Pelayanan Prima' dan Penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori	Kota Banjarbaru meraih penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan kategori 'Pelayanan Prima', yang ditujukan kepada DPMPSTSP Kota Banjarbaru dan penghargaan penyelenggara pelayanan publik dengan kategori 'Sangat Baik', yang ditujukan kepada Disdukcapil Kota Banjarbaru. Piagam penghargaan ini diterima langsung oleh Wali Kota Banjarbaru didampingi oleh kedua Kepala Dinas tersebut, di Jakarta, (29/03/2022).

NO.	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	JENIS PENGHARGAAN	NARASI
9.		Penghargaan Top Leader on Digital Implementation dan Top Digital Implementation Bintang 4	Kota Banjarbaru meraih penghargaan dalam ajang Top Digital Awards 2021, di Dian Ballroom, Hotel Raffles, Jakarta, (21/12/2021). Kota Banjarbaru dengan sukses meraih dua kategori penghargaan sekaligus, yaitu Top Leader on Digital Implementation yang diberikan kepada Wali Kota Banjarbaru dan Top Digital Implementation Bintang 4 untuk Diskominfo Kota Banjarbaru, yang mana dinilai mampu mengelola instansi secara modern, professional dan lebih terpercaya dengan mengimplementasikan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), serta digital yang lebih mumpuni atau canggih.